

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

POLITIK IDENTITAS



Menyoal
RUU KIA

**Mukmin
Berjiwa
Pejuang,
Bervisi
Pemenang**

**Ustadz H. Ismail Yusanto:
IDENTITAS POLITIK
ISLAM ITU WAJIB**



Tempat Ibadah yang Menjadi Dasar Masjid: Namazgah

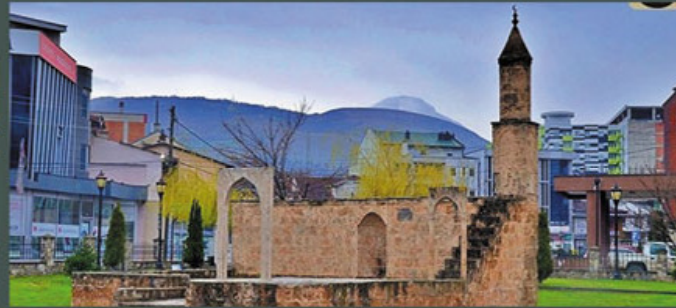
Ketika Nabi kita (saw.) melakukan perjalanan jarak jauh atau ekspedisi dengan para sahabatnya, ia memiliki area yang dibersihkan dan dikelilingi dengan batu untuk melakukan shalat di daerah-daerah tertentu. Struktur terbuka ini, yang disebut Namazgah, dipertahankan selama berabad-abad oleh para khalifah dan kepala negara yang mengikuti jejak Nabi. Masjid-masjid kecil ini, yang banyak kita jumpai contohnya di Kekaisaran Ottoman, menjadi dasar dari tempat-tempat ibadah dalam arsitektur Islam.

Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/camilerin-temelini-olusturan-ibadet-mahali-namazgah/2>



Sebenarnya, kata namazgah yang berarti tempat shalat dalam bahasa Persia, sama dengan kata mushala yang digunakan dalam bahasa Arab. Kata namazgah juga digunakan sebagai istilah fikih untuk tempat-tempat tertentu di luar pemukiman tempat diadakannya Idul Fitri, salat hujan, dan salat jenazah.



Kemudian dalam sejarah, di kota-kota Islam dan tempat-tempat yang baru didirikan, ruang shalat besar dengan mihrab dan mimbar tetap dibangun di bagian kiblat untuk shalat Idul Fitri. Mihrab dan mimbar di dalam mushola dibangun dari batu untuk meminimalkan efek eksternal akibat struktur masjid yang terbuka.

Kekhilafahan Utsmaniyah selalu lebih suka menjaga nilai-nilai Islam sejak berdirinya. Dimungkinkan untuk menemukan struktur namazgah sedikit demi sedikit di banyak tempat di mana Anda melakukan ekspedisi. Seiring waktu, dengan penaklukan kota dan intensifikasi kegiatan zonasi, beberapa tempat doa ini tetap berada di kota dan berubah menjadi elemen yang memberi tahu kita betapa pentingnya doa nenek moyang kita.



Tempat shalat tertua yang diketahui di Istanbul adalah tempat ibadah yang dibangun oleh Fatih Sultan Mehmet di Okmeydanı. Pada tahun-tahun itu, ketika Istanbul belum ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmet, tempat shalat ini dibangun pada masa kampanye.



Masjid Kuba pertama kali dibangun oleh Nabi kita (saw.) dan bahkan membuat rencana dan tata letaknya sendiri. Menempatkan mimbar di dalam ruang shalat menentukan posisi mimbar di dalam masjid. Budaya mimbar yang berada di lokasi yang sama hampir di setiap masjid, merupakan tatanan yang diwariskan oleh mushala pada arsitektur masjid.

Daftar Isi

Hiwar: Identitas Politik Islam Itu Wajib

47

Dalam aspek apapun, termasuk politik, identitas Islam tentu wajib ditonjolkan. Tak boleh disembunyikan atau ditutup-tutupi. Karena itu narasi negatif 'politik identitas' yang menyudutkan kaum Muslim dan kelompok Islam—yang berupaya berpegang teguh dengan identitas keislamannya—tak perlu dipedulikan.

Nafsiyah: Mukmin Berjiwa Pejuang, Bervisi Pemenang

23

Setiap Muslim sejatinya memiliki jiwa pejuang dan mempunyai visi untuk selalu menjadi pemenang. Bagaimanapun keimanan dan kebenaran harus diperjuangkan agar selalu menjadi pemenang dalam melawan kekufuran dan kebatilan. Bagaimana caranya? Inilah yang dijelaskan dalam rubrik *Nafsiyah* kali ini.

Nisa': Menyoal RUU KIA

67

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) resmi ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI (30/6/2022). Berbagai pihak mendukung RUU KIA. RUU ini dipandang banyak memberikan hak perempuan dan anak sehingga akan mampu mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Betulkah demikian?

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi: Belenggu Nasionalisme!</i>	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah: Politik Identitas</i>	7
<i>Fokus: Ada Apa Dengan Politik Identitas?</i>	9
<i>Analisis: Identitas Politik Islam</i>	14
<i>Iqtishadiyah: Krisis Pangan dan Energi</i>	19
<i>Nafsiyyah: Mukmin Berjiwa Pejuang, Bervisi Pemenang</i>	23
<i>Telaah Kitab: Kharaj dan 'Ushr</i>	26
<i>Ibrah: Hamba Merdeka</i>	30
<i>Catatan Dakwah: Hijrah</i>	32
<i>Fikih: Apakah Basmallah Bagian Dari Surat Al-Fatihah?</i>	35
<i>Atsar : Stempel Ottoman di Tunisia: Istana Bey</i>	39
<i>Lintas Dunia</i>	41

<i>Baiti Jannati: Anakku, Merdekakanlah Dirimu...</i>	43
<i>Hiwar: Identitas Politik Islam Itu Wajib</i>	47
<i>Siyasah Dakwah: Politik Umat Islam Indonesia Masa Kemerdekaan</i>	52
<i>Afkar: Politik Islam Untuk Semua</i>	56
<i>Tafsir: Ancaman Bagi Mereka Yang Mendustakan Rasul saw.</i>	60
<i>Soal Jawab: Bolehkah Meninggalkan Identitas Islam Dalam Berpolitik?</i>	64
<i>Nisa: Menyoal RUU KIA</i>	67
<i>Hadis Pilihan: Al-Musâqâh</i>	70
<i>Takrifat: Syubhat Makna Asal Printah Untuk Wajib</i>	72
<i>Dunia Islam: Amerika Vs Cina, Dimana Posisi Dunia Islam? (Habis)</i>	75
<i>Tarikh: Spirit Islam Dalam Perlawanan Umat Tatar Sunda Terhadap Penjajah (Lanjutan)</i>	78

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, setiap orang, kelompok, organisasi, partai atau bahkan negara pasti memiliki ciri. Identitas. Ciri/identitas itulah yang membedakan seseorang dengan orang lain; suatu kelompok dengan kelompok lain; suatu organisasi dengan organisasi lain; suatu partai dengan partai lain; suatu negara dengan negara lain. Ciri/identitas itu bisa keyakinan/ideologi, visi-misi, orientasi, hukum/aturan yang digunakan, simbol/lambang bahkan sekadar jargon.

Karena itu jika dalam ranah politik saat ini tiba-tiba ada kalangan yang menyoal identitas dalam berpolitik, tentu ini sangat aneh. Apalagi jika narasi yang mereka sebut dengan 'politik identitas' itu cenderung menysar—sekaligus untuk memojokkan—kelompok Islam. Sebabnya, sebagaimana kelompok Islam punya identitas, kelompok sekuler pun punya. Bahkan acapkali simbol-simbol dan identitas sekulerisme secara terbuka mereka pertontonkan, bahkan dengan sangat agresif. Menolak syariah, mengkriminalisasi ajaran Islam seperti khilafah, dll bukankah itu identitas yang menonjol dari kaum sekuler? Bukankah juga terus-menerus mereka lakukan secara massif?

Liciknya, saat ada momen penting dan dianggap menguntungkan diri, kelompok dan partainya, kalangan sekuler berupaya keras melakukan manipulasi identitas. Setiap menjelang Pemilu/Pilkada atau Pilpres, misalnya, selalu mereka berupaya memanipulasi 'simbol-simbol' dan identitas Islam. Memakai baju koko, peci, sarung, kerudung, jilbab, berkunjung ke banyak pesantren, dll. Semua itu mereka lakukan semata-mata untuk meraih simpati kelompok Islam dan kaum Muslim. Ujung-ujung demi meraih banyak suara dalam Pemilu/Pilkada atau Pilpres. Padahal sebelum Pemilu/Pilkada atau Pilpres simbol-simbol dan identitas Islam itu mereka tanggalkan. Bahkan sering mereka persoalkan. Inilah politik identitas yang sesungguhnya, yang secara curang mereka lakukan. Apalagi faktanya, usai Pemilu/Pilkada dan Pilpres, sikap islamophobia kembali mereka pertontonkan secara tak malu-malu.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Graha Mampang Lt-1 -
Suite 101. Jl.
Mampang Prapatan
Raya Kav. 100, Jakarta
Selatan
e-mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).



BELENGGU NASIONALISME!

Ada hal penting yang perlu kita perhatikan dari Konferensi Khilafah yang diselenggarakan Hizbut Tahrir di Inggris pada Sabtu-Ahad (16-17) bulan Juli kemarin yaitu belenggu nasionalisme. Dalam konferensi yang mengambil tema besar “ Dari al Hind (India) ke Al Quds”, Dr. Nazreen Nawaz, Direktur Bagian Perempuan di Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir menyampaikan pidato yang sangat menggugah dengan judul : “Negara Bangsa – Sebuah Alasan untuk Tidak Bertindak”. Dalam pidatonya Dr Nazreen mengungkap apa yang terjadi di tengah kaum muslimin terutama muslimah, bagaimana belenggu nasionalisme menjadi racun yang menghalangi kaum muslimin, dan terakhir mengungkap pentingnya Khilafah ala minhajin nubuwwah untuk menyelesaikan masalah ini.

Di India, muslimah dipermalukan, dihina dan dilecehkan setiap hari. Pada April tahun ini, seorang imam kepala Hindu militant di Uttar Pradesh menyampaikan pidato berapi-api di depan rapat umum besar-besaran di luar sebuah masjid di kota Khairabad, mengancam akan menculik dan memperkosa wanita Muslim. Pada Maret tahun ini, sebuah pengadilan India menegakkan larangan jilbab di ruang kelas di negara bagian Karnataka, India selatan – menyangkal hak gadis Muslim untuk mengejar pendidikan sambil berpegang pada keyakinan Islam mereka.

Nasionalis Hindu di India juga telah melancarkan serangan online yang kejam terhadap wanita Muslim yang penuh dengan hinaan seksual, ancaman pemerkosaan, dan citra eksplisit. Ini termasuk membuat aplikasi di mana

lebih dari 100 wanita Muslim dijual dalam lelang online palsu, diisi dengan konten cabul. Semua ini adalah setetes air dari rentetan pelecehan dan ancaman harian yang dihadapi wanita Muslim di India saat ini..... namun tidak ada pemimpin Muslim, tidak ada negara bagian, tidak ada pemerintah yang membela mereka!

Hal yang sama terjadi Di Kashmir, wanita dan gadis Muslim diteror setiap hari oleh pasukan India, termasuk dalam serangan pada malam hari. Dan di Tanah Terberkati Palestina, muslimah diteror, dipenjara, dipukuli dan ditembak mati di siang bolong oleh pasukan Zionis. Namun, tidak ada satu penguasa, pemerintah atau negara yang menanggapi tangisan saudari muslimah kita!

Dr Nazreen menyebutkan bahwa hal ini tidak bisa dilepaskan dari paham nasionalisme dalam sistem negara bangsa (nation state) yang telah memecah belah kaum muslim, memperlemah, bahkan menjadi legitimasi untuk tidak bertindak! Para penguasa dan rezim di negeri-negeri Muslim saat ini juga memiliki legacy (warisan) yang ternoda dan dikotori oleh penyakit busuk nasionalisme dan politik negara-bangsa. Penyakit yang membuat mereka melihat Muslim India, Kashmir, Palestina dan negeri-negeri lain seolah jauh dari perbatasan nasional mereka sendiri, dianggap sebagai warga negara asing di negeri asing daripada saudara-saudara mereka sendiri. Semua ini mengabaikan firman Allah SWT: “*Sesungguhnya Orang-orang mukmin itu adalah bersaudara...*” [Al-Hujurat 49:10]. Padahal Allah SWT di dalam Al Qur’an berfirman: “*(Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama,*



maka kamu wajib memberikan pertolongan” [Al-Anfal 8:72].

Nasionalisme adalah penyakit yang membuat mereka memandang penderitaan dan penderitaan umat Islam di negeri lain sebagai masalah asing yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Nasionalisme adalah penyakit yang melucuti bangsa dan negara dari kemanusiaan. Nasionalisme membuat mereka berdiri diam dan lumpuh di tengah genosida tanpa kemauan politik untuk bertindak kecuali untuk kepentingan nasional mereka. Nasionalisme dan politik negara-bangsa adalah penyakit yang menyebabkan rezim Muslim mengusir Muslim yang putus asa mencari perlindungan di tanah mereka, menolak mereka tempat perlindungan yang bermartabat dan kewarganegaraan karena mereka memandang mereka sebagai orang asing karena kebangsaan atau etnis mereka.

Jadi, kita melihat pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Bangladesh mengusir pengungsi Rohingya yang putus asa, lebih suka melihat mereka mati di laut daripada memberi mereka perlindungan di tanah mereka. Rezim Hasina di Bangladesh mengasingkan pengungsi pulau Bhasan Char yang tidak layak huni yang rawan banjir atau kembali ke tangan para pembunuh mereka di Myanmar.

Para penguasa dan rezim nasionalis ini tidak hanya meninggalkan Muslim yang tertindas... tetapi juga secara aktif berteman, mendukung, dan menjalin aliansi dengan mereka yang menganiaya dan membantai Muslim. Bahkan penghinaan menjijikkan terhadap Nabi (saw) kita tercinta oleh juru bicara BJP India tidak cukup untuk menghalangi rezim Muslim nasionalistis ini dari dukungan mereka terhadap negara bagian India apartheid ini.

Dr Nazreen juga mengingatkan kita semua tentang pentingnya Khilafah yang akan menjaga kehormatan para muslimah. Di bawah Khilafah di masa lalu melakukan futuhat, menyebarkan Islam sekaligus berperang melindungi dan mempertahankan kehormatan wanita muslimah.

Futuhat (penaklukan) India dan Hind terjadi sebagai respon tangisan beberapa wanita Muslim yang dipenjarakan Raja Hindu India abad ke-8 yang menindas, Raja Dahir. Khalifah pada saat itu, al-Walid bin Abdul Malik mengerahkan pasukan yang tangguh, dipimpin oleh jenderal besar Muslim Muhammad bin Qasim untuk menyelamatkan para wanita ini – meskipun ibu kota Khilafah berada di Damaskus pada saat itu – ribuan mil dari India . Khalifah abad ke-9, al-Mu'tassim bi'llah, mengirim pasukan besar untuk menyelamatkan seorang wanita Muslim di Amuriyah, Turki yang ditangkap dan dianiaya oleh Romawi - meskipun ibukota Khilafah berada di Baghdad di waktu. Dan tentara pemimpin besar militer Islam abad ke-10, Al-Mansur ibn Abi Aamir dari Andalusia, Spanyol, mencapai ujung selatan Prancis (Kerajaan Navarre) sebagai tanggapan atas dua wanita Muslim yang dipenjarakan di sebuah gereja.

Adalah penting bagi kita memperhatikan empat point penting dari konferensi ini. Pertama, meningkatkan kesadaran : “Kita harus meningkatkan kesadaran akan solusi yang benar dan tindakan yang benar. Ini adalah kewajiban Islam kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam selebaran ini kita telah menyoroti solusi yang sesungguhnya. Bagikan selebaran ini kepada semua orang yang Anda kenal.” Kedua, Meminta tanggung jawab para penguasa negeri Islam: “Kita harus mengatakan tidak pada negosiasi dan kesepakatan dengan rezim Zionis dan Hindutva, dan kita harus menuntut dari pemerintah Muslim untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka,”

Ketiga, Menyerukan tentara: “Kita harus vokal dalam menyerukan agar tentara Muslim melakukan mobilisasi, karena mereka punya kemampuan peralatan untuk membebaskan umat Islam yang berada di bawah pendudukan dan menjadi korban penindasan” Keempat, Bergabung dengan upaya mendirikan Khilafah: “ Kita harus menjelaskan dalil-dalil kembalinya Khilafah kepada umat Islam. Hanya Khilafah Rashidah yang akan melakukan pembebasan Al-Quds, Kashmir dan semua tanah pendudukan lainnya,”. Allahu Akbar. [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

KEMERDEKAAN SEJATI

Yuli Sarwanto
(Direktur FAKKTA)



udah 77 tahun kemerdekaan bangsa ini diproklamkan. Sungguh usia yang tak muda lagi bagi Indonesia. Menuju cita-cita menjadi bangsa maju, adil, Makmur, sejahtera lahir dan batin.

Para pahlawan telah mewariskan semangat pada generasi berikutnya, bahwa kita tidak boleh menjadi bangsa jongos. Bangsa yang tunduk dalam ketiak bangsa asing. Mereka punya semboyan yang begitu masyhur; merdeka atau mati (syahid). Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, Indonesia berhasil mengusir penjajah. Patut kita syukuri ini.

Namun, pekerjaan besar masih harus dipikul oleh generasi berikutnya, karena sejatinya Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Penjajah memang telah berhasil dipaksa angkat kaki dari negri ini, tetapi sistemnya masih terus diterapkan.

Sebagai contoh, KUHP pidana dan perdata Indonesia masih menerapkan hukum warisan Belanda. Implikasinya, sistem ini tak mampu menjawab tantangan atas maraknya kriminalitas, jual beli hukum, dst.

Sistem politik Indonesia juga begitu kental dengan corak sistem politik Eropa dan Amerika. Trias Politica, "sunnah" dari B. Mostequieu dan John Locke, sampai kini terus diamalkan. Muncullah kemudian praktik politik yang oportunistik. Sistem ekonomi kita mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme-liberal. Pemilik modal asing maupun swasta bebas mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisasi intervensi dari pemerintah. Alhasil, kekayaan alam negeri ini terus dikuras oleh bangsa asing.

Bidang sosial dan budaya pun cenderung berkiblat ke Barat, seperti dalam hal pergaulan maupun berpakaian. Kesimpulannya: Indonesia masih terjajah.

Negeri berpenduduk mayoritas Muslim ini sejatinya memiliki khazanah yang agung guna menjadikan Indonesia merdeka seutuhnya. Caranya ialah kembali pada al-Quran dan Sunnah.

Saat ini, Islam belumlah dipakai secara menyeluruh. Islam dipandang hanya sebatas agama yang mengatur ibadah ritual dan spiritual sebagaimana agama-agama lain. Islam saat ini digunakan hanya untuk mengatur (acara) kematian, tetapi tidak digunakan untuk mengatur kehidupan.

Padalah Islam adalah agama yang sempurna, mengatur urusan pribadi, keluarga maupun negara. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Kusempurnakan nikmatKu kepadamu serta telah Kuridhai Islam sebagai agamamu* (QS al-Maidah [5]: 3).

Karena itu negeri ini bisa merdeka sepenuhnya jika mau menerapkan syariah Islam secara *kaaffah* dalam bingkai khilafah. Sebabnya, kemerdekaan itu harus terwujud dalam dua aspek. *Pertama*: Merdeka secara lahir. Artinya, bangsa ini harus terbebas segala bentuk penjajahan. Baik secara fisik maupun



non-fisik. *Kedua*. Merdeka secara batin. Diejawantahkan dalam bentuk kemerdekaan dari penghambaan kepada selain Allah SWT. Bagi umat Islam, hal ini adalah harga mati. Allah adalah satu-satunya Tuhan Yang layak disembah. Dia pula Satu-satunya Yang berhak menetapkan hukum.

Katakanlah, "Sungguh aku berada di atas hujjah yang nyata (al-Quran) dari Tuhanku, sedangkan kalian mendustakan itu. Tidak ada padaku apa (azab) yang kalian minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (TQS al-An'am [6]: 57). []

TINGGALKAN SOLUSI PBB

Ahmad Rizal
(Direktur
ELFIKRA)



edia massa tengah disibukkan dengan upaya membantu opini Ukraina menghadapi invasi Rusia. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara di dunia berlomba-lomba mengecam, mengutuk Rusia bahkan memberikan berbagai

sanksi di negaranya bagi transaksi atau kegiatan apapun yang berkaitan dengan Rusia.

Bantuan terus mengalir bagi Ukraina. Bank Dunia menyetujui paket bantuan sebesar US\$723 juta atau Rp10 triliun (dengan rata-rata Kurs Rp14.385 per dolar AS) berupa pinjaman dan hibah.

Hampir semua negara berpendapat bahwa perang ini adalah 'bencana' bagi dunia karena akan memangkas pertumbuhan ekonomi global. Perang di Ukraina datang pada saat yang buruk bagi dunia karena inflasi sudah meningkat akibat Covid-19. Begitu 'hebohnya' dunia atas penderitaan Ukraina.

Namun, bagaimana dengan penderitaan Palestina yang telah lama mengalami penindasan? PBB memperlihatkan standar ganda yang harusnya tidak bisa diterima akal dan rasa kemanusiaan. Bagaimana mungkin membela Ukraina setengah mati, tetapi melakukan pembiaran terhadap Israel yang telah bertindak tak manusiawi terhadap Palestina sekian tahun lamanya. Jelas, perdamaian dunia dan perlindungan HAM yang hakiki tidak akan bisa kita dapatkan jika berharap dari negara-negara yang ada di dunia dengan sistem kapitalismenya saat ini.

Sejarah memberikan pelajaran berharga kepada kita. Keluarnya resolusi PBB ditentukan oleh sikap negara pemilik hak veto, terutama AS. Selama ini banyak resolusi terhadap Israel yang kandas karena diveto AS, termasuk resolusi terhadap Israel atas invasi ke Gaza yang menewaskan lebih dari 1300 orang; termasuk di antaranya wanita, anak-anak dan orang tua.

Tercatat sejak tahun 1972 sampai tahun 2009, sudah lebih dari 68 resolusi PBB yang berhubungan dengan eksistensi Israel di Palestina diveto Amerika. Ini belum termasuk resolusi setelah tahun tersebut plus resolusi terakhir saat israel melancarkan agresinya di Gaza.

Amerika Serikat pun dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan memveto usulan Palestina tersebut yang diungkapkan oleh Perdana menteri Israel Benyamin Netanyahu, "Upaya Palestina untuk meraih dukungan dari PBB akan gagal, setelah Amerika Serikat (AS) berniat untuk memveto dukungan itu," jelas Netanyahu seperti dikutip MENAFN, Senin (19/9/2011).

Artinya, sebuah aktivitas yang sia-sia ketika berharap kepada PBB, termasuk di dalamnya keinginan untuk menjadi anggota PBB.

Sebenarnya solusi atas persoalan Palestina haruslah melihat status dari tanah Palestina itu sendiri. Inilah fakta yang harus dijadikan sebagai objek berpikir seluruh umat yang ingin benar-benar melihat kemerdekaan sejati bagi bangsa Palestina, bukan malah menjadikan persoalan Palestina sebagai sumber pemikiran itu sendiri. []



POLITIK IDENTITAS

Muhammad Rahmat Kurnia

Istilah politik identitas kini mencuat kembali. Narasi yang dibangun bernada buruk, tercela, negatif dan harus dijahai. “Hanya saja, politik identitas itu selalu disematkan kepada umat Islam,” ungkap Pak Djauhari. “Seakan-akan umat Islam tidak boleh membawa identitas Islam dalam kehidupan politiknya,” tegas lelaki setengah baya itu. “Kayaknya mereka tidak menghendaki Islam diamalkan di semua tempat dan waktu. Islam hanya boleh diamalkan di pojok-pojok masjid,” tambahnya.

Ketika ramai-ramai isu ‘rendang babi Padang’ beberapa waktu lalu, masyarakat Minang pun protes. Bahkan ada seorang emak-emak di Tik Tok memprotesnya. “Orang Padang itu agamanya Islam. Rendang Padang itu sudah pasti terbuat dari bahan halal. Tak mungkin babi,” kira-kira begitu ungkapnya.

Langsung muncul tudingan bagi setiap orang yang berpendapat senada dengan emak-emak itu sebagai menggunakan politik identitas. Tentu, identitas yang mereka maksudkan adalah Islam. Begitu pula saat ada orang menyerukan penerapan syariah Islam untuk kemaslahatan bersama. Ditudinglah sebagai sedang memainkan politik identitas. Orang yang menyampaikan ajaran Islam tentang haram memilih pemimpin kafir dituduh pula tengah menggunakan politik

identitas. “Pada waktu Gubernur DKI Jakarta bersikap tegas terhadap kasus Holywings yang menyakitkan perasaan umat Islam itu, eh Pak Anies malah dijuluki bapak politik identitas,” Pak Sabili berkomentar.

Pada tanggal 15 Juli 2022 lalu, Gerakan Nasional Anti Islamofobia (GNAI) dideklarasikan sejumlah tokoh dan aktivis lintas ormas Islam, di Aula Buya Hamka Masjid Al-Azhar. Gerakan ini untuk melawan isu Islamofobia di dunia yang digambarkan media Barat. Senada dengan itu 15 Maret 2022 dicanangkan sebagai hari anti-Islamofobia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apa respon orang-orang yang selama ini menuding umat Islam sebagai menggunakan politik identitas? “Isu Islamofobia itu merupakan politik identitas baru kadrun,” ujar salah seorang yang tampaknya mengidap islamofobia.

Karena itu wajar belaka apabila sebagian masyarakat memandang bahwa tuduhan politik identitas itu hanya ditujukan kepada umat Islam yang memperjuangkan ajaran agamanya. Nyaris tak terdengar tudingan ‘politik identitas’ yang bernada menyudutkan pihak selain Islam. “Kalau jujur, bukankah orang-orang yang menyerukan nasionalisme itu menggunakan politik identitas? Identitas kebangsaan? Bukankah orang-orang yang menyerukan ‘jangan bawa-bawa Islam ke

politik', bahkan non-Muslim memakai peci datang ke pesantren-pesantren menjelang pemilihan umum, Itu politik identitas? Bukankah tudingan kepada orang lain menggunakan politik identitas merupakan politik identitas yang digunakan oleh si penuduh itu? Bukankah ketika seseorang menuding pihak yang memperjuangkan syariah Islam sebagai menggunakan politik identitas sebenarnya ia sedang menggunakan politik identitas? Ya, identitasnya sekulerisme. Bukankah orang yang teriak-teriak pro wong cilik sedang memainkan politik identitas juga?" Pak Sabili mengungkapkan isi hatinya.

Jangan salahkan siapa-siapa jika tuduhan 'politik identitas' dipahami sebagai upaya untuk menghambat aspirasi Islam dalam persoalan politik dan kenegaraan.

Harus jujur diakui, ada yang menstigma bahwa aspirasi Islam merupakan politik identitas yang merusak tatanan negara. *Wow. Really?* Hal ini mengingatkan saya pada pandangan Chusnul Mariyah pada Juni tahun lalu. "Seolah sumber pembelahan karena Islam. Padahal sebagian besar bangsa Indonesia ini dulu adalah kerajaan-kerajaan Islam dan kesultanan-kesultanan Islam. Namun, saat ini ketika Pemilu ada aspirasi Islam maka seolah-olah distigma sebagai politik identitas yang buruk," ungkap Pakar Politik Universitas Indonesia itu.

"Buruk rupa, cermin dibelah", begitu kata pepatah.

Menarik ungkapan Pak Djauhari kepada saya, "Tuduhan begitu tidak aneh. Wanita berkerudung dibilang memakai pakaian *a la* wanita gurun. Orang mencintai Nabi Muhammad saw. dibilang yang berjuang pada abad 20 itu Nabi Muhammad atau Ir. Soekarno. Remaja milenial bisa berbahasa Arab dan banyak hapalan al-Quran dicap *good looking* radikal. Jadi, tak perlu heran bila orang yang

menyampaikan aspirasi Islam dituding menggunakan politik identitas."

Rupanya stigma atau cap negatif itu merupakan politik pihak-pihak untuk menghambat aspirasi Islam. "Padahal, sebagai Muslim, kita justru harus menunjukkan identitas kemusliman kita. *Isyhaduu bi annaa muslimuun*. Saksikanlah bahwa kita adalah Muslim. Betul tidak?" Pak Sabili merespon.

Saya katakan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah SWT di mana pun kita berada. "*IttaqilLaaha haytsuma kunta*. Bertakwalah kamu kepada Allah dimana pun kamu berada," begitu sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam at-Tirmidzi. "Artinya, kita harus terikat dengan aturan Islam saat kita di masjid, rumah, jalan, kantor, mal, gedung parlemen, istana, dan di mana pun. Kita harus selalu membawa identitas keislaman kita," ucap saya.

Dalam konteks hukum, sikap tegas disampaikan oleh Chandra Purnama Irawan. Ketua Umum LBH Pelita Umat tersebut mengungkapkan (16/7/2022): "Tidak ada yang salah dengan politik identitas selama disampaikan secara damai, intelektual, adu gagasan, dialektika, tanpa kekerasan dan tanpa pemaksaan."

Ia menambahkan, "Jika politik identitas dilarang, maka hal ini akan menjadi paradoks atau pertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan."

Dengan berpegang pada prinsip *non-derogability*, Chandra menyampaikan, "Menyampaikan ajaran dan konsep kepemimpinan dijamin dan dilindungi konstitusi...Melakukan stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum." *Wallaahu a'lam.* □

ADA APA DENGAN POLITIK IDENTITAS?

Dr. Riyan M.Ag
(Pengamat Politik)

Merebaknya *Politik Identitas, Tantangan Demokrasi*. Demikian salah satu kesimpulan Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Kedepujian Pengkajian Strategik Lemhannas RI dalam Focus Group Discussion (FGD). FGD tersebut berisi tentang kajian strategik jangka panjang dengan judul, “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia”. Diselenggarakan pada Rabu (03/03/21).

“Kehidupan bangsa Indonesia menghadapi *tantangan*. Salah satunya adalah merebaknya politik identitas,” kata Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. Politik identitas yang merebak adalah adanya sikap yang mengedepankan golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik.

Reni menyampaikan bahwa pada dasarnya politik identitas merupakan suatu dinamika di dalam demokrasi karena aspirasi politik terlembaga ke dalam kelompok-kelompok baik partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terafiliasi dengan identitas tertentu. Namun, hendaknya identitas yang dibawa ke dalam politik tersebut

diperankan secara beretika dan bermoral serta tidak melampaui batas yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan bangsa. (<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1006-politik-identitas-tantangan-demokrasi-indonesia>).

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap para pelaku politik identitas kerap menjadi *akar masalah* munculnya persoalan-persoalan rasialisme di Indonesia. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab mengatakan pelaku kasus rasial biasanya kerap menafikan keberadaan multikulturalisme identitas. Di antara mereka, umumnya adalah pihak yang ingin menjalankan politik identitas. “Orang-orang yang ingin menjalankan politik identitas yang merasa ada ketunggalan dalam identitas, selalu ingin memaksakan satu cara berpikir bahwa identitas itu tunggal,” ujar Amir dalam diskusi daring, Kamis (11/2/21) (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211204833-20-605508/komnas-ham-sebut-politik-identitas-jadi-sumber-kasus-rasial>).

Dalam perspektif Endang Sari, dosen ilmu politik FISIP Universitas Hasanuddin, dalam *“Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta”* (2016), identitas agama Islam sukses menjadi *alat politik* dalam kontestasi tersebut. “Politik identitas khususnya agama memang tidak pernah mati dalam arena politik di negeri ini. Momentum pemilihan Gubernur Jakarta yang baru saja usai adalah contoh nyata bagi pembenaran argumentasi tersebut. Ketika identitas agama, muncul menjadi sebuah kekuatan politik.”

Anies Baswedan berhasil mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Posisi Anies saat itu didukung oleh sebagian besar kelompok Islam, seperti Front Pembela Islam dan Majelis Ulama Indonesia. BTP yang beragama Kristen dan berasal dari etnis Tionghoa-Indonesia berada dalam posisi tak menguntungkan. Selain karena tuduhan penistaan agama, kelompok Anies turut memakai isu bahwa umat Islam harus memilih pemimpin dari agama yang sama (<https://tirto.id/politik-identitas-tetap-buas-masyarakat-bawah-kena-imbas-emEE>).

Berbagai peristiwa di atas menggambarkan bahwa ada perbedaan perspektif dalam melihat keberadaan makna politik identitas. Ada yang menganggap bahwa politik identitas adalah tantangan bagi keberlangsungan demokrasi. Ada yang berpandangan bahwa politik identitas adalah akar masalah rasialisme. Ada juga yang memposisikan politik identitas sebagai alat politik dalam kontestasi Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Apa Itu Politik Identitas?

Menurut Fitri Ramdhani Harahap (2014), dalam *“Politik Identitas Berbasis Agama”*, pengertian identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan politik identitas (*politics of identity*). Identitas politik

merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik/ Sebaliknya, pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.

Acuan literatur politik maupun sosiologi mengkategorisasikan identitas dalam dua kategori, yakni: *identitas sosial* (agama, kelas, ras, etnis, gender dan seksualitas) dan *identitas politik* (nasionalitas dan kewarganegaraan/ *citizenship*).

Identitas sosial menentukan posisi individu di dalam relasi atau interaksi sosialnya. Identitas politik menentukan posisi individu di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu perbedaan (*sense of otherness*). Karena identitas juga menyangkut apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, maka konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai “perbedaan” (*difference*).

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Donald L Morowitz (1998) dalam Haboddin (2012), pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat diubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta-merta tampak bersifat permanen. Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama. Menurut keduanya, politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi

Politik Internasional di selenggarakan di Wina pada 1994.

Menurut peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Ubed Abdillah, politik identitas merupakan perlawanan terhadap semangat pluralisme yang menentang penyeragaman dalam narasi modernisme. Namun, politik identitas (termasuk etnis) ini tidak berjalan baik. Dalam bukunya yang berjudul *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas (2002)*, Ubed mengutip catatan peneliti asal Hungaria, Agnes Heller. "Politik perbedaan menjadi satu nama baru dari politik identitas; rasisme (*race thinking*), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk intoleransi, praktik-praktik kekerasan pun muncul."

Syafii Maarif dalam buku *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (2012)*, menyatakan bahwa L.A. Kauffman yang pertama kali menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an. Siapa sebenarnya yang menciptakan istilah *politik identitas* itu pertama kali masih kabur sampai hari ini.

Secara substantif, menurut Maarif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas (ditindas, *pen.*) dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di sinilah ide tentang keadilan untuk semua menjadi sangat relevan.

Di Amerika Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasan (penindasan, *pen.*)-lah yang membangun kesadaran golongan yang diperas (ditindas, *pen.*), khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol,

dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak pada pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu.

Menurut Cressida Heyes, dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Harahap, 2014), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender atau keagamaan. Sebuah gerakan yang berlandaskan identitas dapat disebut sebagai politik identitas. Namun, dalam pengertian teori sosial dan politik, politik identitas memiliki makna yang lebih spesifik ketimbang pengertian yang luas.

Menurut Heyes, politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoretik menemukan *pengalaman-pengalaman ketidakadilan* yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari 'kaum yang terpinggirkan' dalam kondisi sosial, politik dan kultural tertentu dalam masyarakat. Dalam perjuangan politik, penggunaan identitas memberikan hasil positif yang berpengaruh secara signifikan.

Sampai titik ini, pengertian politik identitas cenderung bermakna positif. Substansinya politik identitas dilatarbelakangi oleh semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, baik perilaku maupun struktur sistem yang tidak adil.

Sebaliknya, sebagian ahli yang lain tidak mendukung konsep politik identitas dan memandang dengan kecenderungan negatif. Francis Fukuyama, ilmuwan politik Universitas Stanford Amerika Serikat, misalnya, dalam *"Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (2018)"*, (*Identitas: Tuntutan Martabat dan Politik Kebencian*), menyebut bahwa politik identitas sebagai salah satu "ancaman utama" yang dihadapi

demokrasi liberal, yang mengalihkan energi dan pemikiran dari masalah yang lebih besar, seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi.

Membajak Politik Identitas

Secara konsep, dari berbagai kajian literatur di atas, politik identitas tampak netral. Bahkan cenderung positif, karena substansinya adalah perlawanan terhadap berbagai penindasan dan ketidakadilan dalam satu tatanan struktur politik tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, ada berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Apalagi ketika mereka menganggap telah terjadi penguatan politik identitas, terutama dengan basis agama (baca: Islam). Banyak pihak (terutama elit politik sekuler) menggunakan isu politik identitas ini untuk menolak fenomena penguatan tersebut. Sebenarnya, mereka inilah yang membuat makna politik identitas bergeser menjadi cenderung negatif. Sayangnya, banyak di antara mereka ini mengaku sebagai Muslim, tetapi malah menolak ketika Islam dijadikan asas, identitas dan tatanan yang mengatur kehidupan bermasyarakat secara komprehensif.

Karena itu dari sisi praktik, elit politik yang memanfaatkan isu politik identitas sebagai “label atau stempel negatif” harus dikritisi. *Pertama, para elite politik senantiasa bersikap ambigu dan memberlakukan standar ganda.* Pada pelaku pembajakan politik identitas ini, jika faktanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, maka tidak digunakan isu identitas. Namun, jika fakta yang dihadapi tidak sesuai dengan harapannya, maka digunakanlah isu identitas.

Peristiwa Pilkada 2017 DKI Jakarta menjadi gambaran ketika para pendukung sekulerisme mendapati “jagoan”-nya (BTP, *pen.*) kalah. Lalu muncullah isu buruknya politik identitas.

Namun, ketika pendukung sekulerisme mendapati Victor Laiskodat (VL) menista agama. Mereka membela mati-matian. Tidak muncul isu buruknya politik identitas. Saat VL

menang dalam Pilgub NTT, dengan mengusung isu penistaan agama Islam, hal itu tidak dipermasalahkan oleh pendukungnya. Bahkan ketika dia melegalisasi minuman keras di wilayah propinsinya.

Kedua, para elit politik menyerang simbol-simbol Islam. Namun, untuk kepentingan politiknya, mereka sering menggunakan simbol Islam. Para elit politik yang menggunakan isu buruknya politik identitas ini sering menyerang simbol-simbol ajaran Islam dan memposisikan syariah Islam secara negatif. Sikap terbaru terkait dengan politik identitas adalah terkait penutupan bar Holywings dengan iklan provokatif yang menawarkan minuman keras gratis kepada mereka yang namanya Muhammad. Hal ini belum termasuk identitas fisik seperti jenggot, celana cingkrang, cadar dan isu pembakaran bendera tauhid.

Ironisnya, menjelang Pemilu, para elit politik malah memobilisasi simbol-simbol Islam agar seolah-olah mereka tampak “islami” agar dipilih. Padahal programnya justru tidak ada yang terhubung dengan pelaksanaan syariah Islam. Bahkan perilaku politik elit ini senantiasa dinisbatkan dengan pemimpin dalam Islam (khalifah, khususnya Khulafaur Rasyidin). Padahal elit tersebut bahkan menolak tegaknya sistem islam (khilafah). Inilah sebagian contoh yang terkait dengan manipulasi simbol-simbol Islam demi pencitraan. Anehnya, ketika mereka melakukan hal itu tidak pernah terdengar isu buruknya politik identitas.

Ketiga, isu politik identitas cenderung digunakan untuk menyerang Islam dan kaum Muslim. Isu buruknya politik identitas ini diarahkan untuk menyerang Islam dan kaum Muslim. Jarang, untuk tidak mengatakan tidak ada, hal ini terkait dengan non-Muslim. Misal, terkait penutupan tempat maksiat menjelang bulan Ramadhan; penutupan tempat ibadah ilegal; menolak keberadaan pelaku LGBT;

menolak pernikahan berbeda agama, fatwa MUI tentang haramnya sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme, bahkan “perda syariah” dianggap sebagai penguatan adanya keburukan politik identitas. Demikian pula dukungan umat agar Pemerintah bersikap tegas melarang Ahmadiyah dan Syiah, sikap umat menolak Perppu Ormas yang berujung pada pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI dan pembubaran FPI, sikap umat menolak rencana polri untuk mengawasi masjid dan pendataan pesantren yang dianggap radikal oleh BNPT, sikap umat mengutuk pembunuhan 6 orang laskar oleh aparat, hingga monsterisasi dan kriminalisasi ide khilafah dan pengaitannya dengan aksi terorisme.

Semua ini menjadi sangat terang bahwa “para pembajak” isu politik identitas mengarahkan serangannya pada Islam dan kaum Muslim. Lebih ironisnya lagi, “pelaku pembajakan” ini tidak hanya elit politik secara individu atau kelompok (ormas atau partai politik), tetapi juga oleh negara.

Dari sini kita bisa melihat serangan para elit ini terkait buruknya politik identitas ini terjadi dalam setidaknya tiga jenis: (1) serangan berupa kekerasan fisik, berupa pembunuhan; (2) serangan berupa kekerasan simbolik, yaitu simbol-simbol Islam; (3) serangan struktural, melalui berbagai kebijakan yang justru berusaha menghalangi penerapan aturan Islam dan khilafah.

Kepentingan di Balik Tudingan

Setidaknya ada dua kepentingan di balik tudingan politik identitas: *Pertama, pengokohan ideologi kapitalisme-sekuler.* Mengapa? Karena para elit politik ini mendapatkan keuntungan dengan beroperasinya sistem bobrok ini. Mereka mendapatkan keuntungan dari sistem sekuler seperti pungutan pajak yang mencekik rakyat, kenaikan BBM, rente (bunga) dari hutang luar

negeri, legalisasi impor dan bisnis miras, penghalalan riba (bunga, interest), hingga penguasaan sumberdaya alam. Karena itu setiap upaya serius dari pejuang Islam melalui dakwah, kritik dan amar makruf nahi mungkar untuk menghentikan beroperasinya sistem sekuler-kapitalistik yang bobrok ini pasti akan dihalangi, di antaranya melalui isu politik identitas, sekaligus dilumpuhkan dengan berbagai cara. Berbagai kebijakan yang berpotensi menyengsarakan dan merugikan rakyat pun tetap dijalankan. Di antaranya seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, UU IKN, UU TPKS, dll.

Kedua, pembiaran praktik politik pragmatis: kampanye hitam terhadap lawan politik. Dalam konteks yang lebih praktis, isu politik identitas ini dipakai untuk melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap lawan politik. Kampanye hitam dibedakan dengan kampanye negatif. Kampanye hitam terkait dengan menyerang lawan politik dengan kebohongan (*hoax*), bukan fakta (*fact*). Kampanye negatif menyerang lawan politik dengan fakta kelemahan dari ide atau kebijakan yang dilakukan.

Lawan politik yang dimaksud, terdiri dua macam. *Pertama*, lawan politik (elite dan parpol lain) yang ada di arena kompetisi politik yang langsung bertarung dalam kompetisi pilkada, pilpres dan pileg. *Kedua*, lawan politik yang merupakan bagian dari umat dan merupakan kekuatan politik yang dianggap lawan secara ideologis. Tudingan isu politik identitas ini mencakup kedua lawan politik sehingga menghasilkan berbagai polarisasi di tengah masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Inilah yang kemudian membuat masyarakat dan rakyat terbelah (*divided*). Pada akhirnya, oligarki kekuasaan sekulerlah yang diuntungkan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. □



IDENTITAS POLITIK ISLAM

Dr. Muhammad K. Shadiq

Para politisi kini mulai sibuk mempersiapkan diri dan kelompoknya menuju pertarungan politik: Pilpres 2024. Semua berlomba untuk mendapat simpati dari masyarakat. Mereka berburu untuk mendapat predikat sebagai sosok yang dianggap peduli rakyat, hidup sederhana dan religius.

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, para politisi tentu ingin mendapatkan citra sebagai orang yang shalih, bertakwa dan peduli Islam. Karena itu kini mulai ramai di berbagai media postingan berita terkait aktivitas mereka itu. Ada yang mulai rajin mengunjungi pesantren sambil ikut pengajian dan menyalurkan infak. Lengkap dengan asesoris keislaman seperti peci, sarung, sorban dan kerudung.

Berbagai asesoris keislaman tersebut merupakan alat pembangun citra dan identitas. Tentu tujuannya agar masyarakat tertarik untuk memilih dia atau minimal memuji dirinya. Bahkan sebagian mereka menyewa tim buzzer untuk kepentingan pencitraannya. Padahal asesoris dan buzzer politik itu sangat

berpotensi digunakan untuk menghipnotis hingga menipu masyarakat.

Bahaya Politisasi Agama

Menjadikan asesoris keislaman sebagai alat pencitraan tersebut merupakan wujud nyata dari politisasi agama (Islam). Penggunaan simbol-simbol agama seperti itu sudah dapat dikategorikan sebagai memperlakukakan agama. Tentu hal tersebut merupakan kejahatan serius karena menjadikan agama sekadar alat untuk meraih kekuasaan.

Konsekuensinya, politisasi agama akan melahirkan politisi dengan identitas semu. Politisi yang sebenarnya penjahat bisa dicitrakan menjadi pahlawan. Politisi yang mengidap islamophobia dipakaikan asesoris hingga menjadi sosok yang seolah peduli umat Islam. Politisasi agama akan selalu mengarah pada berbagai bentuk manipulasi demi meraih berbagai keuntungan politik.

Karena itu politisasi agama merupakan cara kotor yang digunakan untuk mengelabui masyarakat demi meraih kekuasaan. Hal itu mirip dengan apa yang digambarkan oleh

Henry J. Schmandt (2012) dalam bukunya. *A History of Political Philosophy*. Buku ini berisi kajian historis dari zaman Yunani kuno sampai zaman demokrasi saat ini. Dalam buku itu politik digambarkan sebagai bentuk pertarungan perebutan kekuasaan. Berbagai sarana digunakan, termasuk pula dengan cara mengelabui masyarakat melalui propaganda dan pencitraan.

Manipulasi dalam perpolitikan di Indonesia pernah menjadi sorotan publik dunia. Hal itu diinisiasi oleh rilis riset Bradshaw dan Howard dari Universitas Oxford Inggris yang berjudul, “*The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*”. Riset tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi satu dari 70 negara yang menggunakan pasukan buzzer dalam memanipulasi politik.

Sejumlah pihak di Indonesia diidentifikasi telah menggunakan buzzer tersebut, yakni politisi, partai politik dan kalangan swasta. Disebutkan juga dalam riset itu bahwa para buzzer itu bertugas menyebarkan propaganda pro-Pemerintah atau pro-partai, menyerang oposisi, hingga membentuk polarisasi publik. Parahnya, para buzzer tersebut menggunakan berbagai sarana untuk memanipulasi data dan informasi.

Sikap politisi yang bertumpu pada citra dan identitas semu itu sebenarnya penyakit klasik yang menjangkiti banyak orang sejak dulu. Sebabnya, politik demokrasi yang bertumpu pada teori Machiavelli memang hanya terfokus pada upaya perebutan kekuasaan. Karena itu metode dan sarana apapun akan digunakan untuk meraih kekuasaan tersebut, termasuk berbagai intrik dan manipulasi.

Praktik kekuasaan ala Machiavelli yang dituangkan dalam karyanya *The Prince* dan *The Discourses* itu memang sangat terasa pada dinamika politik selama ini. Keberadaan para buzzer itu tentu termasuk

yang dipicu oleh teori Machiavelli tersebut; bahwa politisi yang mempunyai senjata yang akan menang. Tidak ada senjata yang lebih ampuh saat ini ketimbang media massa dan media sosial.

Para buzzer politik melalui berbagai media itu bertugas mempropagandakan politisi yang menjadi tuannya. Pada era teknologi digital 4.0 sekarang ini para buzzer sangat mudah menghipnotis masyarakat. Akibatnya, politisi yang sebenarnya penjahat justru bisa dicitrakan sebagai pahlawan. Para politisi akhirnya menjelma menjadi makhluk bermuka dua yang pandai berdusta.

Umat Muslim sudah seharusnya mewaspadaai berbagai manipulasi dari politik citra dan identitas semu semacam itu. Tentu agar umat tidak menjadi korban dari berbagai manuver politik mereka. Umat Islam sudah semestinya menjadi subyek, bukan lagi obyek, dalam berbagai aktivitas politik di negeri ini.

Islamisasi Politik

Secara makna, politisasi agama (Islam) sangat berbeda dengan islamisasi politik. Islamisasi politik lebih bermakna penyandaran aktivitas politik pada ajaran Islam. Artinya, menjadikan politik berbasis Islam, diatur berdasarkan Islam dan untuk kepentingan Islam. Perjuangan menegakkan ajaran Islam secara *kaffah* merupakan realitas dari identitas politik Islam. Dengan demikian bagi umat Muslim, islamisasi politik itu tidak sekadar perlu, bahkan wajib untuk dilakukan.

Secara faktual Islam dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Politik merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam yang didasarkan pada akidah Islam. Politik Islam ditujukan untuk melaksanakan Islam di dalam negeri dan mendakwahkan Islam ke luar negeri. Politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan umat berdasarkan kebenaran dan keadilan Islam.



Akidah Islamlah yang mendorong umat Muslim memiliki perhatian terhadap dunia, menyebarkan petunjuk dan mengatur dunia dengan hukum-hukum syariah. Inilah konsep politik yang sesungguhnya, yakni mengatur seluruh urusan manusia dengan syariah Islam. Syariah Islam hakikatnya merupakan aturan dan hukum untuk memberikan solusi terbaik terhadap seluruh aspek kehidupan manusia.

Sebaliknya, sekularisme pada dasarnya berupaya memisahkan agama (Islam) dari kehidupan public, yakni negara (*fashl ad-dîn 'an ad-dawlah*). Ide ini sebenarnya berakar dari peradaban Barat-Kristen yang memisahkan agama (Kristen) dari negara. Hal ini tentu tidak sesuai dengan realita syariah Islam. Sebabnya, Islam bersifat menyeluruh (*syumûliyah*) yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk negara.

Memang syariah Islam yang terkait pengaturan manusia dengan Tuhannya dan

dirinya sendiri bisa dilaksanakan oleh individu. Namun, syariah yang terkait pengaturan hubungan manusia dengan sesamanya, muamalat dan *'uqûbat* (sanksi hukum), sebagian besar justru harus dilaksanakan oleh negara. Tentu sebuah kesalahan besar ketika Islam dipisahkan dari politik dan negara.

Islam telah menjadikan politik (*siyâsah*) sebagai sarana mewujudkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Politik bagi umat Islam merupakan bagian dari aktivitas dakwah. Modal utamanya adalah kebenaran (*al-haq*) yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, bukan asesoris dan manipulasi. Di antaranya bisa berupa perjuangan politik (*al-kifâh as-siyâsi*). Seperti mengkritik penguasa ketika kebijakannya bertentangan dengan syariah. Prosesnya dilakukan secara argumentatif dan edukatif. Misalnya, syariah didakwahkan dan ditawarkan sebagai solusi atas berbagai problem yang membelit negeri ini. Mulai dari problem akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, keamanan, hingga problem politik. Pada sisi inilah aktivitas dakwah yang menyerukan penerapan Islam secara *kâffah* itu menjadi sangat urgen, sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian umat Islam pada negeri ini.

Karena itu identitas politik umat Islam yang memperjuangkan penegakan syariah secara *kâffah* itu bersifat mulia dan terhormat. Tidak seperti aktivitas para elit politik yang bermodalkan citra dan asesoris demi kepentingan diri dan kelompoknya semata. Sebabnya, ujung perjuangan politik bagi umat Islam bukanlah harta dan tahta, melainkan meraih ridha dan rahmat Allah SWT dengan menegakkan syariah-Nya secara *kâffah*.

Wujud Islam Politik

Islamisasi politik merupakan sarana bagi umat Muslim untuk melakukan perubahan ke arah Islam. Hanya saja, segala perubahan yang dilakukan oleh umat Muslim itu haruslah

Karena itu identitas politik umat Islam yang memperjuangkan penegakan syariah secara *kâffah* itu bersifat mulia dan terhormat. Tidak seperti aktivitas para elit politik yang bermodalkan citra dan asesoris demi kepentingan diri dan kelompoknya semata. Sebabnya, ujung perjuangan politik bagi umat Islam bukanlah harta dan tahta, melainkan meraih ridha dan rahmat Allah SWT dengan menegakkan syariah-Nya secara *kâffah*.

mengacu pada metode (*tharîqah*) yang shahih, yakni metode perubahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Bagi umat Muslim, hanya Rasulullah saw. sajalah yang patut dijadikan teladan dalam segala hal, termasuk dalam hal perjuangan mewujudkan perubahan tersebut. Rasulullah saw. telah membina para kader dakwah yang disiapkan menjadi tulang punggung perubahan. Metode yang digunakan Rasulullah saw, untuk mengubah kondisi masyarakat jahiliah yang rusak adalah melalui dakwah. Aktivitas dakwah yang dilakukan beliau tersebut berupa aktivitas yang terorganisasi secara rapi. Misalnya, beliau tidak hanya mengajak mereka memeluk agama Islam dan mengajarkan al-Quran. Beliau juga menghimpun mereka dalam satu kelompok (*kutlah*) dakwah yang dibina dan dikontrol oleh beliau.

Wujud perubahan politik yang dilakukan Rasulullah saw. adalah perubahan rezim dan system sekaligus. Hal tersebut terlihat dengan jelas pada dakwah Rasulullah saw. yang tidak sekadar mengajak orang kafir memeluk Islam. Namun, juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Islam, yakni dengan mengganti sistem jahiliah menjadi sistem Islam. Terbukti pasca hijrah, Rasulullah saw. dan para Sahabat mendirikan masyarakat Islam dalam institusi politik Daulah Islamiyah di Madinah. Dari sanalah kemudian cahaya Islam itu dipancarkan menembus benua Asia, Afrika hingga Eropa.

Melalui institusi Daulah itulah Rasulullah saw. sebagai kepala negara mampu menerapkan hukum-hukum Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Rasulullah saw. berhasil mengganti sistem dan tatanan jahiliah dengan sistem Islam.

Dengan demikian seperti itulah semestinya umat Muslim mewujudkan Islam politik, yakni melakukan perubahan yang diarahkan pada upaya membangun institusi politik Daulah

Perlu dicatat, selama 13 abad peradaban Islam dalam institusi Khilafah itu telah terbukti menjadi payung yang mencerdaskan dan mensejahterakan umat manusia di dunia. Khilafah telah menjadi kunci kegemilangan peradaban Islam. Sebuah peradaban yang telah ditulis dengan tinta emas dalam perjalanan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat berhasil mencapai titik gemilang ketika peradaban Islam dulu tegak di muka bumi.

Khilafah Islamiyah. Melalui institusi Khilafah itulah akan terwujud kembali masyarakat Islam yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam (*syariah*) secara *kâffah*.

Perlu dicatat, selama 13 abad peradaban Islam dalam institusi Khilafah itu telah terbukti menjadi payung yang mencerdaskan dan mensejahterakan umat manusia di dunia. Khilafah telah menjadi kunci kegemilangan peradaban Islam. Sebuah peradaban yang telah ditulis dengan tinta emas dalam perjalanan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat berhasil mencapai titik gemilang ketika peradaban Islam dulu tegak di muka bumi.

Para sejarawan Barat yang obyektif telah ikut mencatat berbagai kegemilangan pada masa Khilafah tersebut. Misalnya, terkait jaminan keamanan, lapangan kerja, dan pendidikan Will-Durant mengatakan, "*Para khalifah telah berhasil memberikan perlindungan yang ideal*



terhadap kehidupan dan tenaga kerja; senantiasa membuka peluang bagi setiap bakat; menciptakan kemakmuran selama tiga sampai enam abad di wilayah yang dulunya tidak begitu makmur; mendorong dan mendukung perkembangan pendidikan, sastra, sains, filsafat dan seni hingga membuat Asia Barat selama lima abad, menjadi wilayah paling beradab di dunia.” (The Story of Civilization, 4/227).

Berbeda dengan Barat yang berorientasi menjajah, politik luar negeri Khilafah justru dalam rangka mendakwahkan kemuliaan ajaran Islam. Khilafah melindungi semua warga negaranya, termasuk pula yang non-Muslim. Sejarahwan Kristen, Thomas W. Arnold, menulis, *“Perlakuan terhadap warga Kristen oleh Pemerintahan Khilafah Turki Utsmani—selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani—telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.” (The Preaching of Islam: A History of Propagation of the Muslim Faith, 134).*

Kemajuan pendidikan pada masa Khilafah itu bahkan telah menjadi rujukan peradaban lain. Tim Wallace-Murphy menerbitkan buku berjudul, *What Islam Did for Us: Understanding Islam’s Contribution to Western Civilization* (London: Watkins Publishing, 2006). Buku tersebut memaparkan fakta tentang transfer ilmu pengetahuan dari Dunia Islam ke Barat pada abad pertengahan. Disebutkan pula bahwa Barat telah berutang pada Islam dalam hal pendidikan dan sains. Menurut dia, utang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapan pun.

Sejarahwan W.E. Hocking juga turut menjelaskan tentang kegemilangan Khilafah yang telah mempengaruhi kemajuan Eropa. Misalnya, dia mengatakan, *“Sungguh dapat dikatakan bahwa hingga pertengahan abad ketigabelas, Islamlah pembawa segala apa yang*

tumbuh yang dapat dibanggakan oleh dunia Barat (The Spirit of World Politics, hlm. 461). Abad ketigabelas tersebut merupakan abad keemasan Khilafah.

Penutup

Realitas negeri-negeri Muslim saat ini, termasuk Indonesia, berada dalam cengkeraman penjajah. Sebagiannya dijajah secara fisik/ Sebagian lainnya dijajah secara ekonomi dan politik. Dalam rangka melanggengkan hegemoninya itulah negara-negara Barat penjajah tersebut lalu membuat narasi fiktif, yakni narasi yang menggambarkan Islam politik itu seolah sebuah ancaman bagi dunia. Padahal faktanya imperialisme, yang telah menimbulkan kerusakan di dunia itu, justru akibat ulah mereka. Bandingkan dengan peradaban Islam yang selama 13 abad telah memayungi dunia dengan berbagai kemuliaan dan kegemilangannya.

Penyesatan opini yang mereka lakukan itu harus dihadapi oleh umat Islam melalui aktivitas dakwah untuk menjelaskan ajaran Islam. Dengan itu masyarakat akan paham bahwa semua ajaran Islam, termasuk di dalamnya Khilafah, merupakan rahmat dari Allah SWT. Bukan keburukan sebagaimana yang dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam.

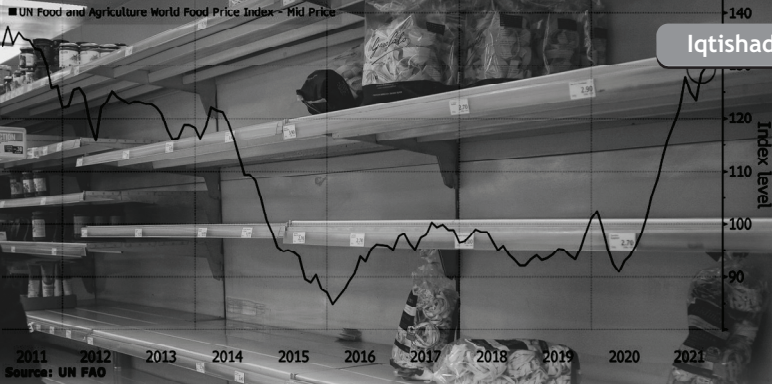
Seiring waktu, identitas politik Islam akan semakin menguat di negeri-negeri Muslim. Itulah identitas yang berupa kesadaran untuk menegakkan kembali syariah Islam secara *kāffah* dalam naungan Khilafah. Jika kesadaran tersebut terus menguat dan meluas maka tentu itu akan menjadi mimpi buruk bagi negara-negara Barat penjajah. Tidak hanya menjadi pertanda berakhirnya imperialisme mereka di negeri Muslim, namun juga menjadi pertanda runtuhnya peradaban kapitalisme-liberalisme di dunia.

Wallāhū 'lam bi ash-shawwaab. □

Expensive Food UN index of global food costs is at the highest in a decade

■ UN Food and Agriculture World Food Price Index - Mkt Price

Iqtishadiyah



KRISIS PANGAN DAN ENERGI

Harga-harga pangan di pasar global mengalami peningkatan tajam dalam enam bulan pertama tahun 2022; seperti gandum, gula, jagung, dan minyak sawit. Gandum, misalnya, pada akhir Desember mencapai 760 dolar AS perbushel (35 liter), lalu meningkat di kisaran 1.000-1.270 dolar AS pada kurun Maret-Juni. Harga energi seperti minyak mentah, gas alam, batubara juga meningkat cukup signifikan. Minyak mentah jenis Brent yang pada akhir Desember mencapai 76 dolar perbareil (159 liter) menanjak pada awal tahun 2022 hingga melampaui 100 dolar perbareil hingga akhir bulan Juni.

Ada berbagai penyebab mengapa harga pangan dan energi tersebut meningkat sangat tajam. Pelonggaran restriksi akibat pandemi COVID-19 telah mendorong bergulirnya kembali kegiatan ekonomi. Hal ini mendorong peningkatan tajam pada berbagai produk, termasuk pangan dan energi. Di sisi lain, kemampuan produsen memasok peningkatan yang cepat tersebut relatif lebih lambat, seperti adanya kendala tenaga kerja yang sepenuhnya kembali pada posisi normal, atau kendala logistik transportasi. Pasokan *palm oil* di Malaysia, misalnya, menurun akibat tenaga kerja asing yang bekerja di perkebunan belum kembali akibat pengetatan arus masuk tenaga kerja selama masa pandemi.

Invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Maret menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya harga berbagai komoditas global. Rusia dikenal sebagai produsen utama minyak dan gas. Negara itu bersama Ukraina juga merupakan produsen utama produk-produk pangan, seperti gandum dan jagung. Perang tersebut menyebabkan terhambatnya ekspor kedua negara itu, terutama Ukraina, akibat blokade yang dilakukan Rusia di Laut Hitam. Sanksi yang dikenakan negara-negara Barat atas Rusia juga menyebabkan pasokan energi ke sejumlah negara, terutama negara-negara Eropa, berkurang.

Peningkatan permintaan global terhadap komoditas pangan dan energi juga telah mendorong para spekulan untuk meningkatkan pembelian komoditas-komoditas tersebut. Para investor global telah meningkatkan investasi mereka pada komoditas primer—seperti minyak mentah, gas, gandum dan metal—sebagai alternatif investasi non-finansial seperti saham, obligasi dan mata uang. Menurut Commodity Futures Trading Commission (CFTC), spekulan adalah pihak yang tidak memproduksi atau menggunakan komoditas tersebut, tetapi mempertaruhkan modalnya sendiri untuk memperdagangkan masa depan komoditas tersebut dengan harapan mendapat untung dari

perubahan harga.¹

Menurut kesaksian spesialis komoditas Michael W. Masters pada tahun 2009 kepada Kongres AS, pasar berjangka minyak secara rutin memperdagangkan lebih dari satu miliar barel minyak perhari. Dengan produksi seluruh dunia sekitar 85 juta barel perhari, lebih dari 90 persen perdagangan melibatkan pertukaran barel “kertas” oleh spekulasi satu sama lain. Akibat spekulasi, harga minyak pada saat itu mencapai \$100 perbarel, melampaui biaya produksinya, yang rata-rata \$11 perbarel. Kesaksian Rex Tillerson, kepala eksekutif ExxonMobil, menyatakan kepada Kongres pada 2011, spekulasi murni menyumbang sebanyak 40 persen dari harga minyak yang tinggi tersebut.² Angka itu tidak berbeda jauh dengan hasil peneliti IMF, Strom and Pescatorim, yang memperkirakan pengaruh spekulasi antara 10-35 persen.³

Krisis pangan yang terjadi pada tahun 2008, yang merupakan kenaikan harga minyak dan beberapa komoditas pangan tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, juga terjadi akibat meningkatnya aksi spekulasi di pasar berjangka. Menurut penelitian Robles dan kawan-kawan (2009), tingginya pertumbuhan harga komoditas tersebut akibat lebih aktifnya para spekulasi di pasar komoditas berjangka, yang melakukan spekulasi jangka pendek, yang membuka dan menutup posisi di waktu yang relatif singkat.⁴

Alhasil, peran spekulator membuat harga komoditas mengalami *bubble* (gelembung) yang jauh dari biaya produksinya dan dapat menaik-turunkan harga-harga komoditas dalam waktu singkat. Di Amerika Serikat, meskipun terdapat lebih 80 riset ilmiah yang membuktikan bahaya spekulasi komoditas, Commodity Futures Trading Commission's (CFTC), lembaga yang mengatur pasar komoditas berjangka di AS, tetap memberikan keleluasaan bagi para spekulasi untuk

mempengaruhi harga komoditas.⁵

Meningkatnya ketidakpastian di sektor finansial telah meningkatkan fluktuasi nilai tukar di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang. Ketika nilai mata uang mereka anjlok, maka harga impor pangan dan energi menjadi semakin mahal. Dengan kata lain, buruknya standar moneter global, yang berbasis mata uang kertas (*fiat money*), telah memperburuk inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas di pasar global.

Dampak Krisis

Harga pangan dan energi yang naik tajam dalam enam bulan terakhir juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan semakin parahnyanya kondisi penduduk miskin. Menurut UNDP, 71 juta orang di negara berkembang telah jatuh ke dalam kemiskinan hanya dalam tiga bulan sebagai akibat langsung dari lonjakan harga pangan dan energi global. Bahkan dampaknya pada tingkat kemiskinan secara drastis lebih cepat daripada guncangan pandemi COVID-19. Analisis terhadap 159 negara berkembang secara global menunjukkan bahwa lonjakan harga komoditas utama memiliki dampak langsung yang sangat parah pada rumah tangga termiskin, yang tersebar di berbagai negara, khususnya di negara-negara Afrika, Timur Tengah dan Asia, seperti Mesir, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Sri Lanka dan Turki.⁶

Kenaikan harga-harga komoditas pangan dan energi juga telah menyebabkan inflasi yang tinggi di berbagai negara. Pada bulan Juni, inflasi di AS telah mencapai 9,1 persen, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Sementara itu, tingkat inflasi di negara-negara di kawasan Euro (Euro Area) mencapai 8,6 persen. Inflasi tertinggi dihadapi oleh Turki dan Argentina yang masing-masing mencapai 79 persen dan 64 persen pada bulan Juni 2022. Celaknya, inflasi yang meningkat tajam tersebut telah

mendorong bank sentral utama untuk mengumumkan pengetatan moneter lebih lanjut, yang mengakibatkan terhambatnya pemulihan ekonomi yang baru pulih dari tekanan akibat pandemi.

Krisis pangan dan energi di sejumlah negara juga telah berubah menjadi krisis politik. Di Sri Lanka, inflasi mencapai 57 persen pada bulan Juni. Rakyat kesulitan mendapatkan bahan bakar. Pemerintah bahkan melarang penjualan bensin dan solar untuk kendaraan yang tidak penting selama dua minggu. Sekolah diliburkan untuk mengurangi permintaan bahan bakar. Berbagai produk-produk esensial, seperti obat-obatan, juga tidak tersedia lantaran Pemerintah tidak memiliki devisa untuk melakukan impor. Kondisi tersebut mendorong protes besar-besaran berbulan-bulan yang berakhir dengan mundurnya Presiden Gotabaya Rajapaksa yang sebelumnya melarikan diri dari negaranya.

Kenaikan harga energi yang sangat tinggi juga telah menyadarkan berbagai negara atas bahaya ketergantungan pasokan impor dari negara-negara lain. Uni Eropa, yang selama ini bergantung pada impor dari Rusia, saat ini menyadari bahwa ketergantungan pada impor energi, khususnya minyak mentah dan gas dari negara itu, telah menyebabkan ambivalensi sikap sejumlah negara-negara Uni Eropa terhadap Rusia yang menyerang Ukraina. Impor energi mencakup 62 persen dari total impor Uni Eropa dari Rusia.⁷

Menyadari bahaya ketergantungan itu, Uni Eropa sepakat untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi Rusia. Di antaranya adalah penghapusan ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia sebelum tahun 2030. Caranya antara lain adalah dengan melakukan impor LNG dari pemasok non-Rusia dan mengurangi lebih cepat ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan.⁸

Tingginya risiko ketergantungan energi impor dari negara lain termasuk dari Rusia, juga telah mendorong Pemerintah Jepang, di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida, mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklirnya yang sebelumnya dinonaktifkan setelah terjadi kebocoran reaktor nuklir Fukushima akibat gempa pada tahun 2011 silam.⁹

Sebelum bencana itu, rasio pembangkit tenaga nuklir terhadap total produksi listrik mencapai 30 persen, dan pada tahun 2021 turun menjadi 6 persen. Sumber energi fosil menyumbang 72 persen, sementara sisanya berasal dari energi terbarukan.

Urgensi Persatuan

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh harga komoditas energi dan pangan juga semestinya menyadarkan negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Pasalnya, merekalah yang paling banyak terdampak setiap kali terjadi krisis pangan dan energi. Tanpa ada perubahan fundamental, dampak buruk dari krisis yang dipicu kebijakan negara-negara Barat tersebut akan terus menimpa mereka.

Kesatuan umat Islam dalam satu negara, yaitu Khilafah Islam, menjadi solusi yang paling efektif untuk mengatasi krisis pangan dan energi global. Dengan sistem tersebut, kerjasama di antara negeri-negeri Muslim akan lebih mudah untuk saling mendukung di dalam pemenuhan kebutuhan kebutuhan barang-barang yang esensial dan strategis.

Dengan penerapan sistem Islam di negeri-negeri Islam, sumber-sumber energi seperti batubara, minyak mentah, dan gas akan sepenuhnya dikelola oleh negara. Pihak swasta hanya dimanfaatkan jasanya saja jika dibutuhkan Negara Islam melalui mekanisme konsep sewa (*ijaarah*). Kemudian, negeri-negeri yang memiliki surplus akan dikirim ke negeri yang memiliki defisit pasokan, di samping dijual ke negara lain untuk mendapatkan devisa

untuk mengimpor barang-barang yang belum mampu diproduksi negara Islam atau mengimpor jasa tenaga ahli untuk mengembangkan industri dalam negeri.

Dengan penerapan sistem Islam yang dijalankan oleh Khilafah, konsep liberalisme energi, yang menyerahkan pengelolaan energi ke pihak swasta, tidak akan diberlakukan. Produksi migas dan batubara di Indonesia, misalnya, yang saat ini didominasi oleh swasta, akan sepenuhnya dikelola oleh negara sehingga pendapatan untuk negara menjadi lebih optimal. Eksploitasinya juga akan diatur sehingga tidak menyebabkan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama yang berada di sentra-sentra produksi.

Penerapan syariah Islam oleh Khilafah juga akan menghentikan liberalisasi di sektor pangan. Kemudahan impor pangan, seperti yang tertuang pada UU Omnibus Law Cipta Kerja saat ini, akan ditinjau ulang. Indonesia, contohnya, akan mengoptimalkan produksi dalam negeri dengan memberdayakan pengelolaan tanah-tanah pertanian dan tanah-tanah menganggur, yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang paling mutakhir. Dengan produksi pangan yang melimpah, bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan penduduk negeri ini yang terus meningkat tetapi dapat diekspor ke negeri-negeri yang mengalami kekurangan pangan, yang didasarkan pada kepentingan dakwah dan kemanusiaan, selain yang diekspor untuk mendapatkan devisa untuk mewujudkan negara industri yang tangguh.

Keanggotaan Indonesia pada WTO yang sarat kepentingan negara-negara maju serta menyebabkan kebijakan perdagangan Indonesia dan negeri-negeri Muslim tidak independen juga akan diakhiri. Persatuan tersebut juga akan memudahkan pengendalian harga komoditas di level global sehingga tidak lagi dikontrol oleh

para spekulator di pasar berjangka. Pasar komoditas berjangka, yang memperjualbelikan barang tanpa adanya serah terima barang dan atau menjual barang yang belum dimiliki, ilegal dalam perspektif Islam. Alhasil, dengan penerapan syariah Islam dan penyatuan negeri-negeri Muslim dalam wadah Khilafah Islam, krisis pangan dan energi yang terjadi saat ini akan lebih mudah diatasi, sekaligus mampu menyelamatkan jutaan umat manusia yang menderita akibat krisis yang lahir dari sistem kapitalisme yang mendominasi dunia ini.

Wallaahu a'lam bi ash-shawwaab. [Muis]

Catatan kaki:

- ¹ The role of market speculation in rising oil and gas prices: a need to put the cop back on the beat. <https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/SenatePrint10965MarketSpecReportFINAL.pdf>
- ² Joseph P. Kennedy, "The High Cost of Gambling on Oil," *The New York Times* (The New York Times, April 11, 2012), <https://www.nytimes.com/2012/04/11/opinion/ban-pure-speculators-of-oil-futures.html>.
- ³ Beidas-Strom, Samya, and Mr Andrea Pescatori. *Oil price volatility and the role of speculation*. International Monetary Fund, 2014.
- ⁴ Robles, Miguel, Maximo Torero, and Joachim Von Braun. *When speculation matters*. No. 592-2016-39916. 2009.
- ⁵ Markus Henn. Evidence on the Negative Impact of Commodity Speculation by Scientists, Analysts and Public Institutions. 19 September 2011. https://bettermarkets.org/sites/default/files/Markus%20Henn_0.pdf
- ⁶ "Addressing the Cost-of-Living Crisis in Developing Countries: Poverty and Vulnerability Projections and Policy Responses: United Nations Development Programme," UNDP, accessed July 18, 2022, <https://www.undp.org/publications/addressing-cost-living-crisis-developing-countries-poverty-and-vulnerability-projections-and-policy-responses>.
- ⁷ "In Focus: Reducing the EU's Dependence on Imported Fossil Fuels," European Commission - European Commission, July 5, 2022, https://ec.europa.eu/info/news/focus-reducing-eus-dependence-imported-fossil-fuels-2022-avr-20_en.
- ⁸ European Commission, "REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy," EUR, accessed July 18, 2022, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A108%3AFIN>.
- ⁹ No Author. "Japan to Move Forward with Nuclear Restarts and Include Strict Examinations," *The Japan Times*, June 7, 2022, <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/06/06/national/nuclear-restarts-strict-examinations/>.

Kalimat *ahsanu 'amal[an]* (terbaik amalnya) menunjukkan bentuk *tafdhil* (pengutamaan). Maknanya, sebagaimana dijelaskan Al-Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni (w. 1442 H) dalam *Shafwat at-Tafâsîr* (II/168), yakni:

أطوع لله وأحسن عملاً لآخرته

Siapa yang paling taat kepada Allah dan paling baik amal untuk akhirlatnya.

Kualitas amal ini tentu ditopang oleh kekuatan iman, ilmu, amal dan bahkan kekuatan fisik. Setali tiga uang dengan pujian agung Rasulullah saw. bagi orang beriman yang kuat, beliau bersabda:

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah 'Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Jika engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, "Andai aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu." Akan tetapi, katakanlah, "Ini telah ditakdirkan Allâh dan Allâh berbuat apa saja yang Dia kehendaki." Sebabnya, ucapan 'seandainya' akan membuka (pintu) perbuatan setan (HR Muslim)

Sifat kekuatan dalam hadis ini tidak terbatas pada kekuatan fisik (*quwwat al-jism*), tapi

MUKMIN BERJIWA PEJUANG, BERVISI PEMENANG

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Quran dan Hadis Nabawi)



rang-orang juara berjiwa pejuang dan bervisi pemenang. Ia tidak kenal lelah. *Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai.* Itulah yang ditunjukkan Rasulullah saw. tatkala beliau berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Beliau mempersembahkan apa yang terbaik bisa dilakukan untuk agama-Nya. Perhiasan kehidupan dunia adalah ujian dan batu loncatan bagi mereka yang terpilih mempersembahkan amal terbaiknya:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

Sungguh Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan dunia agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya (QS al-Kahfi [18]: 7).

mencakup kekuatan iman (*quwwat al-’imân*), ilmu (*quwwat al-’ilm*), dan jiwa (*quwwat al-nafs*). Al-Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Min Kunûz as-Sunnah* (hlm. 42), menguraikan: “Lafal *al-qawiy* di sini maksudnya bukan sekadar kekuatan fisik, karena sebenarnya ia ada dengan makna umum; mencakup segala bentuk kekuatan, mencakup kekuatan tubuh, kekuatan jiwa, kekuatan ilmu dan kekuatan iman.”

Menariknya, hadis yang datang dalam bentuk informasi ini (*uslûb khabari ibtidâ’î*) menggambarkan besarnya kedudukan seorang Mukmin yang unggul. Unggul dari aspek kekuatannya. Ini berfaedah mendorong untuk menguatkan perhatian meraih berbagai potensi kekuatan, yakni kekuatan yang tak bisa dilepaskan dari keimanan itu sendiri, relevan dengan lafal *al-qawiy* yang menjadi sifat dari *al-mu’min* (*ism al-fâ’il* bermakna orang yang beriman). Keimanan adalah kebaikan. Bahkan seorang *mu’min* yang lemah pada prinsipnya padanya ada kebaikan. Karena itu Rasulullah saw. mengatakan “*wa fii kull[in] kyayr[un]*” (*kull[in]* dengan *tanwîn ‘iwadh*), yang hakikatnya bermakna: “*Pada Mukmin yang kuat terdapat kebaikan, dan pada Mukmin yang lemah juga terdapat kebaikan.*”

Namun, *Mukmin* yang kuat jelas lebih baik (*khayr*) dan lebih Allah cintai daripada *Mukmin* yang lemah dalam hal kebbaikannya. Kebaikan apa yang dimaksud? Dalam hadis lainnya Rasulullah saw. bersabda:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

Sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Setiap urusannya baik. Hal ini tak terjadi kecuali pada orang beriman. Jika

meraih kebahagiaan, ia bersyukur. Itu adalah kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar. Itu pun kebaikan baginya (HR Muslim dan ath-Thabarani).

Mensyukuri dan mengoptimalkan berbagai potensi kekuatan untuk meraih kemenangan dakwah adalah bagian dari tanda-tanda kebaikan iman seseorang, sebagaimana ia pun bersabar menghadapi ujian dalam dakwah *bi tawfiqilLâh*. Bukankah perintah agung Rasulullah saw. ini mendorong untuk mengoptimalkan apa yang berfaedah untuk dakwah?

إِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزُ

Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah.”

Maknanya adalah memperhatikan hal-hal bermanfaat menurut syariah, disertai dengan sifat *tawadhu’*, menyadari kelemahan diri, senantiasa memohon pertolongan agar senantiasa kokoh menghadapi ujian, dan memohon bimbingan-Nya agar teguh di atas jalan kebenaran. Benarlah senandung seorang penyair:

إِذَا لَمْ يُعِينِكَ اللَّهُ فِيمَا تُرِيدُهُ* فَلَيْسَ لِمَخْلُوقٍ إِلَيْهِ

سَبِيلٌ

وَإِنْ هُوَ لَمْ يُرْشِدْكَ فِي كُلِّ مَسْئَلَةٍ* ضَلَلْتَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاءَ دَلِيلٌ

Andai Allah tidak menolongmu atas apa yang engkau inginkan/maka tiada jalan bagi ciptaan-Nya untuk sampai kepadanya (apa yang dia inginkan).

Andai Allah tidak menuntunmu pada setiap jalan/niscaya engkau tersesat

sekalipun langit dijadikan petunjuk.

Rasulullah saw. pun melarang sikap lemah dan mental kalah. Ini sejalan dengan firman-Nya:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

Janganlah kalian bersikap lemah dan jangan (pula) kalian bersedih hati. Padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kalian orang-orang yang beriman (QS Ali Imran [3]: 139).

Mahabesar Allah Yang telah melarang orang-orang beriman bersikap lemah dan menghibur mereka dengan firman-Nya: *wa antum al-a'lawn* (kalianlah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), dengan syarat jika mereka beriman (menegakkan akidah dan syariah Islam). Tidak ada waktu mundur ke belakang meski selangkah. Fokus menatap masa depan Islam yang gemilang di akhir zaman, sebelum sampai pada perjumpaan dengan Allah yang dinantikan sebagai jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthma'innah*). Miqdad bin al-Aswad berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

﴿لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بَعْرٍ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ إِمَّا يُعْرِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُزِيهِمْ فَيَبْدُونَهَا﴾

Tidak tersisa di muka bumi satu rumah di kampung dan kota kecuali Allah masukkan ke dalamnya kalimat Islam dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Baik dengan Allah memuliakan mereka dan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang mulia itu atau Allah menghinakan

Mahabesar Allah Yang telah melarang orang-orang beriman bersikap lemah dan menghibur mereka dengan firman-Nya: *wa antum al-a'lawn* (kalianlah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), dengan syarat jika mereka beriman (menegakkan akidah dan syariah Islam). Tidak ada waktu mundur ke belakang meski selangkah. Fokus menatap masa depan Islam yang gemilang di akhir zaman, sebelum sampai pada perjumpaan dengan Allah yang dinantikan sebagai jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthma'innah*).

mereka sehingga mereka pun patuh tunduk pada kalimat Islam itu (HR Ahmad).

Tidak lah seorang Mukmin mendapati hadis ini, melainkan muncul harapan, semangat dan impian menjadi golongan yang disebutkan *ash-shâdiq al-masduq*, Rasulullah saw., sebagai umat yang dianugerahi kemuliaan, dengan kontribusi mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, mengetuk pintu-pintu dan menerangi setiap penjuru kegelapan, hingga seluruhnya tersinari cahaya Islam. Mukmin berjiwa pejuang dan bervisi pemenang:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

Milik Allah kemuliaan itu, juga Rasul-Nya dan kaum Mukmin (QS al-Munafiqun [63]: 8).

Wallâhu a'lam. □

KHARAJ DAN 'USYR (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Pasal 145)

Telaah Kitab edisi kali ini membahas Pasal 145 yang berbunyi:

يُجْبَى الخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ الخَرَاجِيَّةِ بِقَدْرِ إِحْتِمَالِهَا،
وَ أَمَّا الْأَرْضُ العُشْرِيَّةُ فَتُجْبَى مِنْهَا الزَّكَاةُ عَلَى
التَّنَائِجِ الفِعْلِ

Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Adapun tanah 'usyriyah dipungut zakatnya berdasarkan hasil nyata.

Pasal di atas menjelaskan bahwa besaran *kharaj* atas tanah *kharajiyah* tidak ditentukan dengan kadar dan besaran tertentu, tetapi ditetapkan berdasarkan potensi hasil tanahnya. Dalil yang melandasi pasal ini adalah sebuah riwayat yang dituturkan dari Imam az-Zuhri yang berkata:

فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ أَسْلَمَ
مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دِمَّهُ وَ مَالَهُ إِلَّا
أَرْضَهُ فَإِنَّمَا وَبَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُسَلِّمُوا وَ هُمْ
مُتَّبِعُونَ

Rasulullah saw. telah memutuskan untuk orang yang masuk Islam dari penduduk Bahrain bahwa beliau melindungi darah dan hartanya, kecuali tanahnya. Tanah tersebut

*adalah fai' bagi kaum Muslim karena mereka tidak masuk Islam dan mereka berada di bawah perlindungan kaum Muslim (HR Yahya bin Adam di dalam Kitab *Al-Kharaaj*).*

Riwayat ini menunjukkan bahwa tanah yang berada di suatu negara yang ditaklukkan dengan peperangan termasuk harta rampasan perang (*ghanaa'im*).

Hanya saja, pada masa Kekhilafahan Umar bin al-Khaththab ra., beliau menetapkan tanah-tanah tersebut sebagai milik Baitul Maal. Beliau menyerahkan pemanfaatannya kepada penduduknya. Lalu beliau menarik *kharaj* dari mereka sebagai kompensasi pemanfaatan mereka atas tanah milik kaum Muslim. *Kharaj* yang dipungut tidak ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi berdasarkan potensi yang terkandung di dalam tanah.

Beliau menarik atas sebagian sisi-sisi tanah di Irak, untuk setiap jaribnya, satu *faqiz* atau satu dirham. Beliau menarik *kharaj* atas tanah di Syam dengan kadar yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Ini menunjukkan bahwa *kharaj* ditarik berdasarkan potensi hasil yang terkandung di dalam tanah tersebut, bukan dengan jumlah atau kadar tertentu.

Kharaj 'Unwah (Kharaj Paksaan)



Kharaj dibagi menjadi dua macam, yakni *kharaj 'unwah* dan *kharaj shulh*.

Pertama: Kharaj 'Unwah. Ini adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim dari orang-orang kafir melalui peperangan. Contohnya adalah tanah Irak, Syam dan Mesir. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Harta rampasan apa saja (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk suatu negeri, semua itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Agar harta tersebut jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah. Apa yang ia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya (QS al-Hasyr (59): 7).

Khalifah Umar bin al-Khaththab menjadikan ayat di atas sebagai dasar argumentasi untuk tidak membagi-bagikan tanah Irak, Syams dan Mesir kepada tentara kaum Muslim. Bilal, Abdurrahman dan Zubair mendesak Khalifah Umar agar membagi-bagikan tanah-tanah tersebut. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah saw. atas tanah Khaibar yang beliau bagi-bagikan kepada pasukan yang turut dalam penaklukannya. Ayat ini juga yang disampaikan Khalifah Umar kepada orang-orang Anshar yang beliau kumpulkan untuk dimintai pendapatnya. Beliau berkata, “*Aku telah memutuskan untuk menahan tanah*

rampasan ini beserta penduduk kafirnya, kemudian menetapkan atas mereka (penduduknya) pungutan kharaj atas tanah tersebut, jizyah dari tengkuk (diri) mereka. Selain itu tanah ini menjadi fai bagi kaum Muslim, (pasukan) tentara dan keturunannya, serta orang-orang yang datang setelah mereka. Apakah kalian memahami bahwa tapal batas wilayah ini harus dijaga oleh pasukan? Apakah kalian juga memahami bahwa wilayah besar seperti Syam, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Mesir ini harus diperkuat dengan tentara dan mereka harus diberi gaji? Lalu dari mana mereka akan mendapatkan gaji jika aku telah membagi-bagikan tanah dan penduduknya.”

Kemudian Khalifah Umar mengungkapkan dalil untuk mendukung pendapatnya kepada mereka dengan membacakan ayat-ayat fai ini sampai pada firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

...serta orang-orang yang datang setelah mereka.

Khalifah Umar lalu berkata lebih lanjut, “*Ini adalah harta yang akan dibagikan kepada seluruh kaum Muslim sampai Hari Kiamat. Sungguh tidak seorang pun dari kaum Muslim, kecuali berhak mendapatkan bagian dari fai ini.”*

Mereka semua sepakat dengan pendapat Khalifah Umar dan berkata, “Pendapatmu adalah pendapat yang paling baik. Sungguh bijak perkataan yang engkau ucapkan dan pendapat yang engkau nyatakan. Jika tapal batas dan kota ini tidak diperkuat dengan tentara, dan tentara itu tidak digaji atas penjagaan mereka terhadap kota ini, niscaya orang kafir akan kembali menguasai kota mereka.”

Khalifah Umar berkata, “*Sungguh urusan ini telah jelas bagiku. Karena itu adakah seseorang arif dan cerdas yang mampu menempatkan tanah ini pada tempatnya dan menempatkan*



penduduknya pada tempatnya?”

Mereka menjawab, *“Serahkanlah hal itu kepada Utsman bin Hanif. Sungguh dia adalah seseorang yang memiliki keahlian, kecerdasan dan pengalaman.”*

Khalifah Umar segera menemui dia dan menyerahkan urusan pengukuran tanah Sawad (di Irak) kepada dirinya.

Setelah itu, berangkatlah Utsman bin Hanif ra. untuk mengukur tanah Sawad dan menetapkan *kharaj* yang harus dibayar. Kemudian beliau memberikan laporan kepada Khalifah Umar dan membacakannya.

Sebelum Khalifah Umar wafat, hanya dari tanah Sawad (tanah hitam yang subur di Kufah) saja telah diperoleh 100 juta dirham. Saat itu nilai satu dirham sama dengan satu *mitsqal*. Dengan demikian Khalifah Umar tetap menyerahkan tanah itu kepada pemiliknya, namun mereka diwajibkan membayar *kharaj* atas tanah tersebut untuk mengisi Baitul Maal kaum Muslim, sekaligus sebagai *fai* bagi kaum Muslim sampai Hari Kiamat. Status tanah ini dan semua yang dikeluarkan atas tanah itu tidak berubah (kekal) hingga Hari Kiamat. Status tanah ini tidak akan berubah menjadi tanah *‘usyriyyah* meskipun pemiliknya telah berubah menjadi Muslim atau pemiliknya menjual kepada kaum Muslim. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanah tersebut ditaklukkan secara paksa dan diberlakukan *kharaj* atasnya. Thariq bin Syihab berkata: *“Umar bin Khaththab telah menulis surat kepadaku (dan ditujukan) kepada kepala saudagar sungai (saat itu aku telah masuk Islam), yaitu Umar mewajibkan untuk menahan tanahnya dan diambil dari tanah tersebut kharaj.”* (HR Abu Ubaid).

Dari perkataan Khalifah Umar bin al-Khaththab jelaslah, bahwa status tanah *kharaj* dari tanah yang ditaklukkan secara paksa itu tidak akan pernah berubah walaupun penduduknya telah masuk Islam. Mereka pun

tetap diwajibkan membayar *kharaj* dari tanah tersebut walaupun penduduknya telah masuk Islam.

Kedua: Kharaj Shulh. Ini adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah yang pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum Muslim secara damai. *Kharaj* ini muncul seiring dengan perdamaian yang disepakati antara kaum Muslim dan pemilik tanah tersebut. Jika perdamaian itu menetapkan tanah negeri tersebut menjadi milik kaum Muslim, namun penduduknya tetap dibolehkan tinggal di atas tanah itu dengan kesediaan membayar *kharaj*, maka mereka wajib mengeluarkan *kharaj* atas tanah tersebut hingga Hari Kiamat. Ketentuan semacam ini mengikat dan berlaku selamanya bagi penduduk wilayah itu. Status tanah tersebut tetap sebagai tanah *kharajiyah* sampai Hari Kiamat walaupun penduduknya berpindah ke agama Islam, atau tanah tersebut dijual kepada orang Islam, atau karena sebab-sebab yang lain.

Akan tetapi, jika perdamaian tersebut menetapkan tanah itu tetap menjadi milik penduduknya, dan dikelola oleh mereka, serta telah ditetapkan *kharaj* atas mereka, maka *kharaj* semacam ini diserupakan dengan *jizyah* yang akan terhapus dengan masuknya mereka ke dalam Islam, atau mereka menjualnya kepada seorang Muslim. Ketentuan seperti ini didasarkan firman Allah SWT:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

Penuhilah oleh kalian janji. Sungguh janji itu pasti diminta pertanggungjawaban (QS al-Isra’ [17]: 34).

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

﴿الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ﴾

Kaum Mukmin itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan (HR



Mutaffaq 'alaihi).

Jika tanah *kharaj* dijual kepada orang kafir, maka statusnya sebagai tanah *kharaj* tetap, dan tidak pernah terhapus. Hanya saja, orang-orang kafir tersebut wajib membayar *kharaj* dan *jizyah* sekaligus.

Adapun tanah *'usyriyyah*, yakni tanah yang ditarik *'usyr* (1/10). Tanah-tanah *'usyriyyah* itu mencakup:

1. Jazirah Arab. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua penyembah berhala yang menghuni Jazirah Arab hanya diberi dua opsi saja: diperangi atau masuk ke dalam agama Islam. *Jizyah* tidak diterima dan dipungut dari mereka. Rasulullah saw. pun tidak mewajibkan *kharaj* apapun atas tanah mereka walaupun terjadi peperangan dan penaklukan di atasnya.

2. Setiap tanah yang penduduknya masuk Islam, seperti Madinah dan Indonesia. Rasulullah saw. bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مَتَى مَالَهُ وَنَفْسَهُ
إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'Tiada Tuhan selain Allah'. Siapa saja yang mengucapkan 'Tiada Tuhan selain Allah', maka terpeliharalah dariku jiwanya dan hartanya, kecuali dengan haknya serta perhitungannya di sisi Allah (HR Muslim). Penduduk Madinah tidak pernah dipungut, kecuali *'usyr*.

3. Setiap tanah yang ditaklukkan secara paksa, kemudian Khalifah membagikan tanah tersebut kepada (pasukan) tentara yang turut peperangan, seperti tanah Khaibar; atau tanah yang kepemilikannya ditetapkan Khalifah bagi orang-orang yang turut berperang, seperti yang dilakukan Khalifah

Umar terhadap pasukan yang berasal dari jazirah Syams. Beliau menetapkan tanah yang berada lembah Sungai Ibad di Hamsha dan Maraja Baradiy di Damaskus untuk mereka (pasukan Syams).

4. Setiap tanah yang penduduknya melakukan perjanjian damai dengan ketetapan bahwa kepemilikannya tetap berada di tangan mereka dan mereka bersedia membayar *kharaj*. Tanah ini menjadi tanah *'usyur* saat penduduknya masuk Islam, atau penduduknya menjual tanah tersebut kepada seorang muslim.
5. Setiap tanah mati (tanah mawat) yang dihidupkan oleh seorang Muslim. Rasul saw. bersabda:

«مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati yang tidak dimiliki seorang pun, maka ia lebih berhak atas tanah itu (HR Ahmad).

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan redaksi:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR al-Bukhari).

Status tanah *'usyriyyah* ini tetap dan tidak akan berubah menjadi tanah *kharaj* jika seorang kafir membeli tanah *'usyriyyah* dari seorang Muslim, maka orang kafir tersebut wajib membayar *kharaj* atas tanahnya, dan ia tidak wajib menyerahkan *'usyr*. Sebabnya, *'usyr* itu serupa dengan zakat, dan orang kafir tidak wajib menunaikan zakat.

'Usyr dipungut dari tanah *'usyriyyah* atas hasil nyata dari tanahnya, yakni 1/10 jika diairi dengan air hujan, dan 1/20 jika diairi dengan menggunakan alat.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. [Gus Syams]



HAMBA MERDEKA

Rib'i bin Amir melaju cepat dengan kudanya. Ia menuju perkemahan Rustum. Panglima Pasukan Kerajaan Persia saat itu. Setibanya di sana, ia mendapati pembesarnya berpakaian kenegaraan. Majelis mereka dihiasi dengan hamparan permadani dan sutera yang serba mahal. Rustum duduk di singgasananya. Ia memakai mahkota emas yang dihiasi dengan batu permata yang juga serba mahal. Sebaliknya, Rib'i bin Amir, Panglima Pasukan kaum Muslim itu, hanya berpakaian kasar dan sederhana.

Rib'i bin Amir langsung masuk ke perkemahan itu tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Ia tetap menunggang kudanya dan membiarkan kaki kuda itu mengotori hamparan permadani yang serba mahal itu.

Rib'i bin Amir lalu turun dari kudanya. Ia kemudian berjalan menghadap Rustum dengan menyandang tombaknya. Seketika itu pula hamparan permadani itu terkoyak-koyak oleh senjatanya itu. Saat sudah berada di hadapan Panglima Rustum, Rustum lalu mengajukan sebuah pertanyaan, "Apa yang mendorong kalian (kaum Muslim) datang ke negeri kami?"

Rib'i bin Amir, yang berdiri tegak penuh

wibawa, menjawab dengan tegas, "Kami datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan (ibadah) kepada sesama manusia menuju penghambaan (ibadah) hanya kepada Allah SWT; dari kesempitan ke keluasaannya; dan dari kezaliman agama-agama ke keadilan Islam."

Rib'i bin Amir menjelaskan bahwa kedatangan pasukan Khilafah Islam ke negeri Persia bukan karena ambisi ekonomi atau politik demi mengeksploitasi bangsa/negara yang dikuasai. Sebaliknya, kedatangan pasukan Khilafah Islam mereka membawa misi luhur: memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan; menebarkan kebaikan, rahmat dan hidayah; menerangi jalan hidup; dan melenyapkan kezaliman yang membelenggu mereka. Inilah misi kemerdekaan Islam yang mulia, yang diemban Khilafah Islam dalam setiap ekspansinya.

Sebelum Rib'i bin Amir, utusan lain yang datang kepada Rustum adalah Mughirah bin Syu'bah. Seperti ditulis oleh Ibnu Katsir dalam *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Mughirah bin Syu'bah juga menyampaikan jawaban yang sama ketika ditanya Rustum. "Dunia bukanlah tujuan kami. Cita-cita dan tujuan kami adalah akhirat. Allah SWT telah mengutus kepada kami Rasul dan Dia berkata dirinya, 'Aku telah memberikan kekuasaan kepada kaum ini (kaum Muslim) atas orang-orang yang tidak tunduk pada agama-Ku.'"

Rustum bertanya lagi, "Agama apakah itu?"

Mughirah bin Syu'bah menjawab, "Pilar yang tegak di atas kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, serta pengakuan atas semua yang datang dari-Nya." (Ibn Katsir, *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, IV/43).

Dari fragmen di atas, ada satu misi kemerdekaan Islam yang layak direnungkan. Tidak lain adalah penghambaan (ibadah) hanya kepada Allah SWT. Sebabnya, Allah SWT

menciptakan manusia dan jin tidak lain memang agar mereka menghambakan diri (beribadah) kepada-Nya (Lihat: QS adz-Dzariyat [51]: 56).

Ibadah tak lain merupakan ketundukan dan kepasrahan secara total seorang hamba kepada Penciptanya, Allah SWT. Imam Ja'far ash-Shadiq, sebagaimana dikutip dalam Kitab *Fath ar-Rabbâni wa Faydh arh-Rahmâni* karya Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, pernah berkata, "Hakikat ibadah (penghambaan) seseorang terhadap tuannya adalah: ia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya hakikatnya bukanlah miliknya, tetapi milik tuannya; ia tunduk dan patuh tanpa membantah terhadap setiap perintah tuannya; ia tidak membuat aturan apapun selain menerima aturan yang dibuat tuannya untuk dirinya."

Dengan demikian ibadah pada dasarnya adalah kepatuhan dan kepasrahan total kepada Zat yang disembah, yakni Allah SWT, dengan selalu menaati seluruh hukum-hukum-Nya.

Terkait dengan itu, Allah SWT berfirman (yang artinya): *Demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam apa saja yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka satu rasa keberatan pun terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima putusanmu itu dengan sepenuh hati* (TQS an-Nisa' [4]: 65).

Ada sejumlah riwayat terkait dengan *sabab an-nuzûl* (sebab turunnya) ayat ini. Salah satunya adalah riwayat dari Ummu Salamah. Ia menyebutkan bahwa Zubair bin Awwam pernah mengadukan seseorang kepada Baginda Rasulullah saw. dalam suatu perkara. Beliau kemudian mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut yang memenangkan Zubair. Orang tersebut dengan nada keberatan lalu berkata, "Engkau memenangkan dia karena dia adalah keponakanmu." Kemudian turunlah ayat ini (Dikeluarkan oleh Al-Hamidi dalam

Musnad-nya dan Ibn Hibban dalam *Al-Kabîr*).

Dalam riwayat lain, dalam tafsirnya Al-Hafizh as-Suyuthi menuturkan riwayat dari Utbah bin Dhamrah dari bapaknya, bahwa pernah ada dua orang yang berperkara, yang sama-sama mengadukan perkaranya kepada Baginda Rasulullah saw. Beliau lalu mengeluarkan putusan hukum atas perkara tersebut yang memenangkan orang yang dipandang benar dan mengalahkan lawannya yang dianggap salah. Namun, orang yang dikalahkan perkaranya berkata, "Aku tidak rela." Yang memenangkan perkara lalu bertanya, "Lalu apa yang engkau mau?" Ia menjawab, "Kita pergi ke Abu Bakar ash-Shiddiq (untuk meminta putusannya, *pen.*)" Keduanya lalu menemui Abu Bakar ra. Beliau lalu berkata, "Kalian berdua harus mematuhi putusan Rasulullah saw." Namun, pihak yang dikalahkan menolak dan tetap tidak rela.

"Sekarang mari kita menjumpai Umar bin al-Khaththab." Lalu keduanya menemui Umar ra. Namun, Umar bukan memberikan putusan. Beliau malah masuk ke rumahnya dan keluar kembali dengan membawa pedang di tangannya. Seketika beliau menebaskan pedang itu ke leher orang yang enggan menerima putusan Rasulullah itu. Kemudian turunlah ayat di atas (As-Suyuthi, *Ad-Durr al-Mantsûr fî Ta'wîl bi al-Ma'tsûr*, III/161-162. Lihat pula: Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafâsir*, I/260-261).

Jelas, ketundukan secara total pada hukum-hukum Allah SWT merupakan bentuk penghambaan (ibadah) yang hakiki seorang hamba kepada-Nya. Saat hamba tunduk-patuh kepada Allah SWT sejatinya ia adalah hamba yang merdeka. Hamba merdeka tidak lain adalah orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah SWT, Pencipta manusia. Terbebas sama sekali dari penghambaan kepada sesama manusia.

Wa mâ tawfîqi illâ bilLâh. [Arief B. Iskandar]



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

HIJRAH

Menurut riwayat, setelah 2,5 tahun Umar bin al-Khaththab ra. menjabat sebagai khalifah, salah satu gubernurnya, Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kebingungannya karena surat dari Khalifah Umar sangat banyak dan tidak ada tanggalnya. Akibatnya, tidak jelas surat mana yang baru dan mana yang lama. Abu Musa menyarankan untuk dibuatkan penanggalan agar memudahkan administrasi persuratan itu.

Setelah bermusyawarah dengan para Sahabat, Khalifah Umar memutuskan untuk memulai perhitungan tahun dari saat hijrah Nabi saw. dari Makkah ke Madinah. Keputusan ini berawal dari usulan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, seraya menepikan usulan lain yang menginginkan perhitungan dimulai dari saat lahir Nabi saw. Atau kematian beliau. Kata Khalifah Umar, *"Peristiwa Hijrah menjadi pemisah yang benar dengan yang batil."*

Mereka menolak menjadikan kelahiran Nabi saw., begitu juga wafat beliau, sebagai acuan kalender karena tidak ingin *tasyabbuh* atau menyerupai orang Nasrani, juga orang Persia.

Lalu bulan apa yang akan dipakai sebagai

awal dari bulan kalender Hijrah? Sebagian Sahabat mengusulkan bulan Ramadhan. Namun, Umar bin al-Khaththab ra. dan Ustman bin Affan ra. mengusulkan bulan Muharram. Ini yang disepakati. Bulan Muharam dipilih sebagai awal bulan dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab, *Fath al-Bâri*, *"Karena tekad untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharam. Baiat terjadi pada pertengahan bulan Dzulhijjah (bulan sebelum Muharam). Dari peristiwa baiat itulah awal mula hijrah. Bisa dikatakan hilal pertama setelah peristiwa baiat adalah hilal bulan Muharam. Tekad untuk berhijrah juga terjadi pada hilal bulan Muharam. Karena inilah Muharam layak dijadikan awal bulan. Ini alasan paling kuat mengapa dipilih bulan Muharram."*

Dengan menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Muharam sebagai awal bulan, diharap umat Islam memiliki dasar yang mengandung spirit atau semangat hijrah.

++++

Apa itu hijrah? Menurut Izzuddin bin Abdus Salam dalam *Syajarât al-Ma'ârif wa al-*

Ahwâl wa Shâlih al-Aqwâl wa al-Â'mâl, hijrah itu ada dua macam: *Pertama*, hijrah meninggalkan negeri. *Kedua*, hijrah meninggalkan dosa dan pelanggaran terhadap syariah.

Adapun menurut istilah syariah, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Jilid 2, hijrah adalah keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam seperti hijrah Rasulullah saw. dari Makkah (Darul Kufur) menuju Madinah al-Munawwarah (Darul Islam) pada tahun 622 M.

Hijrah, keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam, wajib hukumnya bagi mereka yang tertindas dan tak lagi bisa menampakkan syiar-syiar Islam (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 97-99).

Hijrah dalam arti meninggalkan dosa dan pelanggaran syariah juga wajib dilakukan. Pasalnya, tiap maksiat memang harus ditinggalkan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., *"Seorang Muslim adalah orang yang menjadikan kaum Muslim selamat dari ucapan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang telah Allah larang."* (HR al-Bukhari Muslim).

Seorang Muslim yang berhijrah bakal mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya ampunan dan rahmat Allah, pahala tak ternilai, rezeki melimpah dan yang utama tentu adalah surga. Allah SWT berfirman (yang artinya): *"Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpa dirinya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (TQS an-Nisa' [4]: 100).

Allah SWT juga berfirman (yang artinya):

Apa itu hijrah? Menurut Izzuddin bin Abdis Salam, hijrah itu ada dua macam: *Pertama*, hijrah meninggalkan negeri. *Kedua*, hijrah meninggalkan dosa dan pelanggaran terhadap syariah. Adapun menurut istilah syariah, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hijrah adalah keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam seperti hijrah Rasulullah saw. dari Makkah (Darul Kufur) menuju Madinah al-Munawwarah (Darul Islam) pada tahun 622 M.

"Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberi mereka rahmat, keridhaan dan surga-surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya." (TQS at-Taubah [9]: 20-21).

Sedemikian besar keutamaan hijrah, Nabi saw. sampai berpesan kepada *Abu Fathimah adh-Dhamri ra.*, *"Hendaklah kamu berhijrah karena pahalanya tidak ada bandingannya."* (HR an-Nasai).

Namun, hijrah tidaklah mudah dilakukan. Banyak tantangan yang bakal dihadapi, antara lain: *mind-set* (pola pikir) lama yang tak islami yang membuat hijrah menjadi sesuatu yang menakutkan, keluarga yang tidak mendukung, lingkungan pergaulan lama dan sistem serta penguasa sekuler. Akibatnya, hijrah menjadi

Catatan Dakwah

sulit dilakukan.

Guna meraih sukses hijrah mesti diperhatikan kunci-kuncinya, antara lain ikhlas. Tentang ikhlas, Rasulullah saw. mengingatkan secara khusus, “*Sungguh setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia inginkan itu.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, penting adanya lingkungan pergaulan yang bisa membantu istiqamah di jalan taat. Perlu diingat, manusia itu lemah, apalagi ketika sendiri. Karena itu ia memerlukan dukungan orang lain. Sekelas Nabi Musa as. saja memohon kepada Allah agar mempunyai teman seperjuangan, yaitu Nabi Harun as., yang bisa mendukung perjuangannya. Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan (yang artinya): “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar (jujur).*” (TQS at-Taubah [9]: 119).

Namun, di atas semuanya, akidahlah yang akan memberikan pengaruh pada cara berpikir dan bertindak/ Akidah pula yang akan meneguhkan pendirian seorang Muslim dalam menjalani kehidupan dunia, termasuk dalam berhijrah. Ini sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam al-Quran: “*Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.*” (TQS Ibrahim [1]: 27)

Keteguhan akidah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia memahami al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan agar selamat dunia dan akhirat. Membaca al-Quran

Jelaslah, dalam situasi seperti sekarang ini, hijrah bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi hidup kita di dunia, apalagi di akhirat. Guna meneguhkan jalan hijrah kita, penting untuk terus berdoa, memohon kepada Allah agar bisa tetap istiqamah dalam beriman dan takwa kepada Allah hingga ajal menjemput nanti dalam keadaan khusnul khatimah. Insy Allah...

akan memberikan kekuatan dalam beramal shalih. Demikian sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam al-Quran: “*Katakanlah, ‘Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)’.*” (TQS an-Nahl [16]: 102).

++++

Jelaslah, dalam situasi seperti sekarang ini, hijrah bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi hidup kita di dunia, apalagi di akhirat. Guna meneguhkan jalan hijrah kita, penting untuk terus berdoa, memohon kepada Allah agar bisa tetap istiqamah dalam beriman dan takwa kepada Allah hingga ajal menjemput nanti dalam keadaan khusnul khatimah. Insy Allah... □

APAKAH BASMALLAH BAGIAN DARI SURAT AL-FATIHAH?

Soal:

Jika para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari keberadaan basmallah sebagai salah satu ayat dari al-Fatihah adalah tidak dikafirkan, sebab hal itu ditetapkan dengan ahad bukan dengan tawatur, lalu bagaimana dengan nomor di sebagian mushaf sekarang ini pada awal al-Fatihah? Kapan basmallah dimasukkan sebagai satu ayat atas al-Fatihah? Apakah al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat atau 6 ayat tanpa basmallah, sementara mushaf-mushaf telah berbeda dalam penomoran ayat al-Fatihah? Apakah ini bertentangan dengan penjagaan Allah untuk al-Quran Mulia?! Bagaimana pula sikap Daulah Islamiyah mendatang, insya'a Allah, terhadap adanya apa yang bukan mutawatir di dalam mushaf seperti basmallah dan doa di akhir mushaf?

Jawab:

Kami sebelumnya telah menjawab pertanyaan seputar basmallah pada 21 Rabi'u al-Akhir 1432 H-26 Maret 2011. Di situ dinyatakan sebagai berikut:

Berkaitan basmallah, itu adalah bagian dari al-Quran al-Karim sebagai bagian dari ayat surat an-Naml:

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

Sungguh surat itu, dari Sulaiman dan sungguh (isi)-nya: "Dengan menyebut nama

Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (QS an-Naml [27]: 30).

Adapun pada awal al-Fatihah atau awal-awal surat, maka itu diperselisihkan keberadaannya sebagai ayat dari surat tersebut atau itu sekadar pemisah di antara surat. Perbedaan pendapat ini tidak membahayakan. Sebabnya, kedua pihak mengakui bahwa basmallah bagian dari al-Quran di QS an-Naml. Perbedaan tersebut adalah tentang posisinya pada awal surat selain QS at-Taubah, apakah itu merupakan ayat pada awal-awal surat atau ayat di awal al-Fatihah, ataukah bukan merupakan ayat baik di awal-awal surat dan pada awal al-Fatihah. Selama semuanya mengakui bahwa itu merupakan ayat dari al-Quran pada QS an-Naml, maka perbedaan tentangnya pada awal-awal surat tidak berpengaruh kecuali dalam bacaannya di dalam shalat awal al-Fatihah atau awal-awal surat secara *jahr* atau secara *sirr* (pelan), atau tidak membacanya, sesuai hukum-hukum syariah yang di-*istinbaath* oleh para mujtahid.

Sebagai tambahan penjelasan dan untuk menjawab semua perkara di pertanyaan Anda, saya sebutkan hal-hal berikut:

Dinyatakan di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* (1/159-160): Jibril membaca semua al-Quran yang diturunkan kepada Rasul saw. sekali setahun. Pada tahun Rasulullah saw. diwafatkan, Jibril membacakan al-Quran

seluruhnya kepada beliau sebanyak dua kali. Dari Aisyah ra., dari Fathimah as.:

«أَسْرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا خَضِرَ أَجْلِي»

Nabi saw. menceritakan rahasia kepadaku bahwa: "Jibril memaparkan al-Quran kepadaku tiap tahun sekali dan Jibril memaparkan al-Quran kepadaku tahun ini dua kali dan aku tidak melihatnya kecuali ajalku akan segera tiba." (HR al-Bukhari).

Dari Abu Hurairah ra.:

«كَانَ يَعْزُضُ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَزَّزَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي فُيِّضَ فِيهِ»

Jibril memaparkan al-Quran kepada Nabi saw. tiap tahun satu kali dan Jibril memaparkan kepada beliau dua kali pada tahun yang di situ beliau diwafatkan (HR al-Bukhari).

Semua ini menunjukkan secara *qath'i* atas susunan ayat-ayat di dalam surat-suratnya dan bentuk surat dengan jumlah ayat-ayatnya dan posisinya. Semua itu bersifat *tawqifi* dari Allah SWT. Atas dasar itu, umat menukulkan al-Quran dari Nabi-nya dan hal itu telah ditetapkan secara *tawaatur*.

Pemaparan al-Quran oleh Jibril kepada Rasul saw. setiap tahun satu kali maknanya memaparkan susunan/urutan (*tartib*) ayat-ayatnya sebagian untuk sebagian yang lainnya dan susunan ayat-ayatnya di surat-suratnya. Sebabnya, *'ardhu al-kitâb* maknanya adalah memaparkan kalimat-kalimat, kata-kata dan urutannya. Pemaparannya dua kali pada tahun beliau diwafatkan juga bermakna pemaparan urutan ayat-ayatnya satu sama lain dan susunan ayat-ayat di dalam surat-suratnya. Demikian juga dari hadis tersebut dapat dipahami pemaparan susunan surat-suratnya satu sama lain. Namun, dinyatakan hadis-hadis sahih lainnya yang gamblang tentang susunan ayat-ayat. Hadis-hadis itu menyatakan atas susunan ayat-ayat satu sama lain dan susunan ayat-ayat di dalam surat-suratnya:

«ضَعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ فِي سُورَةٍ كَذَا بَعْدَ آيَةٍ كَذَا»

Letakkan ayat-ayat ini di dalam surat ini setelah ayat ini.

«ضَعُوا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا»

Letakkan ayat-ayat itu di dalam surat yang di dalamnya disebutkan ini dan ini.

Surat itu ditutup dan surat lainnya dimulai dengan *tawqif* dari Allah melalui Jibril. Ibnu Abbas ra. berkata:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعْلَمُ خَتَمَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

Nabi saw. tidak mengetahui penutup surat sampai turun "bismillâh ar-rahmân ar-rahîm.

Dalam riwayat lainnya dinyatakan:

«فَإِذَا نَزَلَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِمُوا أَنَّ السُّورَةَ قَدْ انْقَضَتْ»

Jika turun bismillâh ar-rahmân ar-rahîm, mereka mengetahui bahwa suatu surat telah berakhir. (HR al-Baihaqi dan Abu Dawud).

Semua ini menunjukkan secara *qath'i* atas susunan ayat-ayat di dalam surat-suratnya dan bentuk surat dengan jumlah ayat-ayatnya dan posisinya. Semua itu bersifat *tawqifi* dari Allah SWT. Atas dasar itu, umat menukilkan al-Quran dari Nabi-nya dan hal itu telah ditetapkan secara *tawaatur*.

Ketika para Sahabat ra. bersandar pada mushaf Utsman, mereka menetapkan di dalamnya basmallah pada awal QS al-Fatihah dan pada awal semua surat kecuali QS al-Bara'ah. Namun, tidak jelas jika hal itu berarti bahwa basmallah adalah ayat dari setiap surat yang mereka tetapkan basmallah di awal-awalnya, yakni al-Fatihah dan semua surat selain QS al-Bara'ah, atau bahwa basmallah adalah pemisah di antara surat-surat. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keberadaan basmallah sebagai ayat al-Fatihah dan keberadaan basmallah sebagai ayat dari semua surat.

Seiring dengan perbedaan pendapat ini, mereka menetapkan bahwa basmallah ditetapkan secara tulisan di mushaf telah disepakati oleh para Sahabat di awal al-Fatihah dan di awal surat-surat selain al-Bara'ah. Jadi basmallah tidak dimasukkan oleh kaum Muslim belakangan di awal surat-surat dan di awal al-Fatihah, tetapi itu ditetapkan di mushhaf Utsman di awal al-Fatihah dan di awal surat-surat selain al-Bara'ah. Hal itu dengan ijmak dan kesepakatan para Sahabat ra.

Dinyatakan di dalam *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur`ân* (i/234) oleh Imam as-Suyuthi:

Al-Fatihah: Jumhur adalah tujuh ayat. Para ulama Makkah dan Kufah menghitung basmallah tanpa menghitung ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ sebagai ayat, sedangkan yang lain

berpendapat sebaliknya. Al-Hasan berkata: Ada delapan ayat. Ia menghitung keduanya (basmallah dan an'amta 'alayhim) sebagai ayat. Sebagian lainnya menghitungnya enam ayat. Jadi keduanya tidak dihitung sebagai ayat. Yang lainnya menghitungnya Sembilan. Jadi menghitung keduanya dan ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ sebagai ayat. Apa yang memperkuat pendapat pertama adalah apa yang telah dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, ad-Daraquthni dan yang lain dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. membaca:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (1). Segala pujian milik Allah, Tuhan semesta alam (2). Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (3). Yang menguasai Hari Pembalasan (4). Hanya Engkaulah Yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan (5). Tunjukilah kami jalan yang lurus (6), (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (7).

Jadi Nabi saw. memutuskan ayat-perayat dan menghitungnya hitungan orang Arab. Beliau menghitung ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ sebagai ayat, dan beliau tidak menghitung ﴿عَلَيْهِمْ﴾ sebagai ayat. Ad-Daraquthni telah mengeluarkan hadis dengan sanad sahih dari Abdu Khair. Ia berkata: Ali ditanya tentang as-sab'u al-matsâniya, maka Ali berkata:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ *Lalu dikatakan kepada beliau tidak lain al-Fatihah itu enam ayat. Ali berkata: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ adalah ayat.*

Ini berarti perbedaan pendapat dalam masalah basmallah dari sisi keberadaannya sebagai ayat terjadi dalam bab ijthad dengan dalil-dalil sahih menurut para mujtahid dan para pengikut para mujtahid yang muktabar. Itu merupakan perkara yang *masyruu'*.

Sesungguhnya apa yang dimasukkan pada mushaf berupa *at-tanqīth* (penetapan titik), harakat, penempatan tanda-tanda wakaf dan hukum-hukum tartil, atau apa yang dibuat dalam sebagian mushaf di akhir mushaf berupa doa atau di pinggir halaman berupa tafsir dan penjelasan, semua itu tidak berpengaruh dalam bercampurnya al-Quran dengan yang lainnya. Kaum Muslim memberikan perhatian kepada al-Quran dengan perhatian yang besar. Jutaan kaum Muslim pun menghafal al-Quran. Nasasnya *tawaatur*. Jadi tidak mungkin terjadi al-Quran bercampur dengan yang lainnya dan menjadi samar bagi orang-orang. Oleh karena itu, kaum Muslim sejak ratusan tahun lalu, mereka telah memasukkan terhadap mushaf-mushaf, beberapa perkara yang membantu dalam membaca al-Quran seperti titik, harakat dan yang lainnya, dan tidak berpengaruh terhadap al-Quran al-Karim. Oleh karena itu, Daulah al-Khilafah tidak melarang adanya harakat, tanda-tanda waqaf dan lainnya di dalam mushaf.

Ringkasnya, terjadinya perbedaan dalam ijthad berkaitan basmallah apakah ayat dari al-Fatihah atau bukan ayat, atau bahwa al-Fatihah itu dihitung enam ayat atau tujuh ayat, atau basmallah itu dibaca secara pelan (*sirr*) atau secara terang (*jahr[an]*), semua itu tidak berpengaruh dalam penjagaan Allah SWT untuk al-Quran al-Karim. Basmallah itu adalah ayat dari al-Quran di surat an-Naml. Al-Quran

Ringkasnya, terjadinya perbedaan dalam ijthad berkaitan basmallah apakah ayat dari al-Fatihah atau bukan ayat, atau bahwa al-Fatihah itu dihitung enam ayat atau tujuh ayat, atau basmallah itu dibaca secara pelan (*sirr*) atau secara terang (*jahr[an]*), semua itu tidak berpengaruh dalam penjagaan Allah SWT untuk al-Quran al-Karim. Basmallah itu adalah ayat dari al-Quran di surat an-Naml. Al-Quran dikumpulkan di mushaf yang satu (sama) sejak masa Khulafaur-Rasyidin ra. sebagaimana telah ditulis di hadapan Rasul saw. dan sebagaimana mereka baca dari beliau.

dikumpulkan di mushaf yang satu (sama) sejak masa Khulafaur-Rasyidin ra. sebagaimana telah ditulis di hadapan Rasul saw. dan sebagaimana mereka baca dari beliau. Mahabonar Allah Yang Mahaagung:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

Sungguh Kamilah yang menurunkan al-Quran dan sungguh Kami benar-benar memeliharanya (QS [15]: 9).

Wallâh a'lam wa ahkam. □

[Dikutip dari] Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah tanggal 26 Dzul Qa'dah 1443 H-25 Juni 2022 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/82832.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/578580240496016>

Stempel Ottoman di Tunisia: Istana Bey

Tunisia, yang diperintah oleh Ottoman Beys antara tahun 1705 dan 1957, selalu menjadi sudut Mediterania yang luar biasa. Ottoman Beys, yang memerintah di wilayah tersebut, menghidupkan kembali Tunisia dari satu ujung ke ujung lainnya dan mengukir jejak Ottoman di kota-kota.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/tunusta-osmanli-muhru-bey-saraylari>



Tunisia yang hidup dengan keadilan dan toleransi di bawah pemerintahan Utsmaniyah selama bertahun-tahun, sangat terpengaruh oleh hampir setiap aspek Utsmaniyah. Ottoman Beys, yang memerintah di Tunisia antara tahun 1705 – 1957, berusaha membuat negara itu makmur dalam segala hal dan mengembangkannya.



Banyak karya indah, menggabungkan estetika Ottoman dan pemahaman Tunisia, menghiasi pantai Mediterania dan wilayah interior. Karya Beys Ottoman sangat menonjol di wilayah Bardo, Carthage, Mennuba dan Marsa. Karya-karyanya mengingatkan pada mimpi Ottoman.



Sebagian besar Istana Bey di Tunisia terletak di wilayah Marsa yang terkenal, yang terletak di sisi utara ibukota Tunis. Marsa menonjol dengan garis pantai yang panjang dan rumah-rumah terpisah. Kawasan yang menawarkan pemandangan indah secara visual kepada para pengunjung ini juga menarik perhatian para wisatawan.

Istana Bey yang menonjol dan paling dikagumi di negara ini terletak di Marsa. Apalagi "Sidi Busaid", yang kecantikannya terkenal di kalangan masyarakat, juga ada di kawasan ini. "Kubbe el Heva", yang merupakan salah satu simbol kota dan berarti kubah yang lapang, adalah istana musim panas dari periode Ottoman.



Istana musim panas, yang dikenal sebagai Airy Dome, dibangun di atas laut sehingga keluarga Bey dapat menghabiskan bulan-bulan musim panas dengan nyaman. Namun, karena sengketa hukum, bangunan indah ini tetap tidak digunakan.



Istana Saadet, yang dibangun untuk digunakan sebagai tempat tinggal oleh Muhammad Pasha, yang memerintah di Tunisia antara tahun 1855–1859, dianggap sebagai salah satu istana yang bertahan dan dianggap relatif baru sejak dipugar antara tahun 1914–1915



Istana Felicity, yang dipugar dengan penuh pengabdian pada tahun 1914, melayani Presiden Bourguiba, meskipun ada istana yang jauh lebih tinggi dan indah.



Hal-hal yang sedikit berbeda untuk Kubbe el Heva, yang tidak bisa mengalami nasib yang sama seperti Istana Felicity. Istana yang dibangun oleh Ali Bey di atas laut itu kini terbengkalai. Sebagai milik pribadi pada tahun 1960, istana sekarang terlantar karena beberapa perselisihan.



Belajar dari Kebangkrutan Sri Lanka

Kebangkrutan Sri Lanka akibat utang riba dinilai Peneliti Forum Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKTA) Muhammad Ishak sebagai pelajaran berharga bagi Indonesia.

“Krisis Sri Lanka menjadi pelajaran tentang bahayanya bergantung pada utang riba, utang luar negeri dari negara-negara kapitalis dan lembaga-lembaga multinasional seperti IMF dan Bank Dunia,” tuturnya kepada *Mediaumat.id*, Senin (11/7/2022).

Ia mengungkap empat faktor penyebab krisis Sri Lanka. *Pertama*, inflasi yang meningkat tajam akibat harga bahan bakar dan pangan. “Kondisi ini terjadi akibat negara itu bergantung pada impor pada kedua komoditas tersebut,” ungkapnya.

Kedua, pesatnya pertumbuhan utang luar negeri Sri Lanka dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh utang pemerintah kepada Cina meningkat drastis, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Ketiga, tingginya biaya impor, naiknya pembayaran utang dan rendahnya penerimaan devisa. “Ini menyebabkan negara itu kekurangan cadangan devisa sehingga tidak mampu membayar bunga utangnya yang jatuh tempo sebesar \$78 juta,” bebernya.

Keempat, langkah pemerintah Sri Lanka meminta pinjaman kepada IMF menyebabkan

krisis semakin parah. Pasalnya, IMF justru meminta berbagai persyaratan yang memberatkan negara dan rakyat negara itu, seperti menaikkan suku bunga dan pajak sebagai syarat pinjaman.

Bin Abdul Karim Issa Jadi Khatib Haji, Aneh!

Aktivis Gerakan Islam Palestina Syekh Kamal al-Khatib mengatakan, penunjukan Muhammad bin Abdul Karim Issa sebagai khatib dalam khutbah Hari Arafah pada Jumat (9 Zulhijah 1443 H/8 Juli 2022 M) di Masjid Namira adalah sebuah perubahan yang aneh.

“Dengan penunjukan Muhammad bin Abdul Karim Issa sebagai khatib di Hari Arafah, saya katakan kepada mereka yang bertanya tentang kondisi dunia. Apakah akan terjadi perubahan dan hal aneh? Maka saya katakan kepada mereka. Ya, bagaimana tidak!” ujarnya dalam sebuah unggahan di media sosial yang dilansir *Mediaumat.id*, Jumat (8/7/2022).

Pasalnya, menurut Syekh Kamal, dengan Muhammad bin Abdul Karim Issa menjadi khatib pada hari Arafah, dan Muhammad bin Salman beserta kelompok kaum rusaknya menjadi penguasa kaum Muslim, itu saja sudah cukup menjadi bukti adanya perubahan dan hal yang aneh. Betapa tidak, Muhammad bin Abdul Karim Issa, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, adalah orang yang pernah menerima pemimpin spiritual Hindu yang disebut “Sadhguru” dengan penuh cinta.

Syekh Kamal menyampaikan, ketika itu Muhammad bin Abdul Karim Issa menyambut dia dengan mengatakan seperti yang biasa dikatakan para Sahabat ra. kepada Rasulullah SAW.

“Kami mencintaimu sebelum kami melihatmu, dan ketika kami melihatmu, maka kami lebih mencintaimu,” ucap Syekh Kamal menirukan.

“Bahkan hal itu disampaikan saat puncak kampanye serangan umat Hindu terhadap



kemuliaan Nabi kita Muhammad saw.,” tambahnya sedih.

Di sisi lain, lanjut Syekh Kamal, Muhammad bin Abdul Karim Issa termasuk orang yang menyerang kampanye pemboikotan produk Prancis pasca-pelecehan terhadap Rasulullah saw. Lantas digambarkan pula bahwa para pemilik perusahaan Prancislah sebagai pihak yang tertindas.

Tak hanya itu, terkait proyek normalisasi Arab Saudi dengan Israel, Muhammad bin Abdul Karim Issa justru menjadi tokoh agama terdepan yang mendukungnya.

“Muhammad bin Abdul Karim Issa adalah *fasad religius* dari proyek normalisasi Muhammad bin Salman dengan Israel,” ungkapnya.

Jokowi ke Ukraina-Rusia, Bukan Misi Perdamaian

Topik percakapan yang berbeda saat Jokowi menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu, membuktikan, misinya bukanlah perdamaian yang dominan.

“Terbukti bukan misi perdamaian yang dominan,” ujar Pengamat Politik Islam dan Militer Dr. Riyan M.Ag. kepada *Mediaumat.id*, Senin (4/7/2022).

“Tetapi lebih pada kepentingan nasional Indonesia yang terkait dengan keamanan pasokan pangan (gandum) dari Ukraina dan permintaan jaminan keamanan Rusia untuk tidak memblokade Ukraina,” sambungnya

menjelaskan.

Maknanya, meski lawatan itu diklaim sebagai bagian dari misi perdamaian oleh Jokowi, dua percakapan tersebut mencerminkan perbedaan kepentingan nasional dan pragmatis di kedua belah pihak.

Apalagi sikap pragmatis tersebut tampak ketika Jokowi menghargai Putin yang mengatakan bahwa Rusia menjamin keamanan pasokan makanan dan pupuk tidak hanya dari Rusia, tetapi juga dari Ukraina.

Diberitakan, Jokowi melakukan kunjungan ke luar negeri, dan bertemu Zelensky di Kyiv, Ukraina pada Rabu (29/6), dan keesokannya bertemu Putin di Istana Kremlin, Moskwa, Rusia.

Tak hanya itu, lanjut Riyan, David Engel, pengamat dari Australia, malah menyebut kunjungan itu sebagai upaya diplomasi *mi instan (noodle diplomacy)*. “Mi instan berbahan tepung terigu dan tepung terigu berasal dari biji gandum (dari Ukraina),” ucap Riyan.

Oleh karena itu, ia pun menduga kepentingan nasional Indonesia yang diklaim atas nama pangan tersebut sangat kuat nuansa kepentingan oligarki di bidang pangan dalam negeri.

“Indonesia adalah importir terbesar gandum Ukraina sebesar 25 persen di 2021. Padahal mayoritas penduduk negeri ini lebih mengonsumsi pangan nasi (beras),” terangnya, seraya mengatakan hal itu sebagai hal yang ironis.

Lantaran itu, meski menyatakan dukungan untuk kerjasama bilateral dengan Indonesia, dan tentunya ingin menarik Indonesia mendukung Rusia, bahkan menawarkan teknologi nuklirnya, sikap Negara Beruang Merah tersebut pun tersirat tidak peduli dengan klaim perdamaian Indonesia.

Apalagi secara konflik, faktanya Rusia lebih mendominasi dibanding Ukraina. Terbukti, setelah Jokowi pulang dari Moskwa, Putin kembali membombardir Ukraina. “Ini adalah gambaran kepentingan nasional Rusia yang tidak ingin dicampuri oleh negara lain, termasuk Indonesia,” pungkasnya. [Joy dan Tim]



ANAKKU, MERDEKAKANLAH DIRIMU...

Arini Retnaningsih

Sore itu kami sedang duduk-duduk di teras. Kakak bercerita, bagaimana teman-temannya saat ini keranjingan K-Pop. Adiknya menimpali, penggemar lagu Barat masih lebih banyak. Film Barat juga masih paling ramai di bioskop. Kakak mengiyakan, lantas bercerita teman-temannya berburu jaket pemusik Barat yang sedang viral. Sang adik bercerita teman-temannya lagi tren mengikuti potongan rambut dan gaya pakaian artis tertentu. Tiba-tiba, si bungsu yang masih berusia 9 tahun saat itu, menyeletuk, "Itu namanya kita masih dijajah."

Kakak-kakaknya sontak tertawa sambil terheran-heran, bagaimana adik kecil kami bisa menganalisis situasi. Ayahnya mengacungkan jempol, "Adik benar sekali."

Merdeka sering dipahami hanya sekadar bebas dari pendudukan negara lain. Indonesia dikatakan telah merdeka 77 tahun lamanya. Namun, menurut Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam kitab *Mafaahim Siyaasiyah*, penjajahan sesungguhnya tidak akan benar-benar berakhir. Kapitalisme akan selalu berupaya menyebarkan paham dan mempertahankan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Metode (*thariiqah*)-nya, menurut Nabhani, melalui penjajahan

(*isti'maaf*). Penjajahan adalah penguasaan (pengendalian) dan dominansi di bidang politik, ekonomi, sosial pendidikan, budaya dan Hankam.

Kondisi inilah yang mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa. Apalagi bila penjajahan pemikiran yang dilakukan Barat berhasil menguasai cara pandang dan cara pikir generasi muda. Tentu akan sangat mudah bagi mereka untuk menguasai semua bidang kehidupan suatu bangsa tanpa perlu melakukan pendudukan fisik.

Kemerdekaan Hakiki

Mencermati kondisi umat Islam umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya, terlihat bahwa kita masih terbelenggu oleh penjajahan. Sistem ekonomi yang kita gunakan adalah sistem kapitalisme yang kita adopsi dari Barat. Sistem ini memaksa kita untuk tunduk menjadi pasar, pemasok sumberdaya alam dan pekerja bagi negara-negara kaya.

Dalam politik, kita pun masih terbelenggu dengan kepentingan asing. Memang para pemimpin kita terpilih melalui mekanisme Pemilu. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kepentingan para pemilik modal dan negara besar di belakang mereka.

Yang paling mengerikan adalah penjajahan di bidang pemikiran dan *tsaqafah*. Kurikulum

yang kita gunakan adalah adopsi dari pemikiran Barat. Begitu pula dasar dari *tsaqafah* yang diajarkan dan disebarluaskan di tengah umat berasal dari pemikiran sekulerisme, liberalisme dan materialisme.

Sistem rusak inilah yang menguasai kita, mengarahkan pemikiran, perasaan dan kecenderungan-kecenderungan tingkah laku kita sehingga tanpa sadar kita sebenarnya tengah dijajah. Padahal sebagai seorang Muslim, semestinya yang menjadi standar dan arah kita adalah akidah Islam.

Dalam Islam, merdeka adalah terbebas dari segala bentuk penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan totalitas hanya kepada Allah SWT. Seorang hamba yang ia tidak tunduk kepada siapapun, tidak mengambil standar dari siapa pun, tidak berhukum dengan hukum siapa pun kecuali hanya hukum Allah semata, berarti ia telah memerdekakan dirinya dengan kemerdekaan yang hakiki.

Lantas, bagaimanakah kita memahamkan

Dalam Islam, merdeka adalah terbebas dari segala bentuk penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan totalitas hanya kepada Allah SWT. Seorang hamba yang ia tidak tunduk kepada siapapun, tidak mengambil standar dari siapa pun, tidak berhukum dengan hukum siapa pun kecuali hanya hukum Allah semata, berarti ia telah memerdekakan dirinya dengan kemerdekaan yang hakiki.

makna kemerdekaan hakiki ini kepada anak-anak kita, agar mereka terbebas dari penghambaan kepada selain Allah?

Akidah Islam

Untuk membentuk standar yang sah dalam berpikir dan bersikap, sedari dini anak harus ditanamkan akidah Islam. Keyakinan bahwa Allah adalah Sang Khalik dapat dibentuk dengan mengajak anak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi, di langit dan di dalam tubuhnya sendiri. Misalnya bagaimana tubuhnya menjalankan proses metabolisme tanpa ia harus mengendalikannya, bahkan ia tidak mampu mengendalikannya.

Ketika anak menyadari posisi Allah sebagai Pencipta, ia akan lebih mudah untuk diarahkan tunduk pada aturan-aturan-Nya dalam al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad saw. Bila sudah sampai pada tahap keyakinan terhadap al-Quran, akan mudah untuk memahamkan anak terhadap cabang keyakinan lain seperti iman pada Hari Akhir, qadha-qadar dan semua yang bercabang dari keyakinan ini.

Dengan iman yang didapat dari proses berpikir, anak akan mampu menjangkau mengapa ia hanya boleh memakai standar dari apa yang Allah tetapkan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Ia sadar bahwa hal ini adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang hamba.

Dalam proses ini kita perlu membiasakan anak untuk mengikatkan diri dengan hukum syariah. Misalnya untuk menyuruh anak shalat, alih-alih kita mengatakan kalau tidak shalat dosa, kita jelaskan bahwa shalat itu perintah Allah, jalan yang Allah berikan agar kita bisa mendapat kasih sayang dan pahala yang besar dari Allah.

Begitu pula bila anak melanggar syariah, misalnya berbohong, alih-alih mengatakan, "Bunda tidak suka kamu berbohong", kita

katakan, “Allah tidak suka hamba-Nya berbohong. Ia melarang kita berbohong kecuali dalam 3 hal: siasat perang, mendamaikan dua saudara Muslim yang berselisih dan kebohongan suami-istri (untuk mengharmoniskan rumah tangga).”

Dengan ucapan-ucapan semacam ini, anak terbiasa bahwa yang dia jalankan adalah perintah Allah, bukan perintah orangtua semata. Begitu pun ketika orangtua melakukan perbuatan tertentu, perlu dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkannya, atau mencintainya atau menginginkan mendapat ridha Allah semata dalam melakukannya. Ketika meninggalkan suatu keburukan, orangtua menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak disukai Allah.

Dengan pembiasaan semacam ini, anak akan lebih mudah memahami standar dalam beramal. Begitu pun ketika memuji anak, kita tidak menggunakan kata-kata: kamu baik, kamu pintar, kamu shalih, ayah/bunda sayang dan sejenisnya yang akan mengarahkan anak pada kecenderungan riya terhadap manusia. Sampaikan bahwa Allah suka, Allah sayang, Allah akan berikan pahala terbaik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan sebagainya untuk mengarahkan anak pada niat yang lurus.

Membentuk Maklumat yang Sahih Tentang Kemerdekaan

Merdeka berarti bebas untuk mengekspresikan ketundukan kepada Allah semata. Ia tidak tunduk pada keinginan orang lain, tidak tunduk pada norma dan aturan yang lain, dan tidak tunduk pada tren atau gaya hidup tertentu yang viral, selama semua itu tidak sesuai dengan rambu-rambu dari Allah.

Pemahaman seperti ini bisa disampaikan melalui cerita, diskusi atau dialog dengan anak sehingga tidak ada kesan menggurui yang menyebabkan anak menolak. Sebagai contoh kita bisa menceritakan keberanian dan

ketegasan Ruba’i bin Amir berikut:

Menjelang Perang al-Qadhiyah, Ruba’i bin Amir dikirim oleh panglima tentara Islam ketika itu, Saad bin Abi Waqqash, untuk menghadap panglima tentara Persia, Rustum. Ketika Ruba’i masuk ke dalam perkemahan Panglima Rustum, ia hanya berpakaian sederhana. Dengan menunggang kuda pendek dan menyandang senjata serta perisai, ia masuk tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Ia tidak peduli dengan kemewahan pakaian dan mahkota Rustum. Tidak peduli dengan permadani dan bantal-bantal bertenun benang emas yang dihamparkan. Ia tidak merasa rendah diri di hadapan semua itu karena ia membawa misi yang lebih mulia, meninggikan kalimat Allah.

Rustum lantas bertanya apa yang membuat kaum Muslim datang ke Persia. Ruba’i menjawab tegas, *“Allah SWT memerintahkan kami untuk memerdekakan manusia dari menghambakan diri kepada selain Allah dan melepaskan belenggu duniawi menuju dunia bebas, dan dari agama yang sesat menuju keadilan Islam.”*

Kisah Ruba’i ini membawa pelajaran besar bagi kita dan anak-anak kita, bagaimana seorang hamba yang merdeka, ia tidak lagi diperhamba keinginan akan materi dan kedudukan. Ia tidak akan menundukkan dirinya pada orang berharta atau para pembesar negara. Karena itu ia tidak akan segan berdiri di hadapan mereka untuk menyampaikan nasihat dan kebenaran.

Seorang hamba yang merdeka, tidak akan diperbudak harta, menghabiskan waktu dan tenaganya hanya sekadar mencari harta dan menimbunnya. Ia tidak akan diperbudak kedudukan dan jabatan sehingga rela melakukan segala cara untuk meraihnya.

Seorang hamba yang merdeka tidak akan diperhamba hawa nafsunya. Ia tidak akan memilih untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah seperti pacaran, menikah dengan laki-laki yang berbeda agama, selingkuh dan sebagainya.

Seorang hamba yang merdeka tidak akan diperhamba aktor idola sehingga memujanya, merindukannya, atau meniru habis-habisan semua gaya idolanya. Ia pun tidak akan diperhamba tren sehingga harus ikut-ikutan dan terus *update* penampilan.

Seorang hamba yang merdeka tidak akan diperhamba oleh kriteria cantik itu putih, berambut indah, bertubuh seksi dan seterusnya dari kriteria kecantikan kapitalis. Ia kembali pada standar bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa (QS al-Hujurat [49]:13).

Jika anak telah memiliki maklumat yang sahih terhadap makna kemerdekaan, ia akan mampu untuk menilai fakta dan menyikapinya dengan tepat sebagaimana yang telah Allah gariskan untuk dirinya.

Melatih Anak Membaca Fakta secara Kritis

Ketika anak telah memiliki maklumat yang benar tentang kemerdekaan hakiki, maka kita tinggal melatihnya untuk menggunakan maklumat tersebut sebagai standar dalam berpikir, bersikap dan berperilaku. Terutama bagaimana anak harus menilai fakta yang dia hadapi.

Anak harus banyak kita ajak berdialog dan berdiskusi tentang fakta-fakta di hadapannya. Memunculkan suasana sebagaimana diceritakan dalam pengantar tulisan ini, memungkinkan anak untuk melakukan analisis terhadap fakta sehingga ia bisa mengambil sikap yang tepat.

Fakta bisa kita ambil dari berita-berita di tv, medsos, yuoutube dan sebagainya.

Seorang hamba yang merdeka tidak akan diperhamba aktor idola sehingga memujanya, merindukannya, atau meniru habis-habisan semua gaya idolanya. Ia pun tidak akan diperhamba tren sehingga harus ikut-ikutan dan terus *update* penampilan. Seorang hamba yang merdeka tidak akan diperhamba oleh kriteria cantik itu putih, berambut indah, bertubuh seksi dan seterusnya dari kriteria kecantikan kapitalis. Ia kembali pada standar bahwa orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa (QS al-Hujurat [49]:13).

Tunjukkan fakta-fakta bahwa saat ini kondisi umat Islam berada dalam cengeraman penjajahan yang tak terlihat oleh mata umum. Namun, bahaya yang tersembunyi mengancam kebebasan umat dalam menjalankan agamanya secara benar. Fakta juga bisa dapat dengan melakukan analisis terhadap film, musik, game, fashion dan hal-hal yang menarik bagi anak, namun mengandung muatan merusak yang sangat dahsyat bagi pemikiran dan sikapnya.

Inilah beberapa kiat untuk memahamkan anak akan penjajahan asing yang membelit umat. Dengan memahaminya, anak akan mampu meraih kemerdekaan hakiki, serta tumbuh menjadi generasi pembebas umat.

Yang penting kita catat, upaya ini membutuhkan kondisi orangtua yang memiliki kesadaran politik tinggi, memahami ideologi Islam dan keunggulannya serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya dalam kehidupan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. □

Ustadz H. Ismail Yusanto: **IDENTITAS POLITIK ISLAM ITU WAJIB**

Pengantar Redaksi:

Meski Pilpres dan Pilkada masih jauh, dunia politik di Tanah Air sudah diramaikan dengan narasi 'politik identitas'. Apa sebetulnya politik identitas? Apa bedanya dengan identitas politik yang sejatinya akan selalu ada pada partai politik manapun? Apa target dan tujuan dari upaya mengembangkan terus narasi tersebut? Mengapa sasaran narasi 'politik identitas' selalu kelompok Islam dan kaum Muslim? Apa sikap kita seharusnya dalam merespon narasi tersebut?

Itulah di antara sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh *Redaksi* kepada **Ustadz H. Ismail Yusanto** kali ini. Berikut ini jawaban dan penjelasan beliau.



Aktivist, kelompok atau ormas Islam sering dituduh menggunakan politik identitas. Benarkah demikian, Ustadz?

Ya. Benar sekali. Setiap kali bicara tentang agama (Islam) atau aspirasi umat Islam, dan dengan Islam itu lalu kita menginginkan pengaturan negeri ini didasarkan, pasti segera kita dituding seperti itu. Dulu dengan istilah primordial atau dituding hanya mementingkan kelompoknya saja. Kini dengan istilah politik identitas. Karena itu tidak sedikit orang yang

kemudian menghindar diri dari terlalu tampak membela Islam karena jengah dengan tudingan semacam itu.

Namun, benarkah keinginan seperti itu artinya telah menggunakan politik identitas? Apa itu identitas atau politik identitas sebenarnya?

Menurut *KBBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jatidiri.

Manusia yang memiliki identitas adalah mereka yang menyadari tanda khusus atau ciri-ciri yang melekat pada dirinya.

Adapun politik identitas, dikutip dari *Wikipedia*, adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jatidiri kelompok itu. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrem. Tujuannya untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Berdasarkan dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa politik identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik tubuh, kepercayaan dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas dari seseorang. Contoh terkenal adalah politik apartheid di Afrika Selatan yang membagi warganya menjadi dua golongan berdasarkan ciri fisik, yakni mereka yang berkulit hitam dan yang berkulit putih.

Di Indonesia politik identitas sering didasarkan pada kepercayaan, agama dan suku bangsa, yang digunakan untuk meraih tujuan politik, termasuk untuk menjegal lawan politik.

Di sisi lain, tatkala musim kampanye tiba, banyak parpol dan caleg yang menggunakan "identitas" Islam bahkan kedaerahan. Apakah ini bisa disebut politik identitas?

Itulah politik identitas yang sebenarnya. Mereka memanfaatkan identitas agama (Islam) dalam pakaian seperti peci, baju koko, kerudung, atau dalam acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. untuk kepentingan politiknya. Setelah kekuasaan didapat, bukan hanya simbol-simbol itu ditanggalkan, bahkan Islam dan

umat Islam yang semula didekati pun lalu dijauhi, bahkan dimusuhi.

Benarkah tampak ambiguitas dalam mendefinisikan politik identitas?

Iya. Jelas sekali. Itu bergantung pada sudut pandang dan kepentingan di balik itu. Politik identitas memang bisa berdampak negatif, seperti memunculkan sentimen negatif antarsuku, ras, golongan dan agama. Ini akan mengganggu hubungan antarmanusia, menghambat proses asimilasi dan integrasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan, menyebabkan terjadinya diskriminasi, menimbulkan konflik antarkelompok.

Namun, politik semacam itu juga bisa berdampak positif. Di antaranya: memperkuat kohesivitas kelompok, memunculkan kesetiaan terhadap cita-cita bersama, membangkitkan semangat perjuangan, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya.

Sebenarnya sangat aneh jika ini hari hal seperti ini dipersoalkan. Bukankah hal biasa jika orang punya aspirasi berdasar identitas, seperti tuntutan kesetaraan jender yang berdasar identitas kelamin? Jika aspirasi berdasar identitas kelamin, suku, bahkan orientasi seksual mesti diterima sebagai kewajiban, mengapa jika berdasar identitas agama (Islam) menjadi tidak boleh?

Apalagi faktanya adanya partai politik berbasis agama atau *religious political party* merupakan fenomena biasa di dunia, baik di negara-negara yang meresmikan agama tertentu sebagai identitas negara, seperti Israel, Pakistan, dan Afghanistan, maupun di negara-negara sekuler seperti Jerman dan Belanda. Di Jerman ada partai Kristen (Christian Democratic Union - CDU). Bahkan partai yang didirikan pada tahun 1950, sebagai tempat berkumpulnya semua pemilih konservatif

Kristen di sana, menjadi kekuatan politik paling dominan dan telah memimpin Jerman lebih dari 50 tahun, hingga sekarang. Dalam Pemilu di Eropa tahun 2019 mereka mendapat 28,9%. Dalam Pemilu Jerman tahun 2017 mereka mendapat 33% (246 kursi).

Penelitian Nancy L Rosenblum dari Harvard University terhadap partai-partai berbasis agama dan etnis di Eropa dan Turki menunjukkan bahwa munculnya partai-partai berbasis agama dan etnis ke dalam arena politik berkontribusi pada konsolidasi rezim demokrasi. Jika demikian, mengapa di Indonesia yang mayoritas Muslim aspirasi berdasar Islam malah dipersoalkan? Jika tidak lagi boleh menggunakan Islam, lalu umat Islam mesti menggunakan identitas apa untuk memperjuangkan aspirasi Muslim di negeri ini?

Bila demikian, apakah jargon politik identitas itu sejatinya untuk mengkriminalisasi dakwah syariah kaaffah? Apa targetnya?

Iya. Tampak sekali kecenderungan ke arah sana. Jika benar mereka mengakui prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi, mestinya apa saja aspirasi rakyat itu, termasuk jika berdasar Islam, haruslah diterima. Faktanya, kini malah makin gencar dikampanyekan penolakan dengan aneka sebutan: radikal-radikul *lah*, fundamentalis *lah*, garis keras *lah*, termasuk sebutan politik identitas. Targetnya, supaya orang merasa bersalah sehingga tidak lagi menggunakan Islam dalam berpolitik atau tak lagi getol memperjuangkan aspirasi Islam karena dianggap buruk. Akibatnya, politik Islam makin tersisih.

Siapa saja yang diuntungkan dengan kampanye ini?

Siapa lagi kalau bukan kelompok sekuler dan pembenci Islam. Mereka tahu, kekuatan potensial yang bakal menghadang kepentingan

politik mereka, seperti yang mereka alami dalam Pilkada DKI tahun 2017 lalu, adalah politik Islam. Karena itulah mereka berusaha keras menghancurkan kekuatan potensial itu dengan gencar mengkampekan penolakan terhadap politik identitas. Dengan cara itu, di satu sisi, mereka bisa mengeliminasi kekuatan Islam dalam kontestasi politik. Di sisi lain acap mereka juga memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mereka.

Sejatinya bagaimana seharusnya hubungan Islam versus politik? Politik berdasarkan Islam atau politisasi Islam?

Seorang Muslim sewajarnya, bahkan semestinya, menjadikan Islam sebagai dasar dalam berpolitik, karena Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Jika politik adalah pengaturan urusan rakyat maka pengaturan yang baik itu mestilah berdasar Islam. Andai sekalipun pun politik diartikan sebagai seni meraih kekuasaan (*the art of getting power*), maka cara untuk meraih kekuasaan juga haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Ketika kekuasaan didapat, harus pula digunakan untuk dan dijalankan sesuai ajaran Islam pula. Inilah yang disebut islamisasi politik.

Sebaliknya, orang-orang sekuler menjadikan Islam untuk kepentingan politik. Sadar besarnya pengaruh pesantren dan kiainya terhadap konstituen, misalnya, maka jelang Pemilu berbondong-bondong datanglah mereka ke pesantren, berpakaian ala pesantren, berlagak seperti orang pesantren, berucap dengan bahasa pesantren. Partai sekuler pun ramai-ramai bikin organ sayap yang berbau Islam. Dulu pada masa Orde Baru ada Satkar Ulama Golkar, ada GUPPI dll. Cara seperti itu kini dipakai juga. Lihat saja, sebagai contoh, di PDI-P ada Baitul Muslimin. Semua itu dilakukan bukan karena mereka benar-benar hendak memperjuangkan Islam, tetapi sekedar

guna meraih simpati dari pemilih Muslim sehingga suara dalam pemilu bisa meningkat. Setelah kekuasaan didapat, mereka acap bertindak bertentangan dengan Islam, seperti penolakan terhadap RUU Miras, juga terhadap masuknya kata iman dan takwa dalam tujuan pendidikan nasional dan lain sebagainya. Inilah yang disebut politisasi Islam.

Jadi, apa bedanya islamisasi politik dengan politisasi Islam?

Politisasi Islam sekadar memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik. Kepentingan politik mereka sejatinya tak ada kaitannya dengan Islam. Sebaliknya, islamisasi politik adalah kegiatan politik berdasarkan Islam dan dilakukan untuk memberi manfaat bagi kemajuan Islam. Inilah politik Islam yang sebenarnya. Berpolitik untuk ibadah.

Sering dikampanyekan jika politik berdasar syariah Islam itu akan

Politisasi Islam sekadar memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik. Kepentingan politik mereka sejatinya tak ada kaitannya dengan Islam. Sebaliknya, islamisasi politik adalah kegiatan politik berdasarkan Islam dan dilakukan untuk memberi manfaat bagi kemajuan Islam. Inilah politik Islam yang sebenarnya. Berpolitik untuk ibadah.

berdarah-darah, terjadi pemaksaan kehendak agama/kepentingan, Indonesia akan pecah dan stigma buruk lainnya. Betulkah?

Itulah cara mereka untuk mendiskreditkan Islam. Mengembangkan pandangan buruk tentang politik Islam dan menimbulkan perasaan takut terhadap Islam di tengah publik. Inilah yang disebut monsterialisasi Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jelas bukan monster. Namun, mereka mencitrakan seolah Islam itu menyeramkan bagaikan monster.

Karena itu penting melawan kampanye buruk ini, dengan penjelasan yang jelas dan tegas. Misalnya, mengapa kita menginginkan Islam sebagai dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Mengapa harus Islam? Memang ini soal identitas dan bagaimana kita memaknai identitas itu. Buat sebagian orang, mungkin identitas Islam itu dianggap sekadar sebuah label, yang tidak terlalu penting, yang karena itu bisa dipakai dan ditanggalkan setiap saat. Namun, bagi Muslim sejati, Islam itu adalah cara pandang. Jika ia sebuah identitas, maka itu identitas yang sangat penting dan mempunyai makna yang amat mendalam.

Lagi pula, jika keprihatinan kita kepada berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara disebut sebagai kepedulian, maka dengan tawaran Islam sebagai solusi, membuat kepedulian ini bukan sembarang kepedulian, melainkan kepedulian yang bersifat transendental.

Mengapa kepedulian transendental itu penting? Karena dengan kepedulian itu kita juga ingin sekaligus beribadah dan mendapatkan berkah. Disebut ibadah, karena kepedulian itu merupakan perwujudan ketaatan kita kepada Sang Pencipta dengan sebuah keyakinan, bahwa dengan Islam berbagai problematika yang dihadapi negeri ini,

juga dunia, akan bisa teratasi dengan baik. Tentu karena Allah SWT memang menetapkan Islam dengan aturannya itu sebagai jalan atau cara untuk kita menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan sebaik-baiknya.

Apa yang akan terjadi jika politik berlandaskan Islam atau negara mengatur sesuai syariah Islam?

Ini soal *output* apa yang bakal didapat ketika Islam dijadikan dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Output* yang didapat pastilah sebuah kebaikan. Kita harus menjelaskan dan meyakinkan publik, bahwa negeri ini, dan apa saja yang diatur dengan Islam, akan diliputi keberkahan. Melalui sebuah hadis qudsi, Allah SWT menyatakan (yang artinya): *Jika Aku ditaati, Aku ridha. Ketika Aku ridha, Aku berkah.* Jadi, dengan taat, Allah SWT akan ridha, dan dengan ridha, berkah akan kita bisa raih.

Berkah menurut bahasa sebagaimana disebut dalam Kamus *al-Munawwir* (1997) berasal dari kata *al-barakah*. Artinya nikmat. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), *berkah* artinya “karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia”. Soal bagaimana berkah ini didapat, lebih jauh dijelaskan al-Quran surah al-A’raf ayat 96.

Jadi, dengan Islam berkah akan didapat. Ini bukan sembarang keyakinan. Jika keyakinan umumnya bersifat subyektif, maka ini jenis keyakinan yang obyektif. Artinya, kebaikan yang bakal ditimbulkan oleh Islam bisa diuji, dikaji dan diteliti.

Misal, soal riba. Bisa dikaji, manakah sistem ekonomi keuangan yang lebih baik, yang dengan riba atukah yang tanpa riba. Bila diyakini bahwa riba itu sumber labilitas ekonomi, keyakinan semacam ini juga bisa dikaji dan diteliti, apakah benar begitu. Obyektivitas itulah yang akan menepis

tudingan bahwa perjuangan Islam itu hanya demi kepentingan kelompok, dan karena itu pantas disebut sebagai politik identitas.

Islam itu risalah universal, bukan lokal apalagi individual. Kebaikan atau keberkahan Islam itu juga pasti bersifat universal. Tidak mungkin bersifat personal. Itu pula yang diyakini oleh para *founding father* kita dulu ketika menyatakan bahwa kemerdekaan ini “atas berkat rahmat Allah”. Jika kemerdekaan itu diyakini atas berkat rahmat Allah, lantas siapa yang mendapatkan keberkahan dari kemerdekaan itu? Apakah hanya orang Islam saja?

Sayang sekali, dalam konteks pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kata berkah itu kini hampir-hampir tak lagi disebut kalau tidak boleh dikatakan sudah dilupakan sama sekali. Padahal, mengingat pentingnya berkah, semestinya ke sanalah pembangunan negara diorientasikan. Wajar belaka bila kemudian negeri ini tak pernah surut dirundung berbagai duka dan luka. Pihak yang menyerukan penerapan Islam malah dipersekusi, dituding radikal dan sekarang ditambah dengan tuduhan menggunakan politik identitas.

Apa yang dilakukan oleh umat agar tidak terjebak dengan kampanye hitam politik identitas?

Pemahaman dan kesadaran. Itulah kunci umat terhindar dari kampanye hitam itu. Harus dipahami bahwa memperjuangkan Islam hingga bisa menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa disebut tindakan mementingkan kelompok atau mengembankan politik identitas, apalagi radikal. Justru hal itu menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap keadaan negara dan masa depannya, sekaligus memberikan solusi atas segala problematika sehingga mendatangkan keberkahan bagi semua. □

POLITIK UMAT ISLAM INDONESIA MASA KEMERDEKAAN

Septian AW

(Sejarahwan Institut Literasi Khilafah dan Indonesia-ILKI)

This compromise, known as the Jakarta Charter, fell apart within a day of the proclamation of independence, a near miss that left the constitution without any references to Islam. The failure showed the limits of political Islam in Indonesia at the start of the revolution. Kevin W. Fogg, *Indonesia's Islamic Revolution*, (2020)¹

Preferensi politik bangsa Indonesia yang menginginkan tegaknya syariah Islam, juga negara yang berdasarkan Islam, bukanlah hal tabu ataupun mengada-ada. Keinginan tersebut bahkan menjadi dinamika historis. Pernah muncul pada periode sekitar kemerdekaan tahun 1945. Munculnya keinginan ini merupakan konsekuensi logis. Sebabnya, hampir seluruh penduduk Indonesia adalah Muslim. Mereka pun memiliki peran besar bagi kemerdekaan Indonesia.

Saat bersamaan, agama Islam telah dominan menjadi spirit perjuangan bangsa Indonesia. Kevin W. Fogg dalam bukunya, *Indonesia's Islamic Revolution*, mengamini bagaimana Islam telah mengilhami perjuangan bangsa ini di seluruh daerah di Indonesia.²

Tegasnya, Islam telah menjadi identitas

perlawan terhadap penjajah kafir. Ini seperti yang dijelaskan oleh sejarahwan George Mc Turnan Kahin, "Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa. Ia benar-benar merupakan semacam simpul kelompok untuk melawan pengacau asing dan penindas agama yang berbeda."³

Tidaklah mengherankan jika ada aspirasi politik yang menginginkan agar Islam tegak sebagai panduan kehidupan. Fakta tersebut tercatat jelas dalam sejarah Indonesia. Kontestasi politik soal Islam sebagai dasar negara sudah ada sejak masa penjajahan. Intensitasnya semakin meningkat dalam perdebatan sengit di BPUKI dan Sidang Konstituante. Sebelum akhirnya muncul masa Demokrasi Terpimpin yang menjadi babak awal pembungkaman aspirasi politik Islam di Indonesia.

Persoalan Islam dan Negara

Rivalitas ideologi telah terjadi inter bangsa Indonesia kala negeri ini masih dijajah Belanda maupun Jepang. Rivalitas ini mendorong munculnya preferensi politik yang berbeda. Sebagian menginginkan agar kelak Indonesia merdeka didasari atas netral agama. Mayoritas

umat Islam yang lain bercita-cita agar Islam dijadikan sebagai dasar negara.

Perdebatan yang terjadi antara Natsir dan Soekarno mewakili betapa tegangnya polaritas ideologi ketika itu. Keduanya berpolemik tentang relasi Islam dan negara. Polemik tersebut dimulai dari tulisan-tulisan Soekarno dalam majalah *Panji Islam* yang menyebutkan agama dan negara harus dipisahkan. Soekarno yang menjadi representasi ideologis sekuler tidak hanya mengeluarkan pernyataan yang menggandung kontroversi. Ia juga memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal di Turki.⁴

Sebaliknya, Natsir, yang mewakili garis ideologis Islam, berpandangan bahwa perlu ada integrasi agama dengan negara (tidak ada pemisahan agama dengan negara). Hukum-hukum Islam, dengan kelebihan yang ia miliki, tidak akan mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mutlak diperlukan adanya kekuatan eksekutif atau negara yang melaksanakannya.⁵

Dalam konteks relasi agama dan negara tersebut, Ahmad Suhelmi menemukan setidaknya empat hal pokok yang didalilkan Natsir atas pentingnya integrasi atau kesatuan agama dengan negara, yaitu: Islam sebagai ideologi, Negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk Negara Islam.⁶

BPUPKI dan Piagam Jakarta

Perdebatan yang sudah terjadi pada masa sebelumnya memuncak pada saat perumusan dasar negara di *Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI) yang dibuat Jepang. Meski mendapat tantangan yang kuat dari kalangan sekularis, usaha-usaha untuk memajukan Islam sebagai dasar negara tetap dilakukan.

Melalui BPUPKI, Soekarno mendesak agar pandangannya tentang negara yang bebas dari agama disetujui. Pada pidatonya tanggal 1 Juni

1945, dia mengemukakan doktrin Pancasila yang akan menjadi falsafah resmi Indonesia merdeka. Akan tetapi, para ulama dan tokoh Islam merasa tidak senang dengan manuver politik tersebut karena melihat Islam akan tersisihkan. Akhirnya, pada 22 Juni 1945, BPUPKI menyetujui suatu kompromi yang disebut Piagam Jakarta yang menyebutkan bahwa negara akan didasarkan atas “ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁷

Implikasi Piagam Jakarta terhadap hubungan antara Islam dan negara menjadi sumber polemik sengit pada tahun-tahun setelahnya.

Kemunculan politik kompromistik mengindikasikan tersisahnya kekuatan Islam dalam BPUPKI. Adanya kompromi itu juga masih menyisakan kekecewaan pada sebagian ulama yang tergabung di sana. Ki Bagus Hadikusumo, misalnya, tidak menyetujui rumusan tersebut. Ia menyarankan agar kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan.⁸

Intrik politik untuk membatasi aspirasi politik Islam ditenggarai sudah terjadi sejak awal Jepang membentuk BPUPKI. Dalam susunan anggota yang ditetapkan, keterwakilan kalangan Islamis amatlah minim. Hanya ada lima belas orang atau hanya seperempat saja dari jumlah keseluruhan anggota. Ini adalah prosentasi yang amat rendah. Minimnya jumlah tersebut ada kaitannya dengan kebijakan Jepang yang membatasi kekuatan politik Islam pada masa akhir pemerintahannya di Indonesia.⁹

Hambatan untuk mewujudkan aspirasi politik Islam di Indonesia kembali terjadi. Pada 18 Agustus 1945, atau satu hari setelah Proklamasi, sebuah panitia kecil yang dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta memutuskan penghapusan tujuh kata *dengan kewajiban menjalankan syariat*

Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Ketujuh kata tersebut dihapus dengan dalih adanya keberatan golongan Protestan dan Katolik yang menganggap itu diskriminatif terhadap golongan minoritas.¹⁰

Semua pembicaraan menjadi sia-sia. Konstitusi yang disusun BPUPKI tidak pernah diberlakukan. Indonesia merdeka sesungguhnya menjadi negara sekuler yang di dalamnya tidak ada persoalan mengenai pelaksanaan syariah Islam. Kompromi politik yang dikenal Piagam Jakarta gagal ditetapkan sebagai landasan konstitusi dalam satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan dilakukan. Kegagalan ini semakin menjauhkan Islam dalam urusan politik, sekaligus juga menunjukkan lemahnya politik Islam Indonesia pada saat itu.¹¹

Majelis Konstituante dan Dekrit Presiden 1959

Perjuangan politik untuk penegakan Islam sebagai dasar negara tak kunjung surut setelah BPUPKI dan PPKI. Perjuangan dilanjutkan dalam pentas politik Pemilu pertama tahun 1955, juga pada sidang-sidang di Majelis Konstituante walaupun pada akhirnya dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Meskipun partai-partai Islam tidak berhasil memenangkan mayoritas dalam Pemilu 1955, mereka terus memperjuangkan aspirasi Islam dalam Majelis Konstitusi 1956–1959. Para politisi yang mewakili kepentingan Islam dalam badan ini mengajukan banyak argumen mengapa Islam harus dijadikan dasar negara. Mereka juga berusaha meyakinkan Majelis bahwa Islam akan menjadi yang terbaik untuk Indonesia dan membawa kemakmuran negara.¹²

Dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh Islam seperti A. Kahar Mudzakkir, Kasman Singodimedjo, Natsir dan M. Isa Anshari menekankan bahwa Islam seharusnya menjadi dasar negara. Selama ini mereka

merasa ditipu oleh hasil politik pada Agustus 1945. Untuk memenangkan Majelis mereka mengusulkan pentingnya “pengaktifan” kembali Piagam Jakarta. Abdul Kahar Muzakir, salah satu anggota Komite Sembilan yang menyepakati Piagam Jakarta, dalam pidatonya di Majelis Konstituante berkata:

“Saudara Ketua, akan tetapi apa lacur pada tanggal 18 Agustus 1945? Semua prinsip-prinsip yang baik dan luhur itu oleh PPKI telah diubah, dicoret-coret dan dihapuskan dari mukadimah dan UUD. Itulah sebabnya ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu dikebiri.

Kalau saya tidak mengatakan demikian. Akan tetapi, Pancasila itu sudah dirusak! Sebab, prinsip-prinsip yang mendatangkan moral yang luhur dengan adanya Pancasila Piagam Jakarta itu telah hilang dari wujud Pancasila, yang tadinya merupakan *agreement* itu telah dicerderai dengan sengaja.”¹³

Sayang, usaha mereka untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara melalui Majelis Konstituante mengalami jalan buntu. Perdebatan sengit antara kelompok sekuleris dan Islamis *deadlock*. Kondisi tersebut disegel langsung oleh Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut merupakan penanda bahwa Majelis Konstituante resmi dibubarkan dan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali.

Pembubaran Majelis Konstituante menjadi penanda masa Demokrasi Terpimpin dimulai. Saat itu kekuasaan, keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yakni Soekarno. Ruang politik untuk menyuarakan Islam sebagai dasar negara mulai tertutup. Apalagi pada 17 Agustus 1960 Soekarno membubarkan Partai Masyumi.

Setelah pemerintahan Soekarno lengser dan memasuki masa Orde Baru, pembicaraan

tentang Islam Politik semakin dipersulit. Steriotip negatif dan tindakan refesif kerap didapatkan oleh para politisi ataupun aktivis gerakan yang lantang menyerukan penegakan syariah Islam.

Meninjau Ulang Sikap Kompromistik

Banyak hikmah yang bisa diambil dari perjalanan “ijtihad politik” kompromistik yang dilakukan oleh para ulama dan tokoh Islam pada masa lalu. Tentu saja kesungguhan dan kegigihan mereka dalam menegakan politik Islam di Indonesia harus menjadi teladan bagi Muslim Indonesia kontemporer. Cita-cita penegakan syariah Islam adalah warisan sejarah Indonesia yang factual, pernah terjadi, tidak mengada-mengada dan perlu dilestarikan sebagai perjuangan yang berkelanjutan.

Namun, di sisi lain perlu juga mengambil pelajaran bahwa berkompromi dengan kalangan sekuleris sama sekali tidak pernah menguntungkan kepentingan Islam. Berkali-kali penghianatan politik terjadi. Dalam konteks dinamika kontemporer, justru kecenderungan para politisi sekuler hanya memanfaatkan umat Islam sebagai tangga kekuasaan dalam even berkala seperti Pemilu. Setelahnya tentu saja aspirasi politik umat dilupakan.

Oleh karena itu, umat Islam perlu mempertegas batas perbedaan politik mereka dengan kalangan sekuleris. Mereka juga memiliki agenda politik sendiri yang mencita-citakan tegaknya syariah Islam di Indonesia. Indikator keberhasilan politik Islam bukanlah sukses berdamai dengan sekulerisme ataupun mengompromikan kepentingan politik pragmatis, namun indikator keberhasilannya adalah tegaknya hukum Islam di Indonesia (sesuatu yang dulu pernah terjadi di masa Kesultanan-kesultanan Nusantara). Sesungguhnya perjuangan ini belum selesai dan masih berkelanjutan.

Wallâhu a 'lam. □

umat Islam perlu mempertegas batas perbedaan politik mereka dengan kalangan sekuleris. Mereka juga memiliki agenda politik sendiri yang mencita-citakan tegaknya syariah Islam di Indonesia. Indikator keberhasilan politik Islam bukanlah sukses berdamai dengan sekulerisme ataupun mengompromikan kepentingan politik pragmatis, namun indikator keberhasilannya adalah tegaknya hukum Islam di Indonesia (sesuatu yang dulu pernah terjadi di masa Kesultanan-kesultanan Nusantara). Sesungguhnya perjuangan ini belum selesai dan masih berkelanjutan.

Catatan kaki:

- ¹ Fogg, Kevin W., *Indonesia's Islamic Revolution* (Cambridge: Cambridge UP, 2020), hlm. 21.
- ² *Ibid.*, hlm. 18.
- ³ Kahin, G. McT., *Nationalism and Revolution in Indonesia* (New York: Cornell UP, 1952), hlm.38.
- ⁴ Formichi, Chiara, “Mustafa Kemal's Abrogation of the Ottoman Caliphate and its Impact on the Indonesian Nationalist Movement”, dalam *Demystifying The Caliphate*, ed. Madawi Al-Rasheed, (New York: Oxford UP, 2015), hlm. 104.
- ⁵ Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Naatsir* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 99.
- ⁶ *Ibid.*, hlm. 90.
- ⁷ Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (New York: Palgrave Macmillan, 20008), hlm. 246.
- ⁸ Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 34.
- ⁹ Fogg, Kevin W., *Indonesia's Islamic Revolution*, hlm. 132.
- ¹⁰ Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, hlm. 51.
- ¹¹ Fogg, Kevin W., *Indonesia's Islamic Revolution*, hlm. 21.
- ¹² Fogg, Kevin W., *Indonesia's Islamic Revolution*, hlm. 223.
- ¹³ Yusran R., *Debat dasar negara Islam dan Pancasila, Konstituante 1957* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2001), hlm. 95.

POLITIK ISLAM UNTUK SEMUA

Muhammad Taufik NT

Islam adalah agama sempurna sekaligus sistem hidup yang meliputi segala perkara yang dihadapi oleh umat manusia (Lihat: QS an-Nahl [16]: 89).

Penjelasan al-Quran adakalanya dinyatakan secara jelas (*sharâhat[an]*). Adakalanya mengacu pada Sunnah Nabi saw., Ijmak Sahabat, Ijtihad atau Qiyas. Adakalanya pula dengan menjelaskan kaidah-kaidah global, tujuan-tujuan umum dan pokok-pokok perundang-undangan.

Politik termasuk hal yang diatur oleh Islam. Politik (*as-siyasâh*) berakar dari kata *sâsa-yasûsu-siyâsat[an]*. Artinya: mengatur, memimpin, memelihara dan mengurus suatu urusan. Dalam Islam politik bukan menitikberatkan pada perebutan kekuasaan, namun pada pengaturan urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam, baik di dalam maupun di luar negeri.

Politik dilaksanakan oleh negara dan rakyat. Negara secara langsung melakukan pengaturan ini dengan hukum-hukum Islam. Rakyat mengawasi, mengoreksi dan meluruskan negara jika menyimpang dari Islam. Gambaran ini diungkapkan oleh Ibnu Qutaibah (w. 276H): *“Perumpamaan antara Islam, kekuasaan dan rakyat adalah laksana tenda besar, tiang dan*

tali pengikat serta pasaknya. Tenda besarnya adalah Islam. Tiangnya adalah kekuasaan. Tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Satu bagian tidak akan baik tanpa bagian yang lainnya.”

Keberadaan tiang (kekuasaan/negara), tali dan pasak (rakyat) adalah sebagai penopang untuk menegakkan tenda (Islam). Jika tenda (Islam) tegak, maka dia akan menaungi siapa saja yang berada di bawahnya, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.

Bukan untuk Kelompok Tertentu

Kadang muncul kekhawatiran pada sebagian pihak bahwa politik Islam akan menjadikan dominasi kelompok tertentu, lalu menzalimi kelompok lain. Apalagi non-Muslim. Jika berkaca pada realitas politik dalam kapitalisme-sekulerisme niscaya kekhawatiran itu sangat beralasan. Namun, jika berkaca pada Islam, lalu negara dan rakyat memiliki kesadaran politik yang islami, tentu hal tersebut bisa dihindari.

Secara manusiawi, adanya kecenderungan hati kepada sebagian kelompok adalah wajar. Tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi, kecenderungan tersebut tidak boleh menjadikan adanya kebijakan yang tidak adil kepada rakyat. Abdullah bin Rawahah ra. saat

diutus untuk menghitung hasil kebun-kebun Khaibar, dan beliau hendak disuap oleh Yahudi Khaibar, beliau berkata:

«يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ أَبْغَضِ خَلْقِ
اللَّهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أُحِيفَ عَلَيْكُمْ.
فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا
نَأْكُلُهَا»

Wahai kaum Yahudi! Demi Allah, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Meski demikian, kebencianku tidak akan membuatku berbuat lalim kepada kalian. Adapun semua perhiasan yang kalian berikan kepadaku sebagai suap, itu semua adalah haram, dan kami tidak memakan itu (HR Malik, ath-Tabharani, Abdur Razzaq).

Islam telah mengharamkan fanatisme kelompok maupun kesukuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

«وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَعْصِبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ
يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقَتِيلٌ فَقَتِيلَةٌ
جَاهِلِيَّةٌ»

Siapa saja yang berperang di bawah bendera kefanatikan, marah karena fanatik kesukuan atau menyerukan kefanatikan atau menolong (berperang) karena kefanatikan, kemudian dia terbunuh, maka matinya seperti mati jahiliah (HR Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Bintu Watsilah Ibnul Asqa' pernah mendengar bapaknya bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, 'ashabiyah (fanatik kesukuan) itu apa?" Beliau menjawab, "Engkau menolong kaummu dalam kezaliman."

Jika kepala negara membuat kebijakan yang berpotensi menguntungkan kelompok tertentu serta menyulitkan kelompok Islam yang lain,

maka rakyat—terutama ulama—dituntut mengambil peran politik, yakni dengan menasihati penguasa. Khalifah Abu Ja'far al-Manshur pernah menyampaikan keinginannya kepada Imam Malik bin Anas untuk menyeragamkan kaum Muslim dengan kitab *Muwaththa*'-nya. Imam Malik menolak dan menasihati Khalifah agar jangan melakukan itu. Padahal kebijakan Khalifah ini berpotensi 'menguntungkan' Imam Malik, namun akan menyulitkan mazhab lainnya.

Sebaliknya, jika sebagian rakyat ingin mempengaruhi negara agar membuat kebijakan yang berpotensi menguntungkan kelompok tertentu serta menyulitkan kelompok lain, maka semestinya kepala negara juga tidak menyetujui itu. Pernah dikatakan kepada Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, "Andai engkau menyatukan manusia atas satu mazhab.". Beliau menjawab, "Tidak berbeda pendapatnya mereka (dalam perkara ikhtilaf) tidaklah mengembirakan hatiku."

Kemudian beliau menulis perintah ke berbagai wilayah:

«لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقُهَاهَاؤُهُمْ»

Hendaklah setiap kaum memutuskan dengan apa yang telah disepakati oleh ahli fikih mereka (HR ad-Darimi).

Bukan untuk Kaum Muslim Semata

Politik Islam—dalam kaitannya dengan kehidupan publik—berpihak kepada semua rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini tercermin dalam berbagai bidang berikut:

a. Agama dan keyakinan.

Dalam sistem Khilafah, non-Muslim yang hidup sebagai warga negara (*ahludz-dzimmah*) dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Begitu juga dalam hal makanan, minuman, pernikahan sesama mereka, dan pakaian. Mereka diperlakukan

sesuai dengan agama mereka. Tentu dalam batas apa yang dibolehkan hukum-hukum syariah. Rasulullah saw. menyatakan:

«أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَىٰ يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا»

Sungguh siapa saja yang tetap dalam keyahudiannya dan kenasraniannya tidaklah akan diganggu karenanya (HR al-Baihaqi).

Selain itu terkait orang-orang orang musyrik (Majusi/penyembah api), beliau menetapkan: “*Perlakukanlah mereka sebagaimana perlakuan terhadap Ahlul Kitab.*” Ketentuan ini berlaku untuk selain sembelihan dan wanita mereka yang tetap diharamkan bagi umat Islam.

b. Politik dan hukum.

Dalam bidang politik, Muslim maupun non-Muslim secara umum dipandang sama. Semua berhak menempati jabatan apa saja asalkan memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas. Hanya saja, memang ada jabatan yang hanya boleh dijabat oleh Muslim, misalnya jabatan kepala negara dan yang terkategori sebagai penguasa (*hukkâm*), dan posisi-posisi yang mensyaratkan hanya boleh dilakukan oleh Muslim.

Adanya syarat Muslim untuk jabatan tertentu yang ditetapkan oleh syariah bukanlah bentuk diskriminasi kepada non-Muslim, namun merupakan limitasi yang juga ada dalam sistem apapun. Bahkan limitasi dalam sistem Islam ‘lebih longgar’ dan lebih memungkinkan untuk dicapai dibandingkan dalam sistem lain. Sebagai contoh, ada syarat di suatu negara: “*Presiden ialah orang xxx asli*”. Syarat ini menutup peluang bagi siapapun yang bukan berdarah xxx asli untuk menjadi presiden. Ketika kemudian diubah menjadi “*presiden harus seorang warga negara xxx sejak*

kelahirannya”, tetap saja menutup peluang bagi siapapun yang lahirnya bukan berwarga negara xxx. Padahal asal suku bangsa, tempat kelahiran dan asal orangtua adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Berbeda dengan syarat Muslim, siapapun dia, apapun sukunya, lahir dimanapun, apapun agamanya, semua terbuka peluang untuk memenuhi syarat tersebut dengan mudah, yakni dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Adapun di depan hukum ‘*uqûbât* (sanksi), secara umum tidak dibedakan antara Muslim dan *ahludz dzimmah*. Rasul saw. memberlakukan hukum *qishash* terhadap seorang Yahudi yang membunuh seorang budak untuk merampas anting-anting budak tersebut, juga menerapkan had zina baik kepada Muslim maupun non-Muslim yang berzina.

c. Ekonomi dan kesejahteraan.

Dalam bidang ekonomi, hukum syariah juga berlaku untuk seluruh rakyat tanpa memandang agama dan suku asalnya. Ketika Rasulullah saw. menetapkan:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah tersebut adalah miliknya (HR al-Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad).

Ketetapan ini berlaku untuk Muslim dan non-Muslim. Begitu juga ketika Muslim diharamkan riba, maka terhadap Nasrani Najran, Rasulullah saw. juga menetapkan:

«أَنْ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ»

Sungguh siapa saja yang berjual beli dengan riba maka tidak ada dzimmah bagi dirinya (HR Ibnu Abi Syaibah).

Hanya saja, memang ada pengecualian dalam apa-apa yang Rasulullah saw. tentukan. Mereka, misalnya, tidak dilarang untuk

meminum khamr maupun memakan babi dan makanan yang menurut mereka boleh dimakan (di lingkungan/komunitas mereka, *red.*).

Dari sisi jaminan kesejahteraan, Islam menjamin seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi apapun. Rasulullah saw. bersabda:

«وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ
بَرَأْتُ مِنْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى»

Penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan maka jaminan Allah telah lepas dari mereka (HR Ahmad).

Khalifah ‘Umar bin Al-Khaththab ra. pernah melihat orangtua mengemis, yang ternyata beragama Yahudi. Beliau bertanya, “*Apa yang memaksa engkau mengemis?*” Dia menjawab, “*Untuk membayar jizyah, kebutuhan hidup dan karena aku sudah tua (tidak sanggup bekerja).*” Khalifah Umar ra. Mengutus dia kepada penjaga Baitul Mal dan berkata:

«انظُرْ هَذَا وَضُرْبَاءَهُ؛ فَوَاللَّهِ مَا أَنْصَفْنَاهُ أَنْ أَكَلْنَا
شَبِيهَتَهُ ثُمَّ نَخَذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ»

Lihatlah orang ini dan yang seperti dia! Demi Allah, kita tidak adil kepada dia. Kita mengambil jizyah pada masa mudanya, kemudian kita menelantarkan dia ketika dia lanjut usia (HR Abu Yusuf, Al-Kharaaj, hlm. 126).

Tidak aneh jika Will Durant dalam *The Story of Civilization* menyatakan: “*Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam*

luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.”

d. Pendidikan.

Pada dasarnya, semua warga negara–muslim maupun non-Muslim–wajib terikat dengan kurikulum pengajaran yang telah ditetapkan oleh negara. Karena kurikulum pendidikan negara berasaskan akidah dan syariah Islam, maka non-Muslim pun harus mempelajari sebagian hukum Islam, terutama yang terkait dengan urusan public. Sebagaimana dalam sistem sekuler, seorang Muslim juga belajar hukum-hukum sekuler.

Meskipun demikian, orang-orang non-Muslim juga dibolehkan mengajarkan ajaran-ajaran mereka sendiri (di lingkungan/komunitas mereka, *red.*). Negara tidak boleh melarang mereka karena ini merupakan hak mereka yang tidak boleh dihalang-halangi.

e. Keamanan.

Dalam bidang keamanan, semua rakyat juga diperlakukan sama. Bahkan non-Muslim seolah mendapat posisi “istimewa”: hanya wajib membayar *jizyah* bagi yang lelaki. Mereka tidak wajib berperang saat negara diserang. Hal ini diakui oleh TW Arnold dalam bukunya: “*Ketika Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya pelindung gereja Yunani. Penindasan kepada kaum Kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan pada uskup Agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Hal yang tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya. Gennadios diberi staf keuskupan oleh Sultan sendiri. Sang Uskup juga berhak meminta perhatian Pemerintah dan keputusan Sultan untuk menyikapi para gubernur yang tidak adil...*”

Wallâhu a‘lam. □

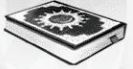


Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.

تفسير القرآن



ANCAMAN BAGI MEREKA YANG MENDUSTAKAN RASUL SAW.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَبَيًّا﴾

الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْدًا وَبَيًّا

Sungguh Kami telah mengutus seorang rasul (Nabi Muhammad saw.) kepada kalian sebagai saksi atas diri kalian, sebagaimana Kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Namun, Fir'aun mendurhakai rasul itu sehingga Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. (QS al-Muzzammil [73] 15-19)

Ayat ini mengingatkan tentang azab yang ditimpakan kepada Fir'aun yang mendurhakai rasul yang diutus kepada dia. Penyampaian kisah itu sebagai ancaman kepada orang-orang yang mendustakan dan mendurhakai Rasulullah saw.

Biarkanlah Aku (yang bertindak) terhadap orang-orang yang mendustakan.

Hingga firman-Nya:

﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾

..dan azab yang pedih.¹

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ﴾

Sungguh Kami telah mengutus seorang rasul (Nabi Muhammad saw.) kepada kalian sebagai saksi atas diri kalian.

Dengan begitu, maka terjadi *al-iltifât* (pengalihan) dari *al-ghaybah* (orang ketiga, yang dibicarakan) menjadi *al-khithâb* (orang kedua, yang diseru). Tujuannya *li taqrî' wa al-tawbîkh* (mencela) karena tidak adanya keimanan.²

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dalam ayat sebelumnya, penyebutan mereka digunakan dengan kata ganti orang ketiga (*ghaybah*), sementara *khithâb* (seruan) ditujukan kepada Rasulullah saw. Dimulai dari firman-Nya:

Sebelumnya Allah SWT memerintahkan beliau untuk bersabar terhadap perkataan mereka dan meninggalkan mereka dengan cara yang baik, kemudian beralih menjadi ancaman kepada mereka.³

Menurut Ibnu 'Asyur, kalimat dalam ayat ini merupakan *ist'nâ'af ibtidâ'*, yakni kalimat baru yang terputus dengan kalimat sebelumnya secara *i'râb*. Oleh karena itu, *khithâb* atau seruan dalam

﴿وَدَرْبِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾

ayat ini tidak dikategorikan sebagai *al-iltifât*. Alasannya, kalimat ini dipindahkan tujuannya, yang berbeda dengan tujuan dalam kalimat sebelumnya.⁴

Tujuan dari penyampaian berita di sini dimaksudkan sebagai ancaman bagi mereka, bahwa mereka akan ditimpa azab sebagaimana yang telah menimpa bagi orang-orang yang serupa dengan mereka dalam hal mendustakan Rasul.⁵

Ayat ini diawali dengan huruf «إِنَّ» yang berguna sebagai *ta'kid* (menegaskan) berita yang disebutkan sesudahnya. Penegasan tersebut lantaran yang menjadi *al-mukhâthabûn*, yakni objek yang diseur, adalah orang-orang yang mengingkari bahwa Allah SWT telah mengutus seorang rasul kepada mereka.⁶

Orang-orang yang kepada mereka diutus seorang rasul adalah penduduk Makkah, orang-orang kafir Makkah, atau semua orang kafir.⁷ Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw.⁸

Meskipun yang diseru ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy, yang dimaksud di sini bukan hanya mereka, namun seluruh manusia.⁹ Tentang hal ini telah maklum karena banyak disebutkan dalam ayat lainnya bahwa Rasulullah saw. diutus kepada seluruh manusia; bukan untuk suku Quraisy, penduduk Makkah, atau bangsa Arab saja. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾

Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad saw.), kecuali kepada seluruh manusia (QS Saba' [36]: 28).

Dalam ayat ini digunakan dalam bentuk *nakirah*, yakni «رَسُولًا» (seorang rasul). Sebabnya, mereka sudah tahu tentang rasul yang dimaksud.¹⁰ Juga berguna *li al-ta'zhîm* (untuk mengagungkan) kedudukan Rasulullah saw. sehingga bermakna: "Sungguh Kami telah mengutus seorang rasul yang memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang sangat

tinggi serta mencakup semua sifat yang mulia."¹¹

Penyebutan '*rasûl*' itu menunjukkan bahwa ancaman dan peringatan keras yang ditujukan mereka tidak terkait Rasulullah saw. sebagai pribadi, namun berkaitan dengan kedudukan beliau sebagai rasul atau utusan Allah SWT.¹²

Rasul yang diutus kepada mereka itu disifati dengan kata «شَاهِدًا» (saksi).¹³ Artinya, rasul itu menjadi saksi di akhirat atas mereka, baik tentang akidah maupun amal mereka. Wahbah al-Zuhaili berkata tentang makna ayat ini, "Kami telah mengutus untuk kalian seorang rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang akan menjadi saksi pada Hari Kiamat atas amal perbuatan kalian dan apa yang muncul dari kalian; apakah menerima atau menolak; menaati atau membangkang."¹⁴

Bahkan bukan menjadi saksi atas mereka, Rasulullah saw. juga menjadi saksi atas umat-umat lain selain mereka. Allah SWT berfirman:

﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

*Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad saw.) sebagai saksi atas mereka? (QS an-Nisa' [4]: 41).*¹⁵

Penetapan Rasul saw. menjadi saksi atas mereka lantaran beliau telah menunaikan tugas sebagai penyampai risalah kepada mereka secara sempurna. Menurut Sayyid Thanthawi, Rasulullah saw. akan menjadi saksi atas kalian pada Hari Kiamat karena beliau sudah menyampaikan risalah Allah SWT tanpa lalai sedikit pun.¹⁶

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾

...sebagaimana Kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun.

Huruf *al-kâf* memberikan makna *tasybih* (penyerupaan). Ayat ini menyerupakan pengutusan Nabi Muhammad saw. kepada penduduk Makkah sebagai saksi atas mereka, seperti halnya pengutusan seorang rasul kepada

Fir'aun sebagai saksi atasnya.¹⁷

Rasul yang diutus kepada Fir'aun itu adalah Nabi Musa bin Imran as.¹⁸

Penyebutan secara khusus nama Musa as. dan Fir'aun dan berita keduanya telah masyhur di kalangan penduduk Makkah.¹⁹ Kisah Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa as. juga populer di tengah bangsa Arab. Karena itu ketika disebutkan nama Fir'aun, mereka pun langsung bisa mengingat peristiwa yang menimpa mereka.

Rasulullah saw. dan Musa as. sama-sama utusan Allah SWT untuk menyampaikan risalah. Rasulullah saw. diutus kepada penduduk Makkah. Musa as. diutus kepada Fir'aun.

Dari segi objek dakwahnya juga terdapat keserupaan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, orang-orang yang menolak risalah Rasulullah saw. adalah orang-orang yang mendustakan beliau dari kalangan *ulī'an-na'mah* (orang-orang yang hidupnya berkelebihan). Demikian pula keadaan Fir'aun. Menurut al-Harari, Fir'aun adalah pemimpin orang-orang yang hidupnya berkelebihan, makmur dan

menyombongkan diri. Jadi antara Fir'aun dan mereka ada aspek kesamaan, keserupaan keadaan dan hubungan batin.²⁰

Aspek keserupaan lainnya adalah keduanya sama-sama tumbuh di tengah kaumnya masing-masing dan mereka pun meremehkan keduanya.²¹ Muhammad saw. disakiti dan diremehkan oleh penduduk Makkah karena beliau dilahirkan di tengah-tengah mereka. Fir'aun merendahkan dan menyakiti Musa as. karena dialah yang mengasuh Musa as.²²

Tentang makna ayat ini, Syihabuddin al-Alusi berkata, "Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, menjadi saksi atas kalian, lalu kalian mendurhakai dia, sebagaimana Kami telah mengutus kepada Fir'aun sorang rasul, lalu dia mendurhakai dirinya."²³

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيًّا﴾

Namun, Fir'aun mendurhakai rasul itu sehingga Kami menyiksa dia dengan siksaan yang berat.

Allah SWT berfirman: «فَعَصَى». Secara bahasa, kata tersebut merupakan lawan dari ketaatan.²⁴ Makna ini pula yang terkandung dalam ayat ini. Menurut as-Sam'ani, ayat ini bermakna: Dia keluar dari ketaatan.²⁵ Al-Qurthubi menuturkan bahwa makna «فَعَصَى» di sini adalah mendustakan rasul itu dan tidak mau beriman.²⁶

Menurut Syihabuddin al-Alusi, penyebutan kembali kisah mereka menampakan buruknya urusan kedurhakaan Fir'aun. Hal itu karena kedurhakaan itu dilakukan terhadap seorang rasul, bukan karena terhadap Musa.²⁷

Demikian juga nama Fir'aun yang kembali disebut. Tidak cukup dengan menyebut *dhamîr* (kata gantinya)-nya serta ditaruh di depan. Tujuannya untuk memberitahukan betapa buruknya kemaksiatan atau kedurhakaan tersebut. Bahkan kedurhakaan itu sudah mencapai puncaknya.²⁸

Kata *rasul* kembali diulang dalam bentuk

Ayat ini mengingatkan agar menjadikan peristiwa yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya sebagai pelajaran. Begitulah akibat dan kesudahan orang-orang yang zalim. Karena itu siapa pun yang tidak ingin mendapatkan nasib yang sama, semestinya dia meninggalkan sifat tersebut. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya.

ma'rifah, yakni: «الرُّسُولَ». Ini menunjukkan bahwa rasul yang dimaksud adalah rasul yang disebutkan sebelumnya. Huruf *al-âm* ini adalah *al-'ahdiyyah*.²⁹

Akibat kedurhakaan yang dia lakukan, Allah SWT pun menghukum dan mengazab dia. Allah SWT berfirman: «فَأَخَذْنَاهُ». Artinya, عَاقِبْنَاهُ (maka Kami telah menghukum dia).³⁰

Kata «أَخَذْنَا» berkedudukan sebagai *maf'ûl muthlaq*. Gunanya untuk menguatkan *fi'il*-nya, yakni hukumannya.³¹ Menjadi semakin kuat ketika disifati dengan kata «وَيْبِلًا» (yang berat).³²

Kata «الْوَيْبِلَ» adalah *shifah musyabbahah* yang menunjukkan sifat yang permanen dari kata «وَيْبِلٌ - وَيَبُلٌ». Dalam kalimat: «وَيْبِلُ الْأُمْرِ» berarti «اشتدَّ» (perkara itu semakin keras).³³ Makna ini sesuai dengan yang dikemukakan Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, al-Sudi dan at-Tsauri. Intinya, makna kata «الْوَيْبِلَ» di sini adalah «شَدِيدًا» (sangat keras).³⁴

Dengan demikian makna penggalan ayat ini adalah, “Kami menghancurkan dia dengan penghancuran yang mengerikan dan tidak terbayangkan; menenggelamkan dia di laut bersama kaumnya.”³⁵

Penenggelaman Fir'aun beserta orang-orang yang bersama dia diberitakan dalam beberapa ayat (Lihat, misalnya: QS al-Zukhruf [43]: 55).

Ayat ini mengingatkan agar menjadikan peristiwa yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya sebagai pelajaran. Begitulah akibat dan kesudahan orang-orang yang zalim. Karena itu siapa pun yang tidak ingin mendapatkan nasib yang sama, semestinya dia meninggalkan sifat tersebut. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya.

Wallâh a'lam bi ash-shawwâb. □

Catatan kaki:

¹ Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 272; Muhyiddin Darwish, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1995), 267

² al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 202. Lihat juga al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 120

³ Lihat Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 272

⁴ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 272

⁵ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 272

⁶ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 273. Lihat juga Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 162

⁷ al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsîr, 1994), 382

⁸ al-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, vol. 5, 382; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 202

⁹ Lihat al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 204

¹⁰ Lihat Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 273

¹¹ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15, 162

¹² Lihat Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 273

¹³ al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munîr, 2004), 395; Muhyiddin Darwish, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhu*, vol. 10, 267

¹⁴ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 204. Lihat juga al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 358

¹⁵ al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 31 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), 357

¹⁶ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15, 162

¹⁷ Lihat Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15, 162

¹⁸ al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 417

¹⁹ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15, 162; al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 31, 357

²⁰ Lihat al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 31, 357

²¹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 317

²² al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 358

²³ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 317

²⁴ Lihat Zainuddin al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 211; al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), 570

²⁵ al-Sam'ani, *Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 6 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), 82

²⁶ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 48. Lihat juga al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 417

²⁷ al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 120

²⁸ Lihat Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15, 162. Penjelasan senada juga dikemukakan Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 274

²⁹ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 274

³⁰ al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 417; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 358; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 204

³¹ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 202

³² Lihat al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munîr, 2004), 395

³³ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ashirah*, vol. 3, 2394

³⁴ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 693; Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 8, 256

³⁵ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 444



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BOLEHKAH MENINGGALKAN IDENTITAS ISLAM DALAM BERPOLITIK?

KH Hafidz Abdurrahman, MA

Soal:

Apakah boleh bagi seorang Muslim, ketika berpolitik dan melakukan aktivitas politiknya, menanggalkan identitasnya keislamannya?

Jawab:

Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya agar memeluk Islam secara *kâffah*, dalam seluruh aspek kehidupan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا

تَتَّبِعُوا حُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian (QS al-Baqarah [2]: 208).

Imam al-Qurthubi menjelaskan: “Ketika Allah SWT menjelaskan kepada umat manusia, baik Mukmin, kafir maupun munafik, maka Dia

(seolah) berfirman: Jadilah kalian dalam satu agama, berhimpunlah kalian dalam Islam, dan berpegangteguhlah dengannya. Kata “as-Silmi” di sini maknanya Islam. Ini dinyatakan oleh Mujahid dan diriwayatkan oleh Abu Malik dari Ibn ‘Abbas.¹

Karena itu ayat ini memerintahkan semua umat manusia untuk memeluk Islam secara *kâffah*. Ibn ‘Abbas ra. menjelaskan, ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani agar memeluk Islam secara *kâffah* (menyeluruh). Artinya, jika orang Yahudi dan Nasrani saja diperintahkan masuk Islam secara *kâffah*, apatah lagi orang Islam. Tentu lebih wajib lagi.

Karena itu al-Qurthubi menjelaskan makna *kâffah* di dalam ayat ini: *Pertama*, menyeluruh; meliputi seluruh ajaran Islam. *Kedua*, menolak yang lain, di luar Islam. Dengan kata lain, orang yang telah memeluk Islam wajib mengambil Islam secara menyeluruh dan menolak yang lain selain Islam. Itu baru disebut masuk Islam secara *kaffah*.²

Pengertian ini diperkuat oleh firman Allah SWT:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

Siapa saja yang mencari agama selain Islam sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima dari dirinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (QS Ali ‘Imran [3]: 85).

Karena itu, baik Muslim maupun non-Muslim, jika mengambil selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah. Orang Muslim tidak dibenarkan mengambil Islam dan pada saat yang sama juga mengambil yang lain. Itu juga tidak akan diterima. Inilah yang

dimaksud memeluk Islam secara *kâffah*. Menyeluruh dan menolak yang lain selain Islam.

Dengan kata lain, seorang Muslim wajib mengimani dan mengambil Islam secara utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong. Dipilih-pilih yang enak dan mudah saja (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 85).

Karena itu haram hukumnya meninggalkan identitas Islam dalam hal apapun. Sebaliknya, identitas Islam harus dipegang teguh oleh setiap Muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam melakukan kegiatan lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya.

Dalam konteks politik maupun yang lain, di luar konteks ibadah, identitas Islam wajib dipegang teguh, dan dijadikan identitas diri setiap Muslim. Menurut Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani:

السِّيَاسَةُ هِيَ رِعَايَةُ شُؤُونِ الْأُمَّةِ دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّا،
وَتَكُونُ مِنْ قِبَلِ الدَّوْلَةِ وَالْأُمَّةِ، فَالدَّوْلَةُ هِيَ الَّتِي
تُبَاشِرُ هَذِهِ الرِّعَايَةَ عَمَلِيًّا، وَالْأُمَّةُ هِيَ الَّتِي تُحَاسِبُ
هَذِهِ الدَّوْلَةَ

*Politik adalah mengurus urusan umat di dalam dan luar negeri. Hal itu dilakukan oleh negara dan umat. Negaralah yang melaksanakan pengurusan ini secara langsung, sedangkan umatlah mengoreksi negara.*³

Mengurus umat di dalam negeri itu dilakukan oleh negara dengan cara menerapkan ideologi Islam (akidah dan syariah) secara *kâffah* dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas umat adalah mengoreksi jalannya penerapan ideologi Islam ini jika terjadi penyimpangan. Adapun mengurus umat di luar negeri adalah hubungan negara dengan bangsa, umat dan negara lain. Mengemban dan menyebarkan ideologi ke luar negeri. Itulah politik luar negeri negara Islam.

Berpolitik, yakni mengurus urusan umat, di dalam dan luar negeri, dengan menerapkan Islam secara *kâffah* itu hukumnya wajib, baik oleh negara maupun umat. Ini sebagaimana dalam Hadis Nabi saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Kalian semua adalah penggembala (pengurus), dan penanggungjawab atas rakyat (yang diurus)-nya. Seorang imam (pemimpin) adalah penggembala, dan dialah yang bertanggungjawab terhadap rakyat (yang diurus)-nya. Seorang pria adalah pengurus keluarganya, dan dialah yang bertanggungjawab terhadap keluarga yang diurusnya. Wanita adalah pengurus di dalam rumah suaminya, dan dialah yang bertanggungjawab terhadap urusan keluarganya. Pembantu adalah pengurus harta tuannya, dan dialah yang bertanggungjawab atas urusannya."*⁴

Hadis menjelaskan tentang kedudukan setiap orang sebagai pelaku politik pada levelnya. Masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap apa yang diurusnya. Itulah politik. Karena itu Syaikh Hisyam 'Abdul Karim al-Badrani menyatakan, *"Sesungguhnya tugas politik adalah tanggung jawab semua pihak di dalam masyarakat Islam, sesuai dengan posisi mereka dalam kekuasaan, atau untuk mengoreksi dan memberikan ketaatan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman."*⁵

Lalu, bagaimana cara mengurus urusan tersebut? Bagi kaum Muslim, tak ada cara lain, kecuali dengan menggunakan Islam secara



kaAffah. Karena itu seorang Muslim juga politikus. Sebabnya, politik dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan umat dengan syaria Islam, maka mutlak wajib menguasai fikih Islam dengan baik dan benar. Seorang ahli fikih tidak boleh berhenti pada penguasaan hukum fikih, tetapi harus sampai pada level implementasi fikih ke dalam kehidupan. Baru hukum fikih tersebut akan bisa diwujudkan dalam kehidupan. Jika tidak, hukum fikih tersebut hanya sebatas gagasan.

Begini juga sebaliknya. Seorang politikus yang tidak menguasai fikih tidak akan bisa mengurus urusan umat dengan baik dan benar. Karena itu fikih dan politik, dalam pandangan Islam, tidak bisa dipisahkan. Peralnya, fikih adalah solusinya, sedangkan politik adalah cara bagaimana mengimplementasikan fikih tersebut dalam kehidupan.

Karena itu berpolitik itu hukumnya fardhu sebagaimana shalat, puasa, zakat, haji dan jihad. Sama-sama wajib. Tidak boleh dibeda-bedakan. Jika demikian, fikih akan melekat di dalam politik, dan tidak bisa dipisahkan; sekaligus menjadi identitas, yang membedakannya, antara politik Islam dan bukan.

Namun, ketika politik kaum Muslim tidak menggunakan hukum syaria, maka politiknya tidak mempunyai identitas yang jelas, bahkan oportunistis, dan hipokrit. Inilah yang digambarkan dalam al-Quran:

﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ﴾

﴿وَمَنْ يُضَلِّلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾

Mereka (orang-orang munafik) dalam keadaan ragu di antara yang demikian (iman atau kafir). Tidak termasuk golongan (orang beriman) ini dan tidak (pula) golongan (orang kafir) itu. Siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah (karena tidak mengikuti tuntunan-Nya dan memilih kesesatan), kamu tidak akan menemukan jalan (untuk memberi petunjuk)

Karena itu tidak boleh seorang Muslim menanggalkan identitasnya dalam berpolitik. Apapun alasannya. Sebaliknya, dia wajib terikat dengan hukum syaria dalam segala aspek kehidupannya. Betapun ujiannya. Berat atau ringan.

bagi dirinya (QS an-Nisa' [4]: 143).

Karena itu tidak boleh seorang Muslim menanggalkan identitasnya dalam berpolitik. Apapun alasannya. Sebaliknya, dia wajib terikat dengan hukum syaria dalam segala aspek kehidupannya. Betapun ujiannya. Berat atau ringan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. []

Catatan kaki:

- 1 Al-Imam al-'Allamah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 1, hal.
- 2 Al-Imam al-'Allamah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 1, hal.
- 3 Al-Imam al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim as-Siyasah li Hizb at-Tahrir*, Dar al-Ummah, cet. IV, tahun 1425 H/2005 M, hal. 5.
- 4 Hr. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 'Umar
- 5 Syaikh Hisyam 'Abdul Karim al-Badrani, *Mu'ahillat as-Siyasi al-Mubdi'*, Muassasah al-Bashair li ad-Dirasat wa an-Nasyr, Irak, cet. I, 1441 H/2020 M, hal. 78.

MENYOAL RUU KIA

Arum Harjanti

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) resmi ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI (30/6/2022). Kesembilan fraksi menyetujui RUU KIA untuk ditetapkan menjadi usulan DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat. Anggota Komisi XI DPR yang juga sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan RUU KIA sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara hadir mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak.¹

Berbagai pihak mendukung RUU KIA. RUU ini dipandang banyak memberikan hak perempuan dan anak sehingga akan mampu mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Pengesahan RUU KIA diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sehingga kesejahteraan ibu dan anak dapat segera terwujud nyata.

Namun, benarkah RUU KIA akan menyelesaikan berbagai persoalan ibu dan anak? Akankah kesejahteraan ibu dan anak akan

terwujud nyata dengan pengesahan RUU KIA ini?

Jaminan Kesejahteraan

Di antara isi RUU KIA yang dianggap sebagai angin segar bagi perwujudan kesejahteraan ibu dan anak adalah adanya usulan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan dengan tetap mendapat gaji penuh pada 3 bulan pertama dan setelahnya mendapat upah 75 persen.

Kemudian ibu mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran. Hak cuti ini ditegaskan kembali dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa ibu yang cuti melahirkan atau istirahat karena keguguran tidak boleh dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Pasal 5 ayat (1)).

Ketentuan lain yang juga dianggap sebagai angin segar dukungan terhadap ibu adalah suami berhak cuti 40 hari bila istri melahirkan dan 7 hari jika istri mengalami keguguran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, ketentuan cuti melahirkan enam bulan adalah ketentuan yang ideal agar ibu yang baru melahirkan memiliki kesehatan mental dan fisik

yang baik dan anak pun bisa terjaga dan terawat dengan baik. Cuti 6 bulan juga dianggap berdampak positif bagi keterikatan ibu dan bayi, menurunkan risiko kematian bayi dan meningkatkan keberhasilan lama masa menyusui.²

Komnas Perempuan juga mengapresiasi RUU KIA sebagai bagian dari upaya menguatkan hak maternitas perempuan. Apalagi pemenuhan hak maternitas ini dianggap berpaut erat dengan hak-hak fundamental lainnya, yaitu hak atas kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan hak atas kerja layak.³

Ilusi

RUU KIA seolah menjanjikan kesejahteraan secara nyata ketika menjelaskan kesejahteraan yang hendak diwujudkan. Yang dimaksud kesejahteraan ibu adalah kesejahteraan ibu sejak saat mempersiapkan kehamilan, saat kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan. Kesejahteraan Anak adalah sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Sungguh ini adalah narasi yang memberikan harapan besar.

Padahal faktanya, RUU KIA hanya peduli pada ibu dan anak selama 6 bulan saja. Betul. Dalam RUU KIA ada pasal yang menetapkan bahwa para ibu berhak mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Bahkan ibu dan anak dijamin untuk mendapat kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum di tempat kerja, tempat umum, dan alat transportasi umum.

Namun, sejatinya kesejahteraan yang dicita-citakan oleh RUU KIA hanyalah harapan palsu. Bukankah RUU ini menuntut ibu tetap bekerja demi memenuhi nafkah keluarga? Padahal bekerjanya ibu akan mengakibatkan pengasuhan terbaik ibu jelas tidak mungkin terwujud. Apalagi untuk mencegah anak menjadi *stunting* perlu perhatian khusus dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK) atau 2 tahun! Bukankah selama ini pola pengasuhan yang salah disebutkan sebagai penyebab tingginya *stunting*? Lantas bagaimana anak mendapatkan pengasuhan yang

tepat jika pengasuhan terbaik dari ibu hanya didapatkan selama 6 bulan saja?

Betul ibu diberi kemudahan untuk mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana di tempat kerja; termasuk memberikan waktu dan tempat untuk memberikan ASI, bahkan mungkin adanya *'daycare'*. Namun, bukankah semua itu justru semakin menunjukkan bahwa ibu tak mungkin fokus pada buah hati? Bahkan ini menjadi bukti adanya perhatian yang terbagi antara anak dan pekerjaan. Jelas ini kontra produktif terwujudnya tumbuh kembang anak yang optimal!

Bukankah hal ini dapat memperbesar risiko terjadinya *stunting*? Apalagi anak juga akan berhadapan dengan ancaman kualitas udara yang buruk yang bahkan berisiko membuat anak sakit. Kondisi Indonesia sebagai negara tertinggi ke tiga di dunia dalam jumlah penderita TBC, jelas akan memberikan peningkatan risiko anak terpapar infeksi TBC. Demikian juga meningkatnya jumlah perokok di Indonesia. Infeksi pada anak jelas akan meningkatkan risiko terjadinya *stunting* pada anak. Mengajak anak di tempat kerja justru kontraproduktif terhadap pencegahan *stunting*, Alih-alih mencegah terjadinya *stunting*, yang ada justru makin bertambah jumlah anak yang menderita *stunting*. Alih-alih anak makin sejahtera, yang terjadi justru makin bertambah penderita *stunting*.

Adanya berbagai bahaya yang mengancam tumbuh kembang anak jelas akan membuat ibu khawatir. Bahkan kesulitan hidup saat ini—mahalnya harga sembako, hilangnya berbagai subsidi dan lain-lain—membuat ibu berisiko mendapatkan *"multiple burden"*. Tekanan mental ini membahayakan ibu dalam memberikan pengasuhan terbaik untuk anaknya. Kondisi ini jelas kontra produktif dengan tujuan dari usul RUU KIA, yang ingin menjamin kesejahteraan ibu. Banyaknya kasus ibu membunuh anak kandungnya sendiri adalah bukti nyata lemahnya mental ibu.

Sementara itu, belum ada jaminan bahwa

tanggung jawab pembiayaan dan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak akan terpenuhi oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Faktanya selama ini, Indonesia hampir 77 tahun merdeka, kesejahteraan ibu dan anak pun belum terwujud. Meski sudah berjalan hampir 10 tahun, pemberantasan *stunting* belum ada perubahan nyata, bahkan masih peringkat 4 terbanyak di dunia, dan ke dua se Asia Tenggara.

Di sisi lain, utang terus bertambah, angka korupsi terus saja melaju, dan kemiskinan tidak banyak berkurang. Sumberdaya alam yang luar biasa ternyata tidak menjanjikan kesejahteraan rakyat. Semua ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan tidak menjanjikan adanya kesejahteraan. Bagaimana kita bisa berharap terwujud kesejahteraan ibu dan anak bila sistem ekonomi yang diterapkan tetap sama, yaitu sistem ekonomi kapitalis? Apalagi sistem ekonomi kapitalis meniscayakan hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang dan bertahan bahkan mendominasi. Jadi bagaimana mungkin RUU KIA mampu mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak tanpa ada perubahan mendasar pada tata kelola kehidupan termasuk perubahan sistem ekonominya?

Hanya dengan Islam

Hanya Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak, bahkan tanpa mewajibkan perempuan bekerja. Islam mewajibkan negara untuk menjaga peran strategis perempuan sebagai ibu, pengatur rumah tangga dan juga ibu generasi. Meski Islam membolehkan perempuan bekerja, Islam tidak menjadikan perempuan sebagai penanggung nafkah dan penyangga pilar ekonomi negara. Jaminan Islam atas kesejahteraan dan perlindungan untuk Ibu dan anak hanya akan terwujud dalam negara Khilafah Islamiyah yang menerapkan Islam secara *kāffah*. Islam menjadikan sumberdaya alam sebagai milik umat yang wajib dikelola oleh negara untuk

mensejahterakan rakyat. Sistem ekonomi Islam akan menjadikan hidup sejahtera nyata adanya.

Islam memastikan setiap rakyat, individu-perindividu, termasuk perempuan dan anak, terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga kebutuhannya akan layanan pendidikan dan kesehatan yang optimal. Khalifah Umar telah memberikan contoh nyata betapa Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan anak. Khalifah Umar mengubah kebijakannya dengan memberikan santunan kepada semua bayi yang baru lahir. Kebijakan baru ini merupakan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang menetapkan santunan hanya bagi bayi yang sudah disapih saja, karena menyebabkan para ibu mempercepat usia penyapihan demi mendapatkan tunjangan dari Khalifah untuk meringankan beban hidup mereka. Perubahan kebijakan dilakukan Khalifah Umar demi menjaga dan melindungi anak-anak dan juga menyenangkan hati para ibu yang sedang menyusui. Sungguh teladan mulia seorang khalifah terhadap rakyatnya, yang mengurus rakyat dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Jaminan nyata ini mustahil diwujudkan oleh negara kapitalis manapun. Kalaupun seandainya ada yang bisa mewujudkan, pastilah tanpa keberkahan. Padahal keberkahan adalah hal penting yang harus ada dalam kehidupan seorang Muslim. Keberkahan hanya akan didapatkan ketika menerapkan aturan Allah secara *kāffah*. Dengan demikian nyatalah jika hanya Islam yang menjamin kesejahteraan ibu dan anak.

Wallāhu a'lam bi ash-shawwāb. □

Catatan kaki:

- ¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220623/12/1546792/ruu-kia-vs-uu-kenetnakerjaan-siapa-yang-akan-mengalah>
- ² <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/07572271/poin-poin-penting-ruu-kia-salah-satunya-cuti-melahirkan-6-bulan?page=all>
- ³ <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-rancangan-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-ruu-kia>

AL-MUSÂQÂH

«عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

Rasulullah saw. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan separuh dari hasilnya berupa buah atau hasil pertanian. (HR al-Bukhari no. 2329 dan 2331; Muslim no. 1551; Ahmad no. 4663, 4732 dan 4946; Abu Dawud no. 3408 dan 3409; at-Tirmidzi no. 1383; Ibnu Majah no. 2467).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Umar ra. Dalam redaksi lainnya dari jalur Nafi' dari Abdullah bin Umar, dari Nabi saw.:

«أَنَّهُ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»

Nabi saw. menyerahkan (tanah) Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengerjakan dan menanam tanah tersebut dan untuk mereka separuh dari hasilnya (HR al-Bukhari no. 2285, 2499, 2720, 4248; an-Nasai no. 4647 di dalam *Sunan al-Kubrâ*; al-Baihaqi no. 11360 di dalam *Sunan al-Kubrâ*).

Imam an-Nawawi *rahimahullâh* menyatakan di dalam *Syarhu Shahîh Muslim* (10/209): "Di dalam hadis ini ada ketentuan tentang kebolehan *al-musâqâh*. Ini menjadi pendapat Malik, ats-Tsawri, al-Laits, asy-Syafii, Ahmad, semua *muhadditsin*, *ahlu azh-zhahîr* dan jumbuh ulama. Sebaliknya, Abu Hanifah menyatakan tidak boleh.

Imam an-Nawawi juga menyatakan:

Mereka berbeda pendapat dalam *al-asyjâr* (pohon) yang terhadapnya boleh *al-musâqâh*. Dawud mengatakan, "Boleh terhadap kurma secara khusus." Asy-Syafii berkata, "Terhadap kurma dan anggur secara khusus." Malik berkata, "Boleh atas semua *al-asyjar*." Itu

adalah pendapat untuk asy-Syafii. Dawud berpandangan itu merupakan *rukhsah* sehingga tidak melampaui apa yang dinyatakan (*al-manshûsh 'alayh*). Asy-Syafii sepakat dengan Dawud dalam keberadaannya sebagai *rukhsah*, tetapi ia berkata, "Hukum anggur adalah hukum kurma dalam sebagian besar bab." Adapun Malik berkata, "Sebab kebolehan adalah keperluan dan maslahat. Ini mencakup semua jadi dikiaskan terhadapnya. *Wâllâh a'lam*."

Seperti penjelasan Imam an-Nawawi, hadis di atas merupakan dalil kebolehan muamalah yang disebut oleh para ulama sebagai *al-musâqâh*. *Al-Musâqâh* merupakan bentuk *mufâ'alah* dari *as-saqyu*. Dikatakan: *saqyu az-zar'*, jika ia menyiramnya dengan air (Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*).

Menurut al-Azhari dalam *Tahdzîb al-Lughah*, dikatakan: *sâqâ fulânun fulânan nakhlatahu*, jika pohon kurma itu ia serahkan kepada orang lain agar diairi, disirami dan diperlakukan apa saja untuk kebaikan pohon kurma itu baik sumur atau yang lain, dan prosentase tertentu dari buahnya maka untuk *al-'âmil* dan sisanya untuk pemiliknya.

Adapun secara *syar'i*, *al-musâqâh* adalah seseorang menyerahkan pohon miliknya kepada orang lain agar diairi dan diperlakukan apa saja yang diperlukan dan untuk orang yang mengairi itu prosentase tertentu dari buahnya. Disebut *musâqâh* karena merupakan bentuk *mufâ'alah*

dari *as-saqyu*. Sebabnya, penduduk hijaz kebutuhan paling banyak dari pohon mereka adalah pengairan. Mereka mengairinya dari sumur sehingga disebut dengan sebutan itu, yaitu *al-musâqâh* (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, kitâb "Al-Musâqât,"* Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*).

Pengertian *al-musâqah* ini juga digali dari hadis di atas yang menggambarkan muamalah Rasul saw. dengan Yahudi Khaibar. Tanah Khaibar ditaklukkan secara *'anwat[an]*, atau menurut pendapat lain ditaklukkan secara *shulh[an]* dengan ketentuan tanahnya menjadi milik kaum Muslim. Di tanah Khaibar sudah ada pohon-pohon (kebun-kebun) kurma secara dominan. Kemudian Rasul saw. menyerahkan pengelolaan tanah Khaibar yang didominasi pohon (kebun) kurma itu kepada Yahudi Khaibar dan mereka mendapat separuh dari hasilnya. Aktivitas utama dalam pengelolaan kebun kurma itu adalah mengairi. Karena itulah muamalah Rasul saw dengan Yahudi Khaibar itu lantas disebut *al-musâqah*, menurut aktivitas yang dominan di situ.

Hanya saja, di antara tanah Khaibar itu ada yang bisa digunakan untuk bercocok tanam (pertanian), seperti di antara kebun atau di sela-sela pohon kurma. Namun, area pertanian itu tidak dominan, yakni jauh lebih sedikit. Yang dominan adalah area pohon kurma atau kebun kurma. Buktinya, hasil dominan tanah Khaibar adalah kurma, dan sebagian kecil jewawut. Ibnu Umar ra. menuturkan:

«أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقِيٍّ، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ»

Rasulullah saw. menyerahkan (tanah) Khaibar dengan separo hasilnya berupa kurma atau hasil pertanian. Beliau memberi

istri-istri beliau tiap tahun 100 wasaq terdiri dari 80 wasaq kurma dan 20 wasaq jewawut (HR Ahmad no. 4732 dan 4946; Muslim no. 1551).

“Para ulama berkata: Ini adalah dalil bahwa area tanah di Khaibar yang menjadi area pertanian lebih sedikit dari syajar.” (Imam an-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, 10/211).

Karena yang dominan adalah *syajar*, yakni pohon kurma, maka pertanian (*zar [un]*), yaitu jewawut itu adalah *tâbi[un]* (mengikuti). Kaidah ushul menyatakan: *at-tâbi'u ya khudzu hukma al-matbû'* (yang mengikuti mengambil hukum yang diikuti); *al-ghâlibu fi al-wâqi'*, *al-ghâlibu fi al-hukm* (yang dominan dalam fakatnya maka juga dominan dalam hukumnya).

Jadi hukum *zar'u* di situ mengikuti *tsamar* dan *syajar*, yakni mengikuti *al-musâqah*. Artinya, muamalah yang dilakukan oleh Rasul saw. dengan penduduk Khaibar itu hanya satu muamalah, yaitu *al-musâqah*. Hal itu ditegaskan dalam hadis Nafi' dari Ibnu 'Umar ra. di atas: “*A'thâ khaybara al-yahûda 'alâ an ya 'malûhâ wa yazra 'ûhâ...*”

Jadi di situ tidak ada akad *al-muzâra'ah*. Dengan demikian hadis ini tidak dapat dijadikan dalil atas kebolehan *al-muzâra'ah* atau penyewaan lahan untuk pertanian. Hadis di atas menunjukkan kebolehan *al-musâqah*. Dalam *al-musâqah* itu, selain perawatan dan pengelolaan pohonnya, juga boleh tanahnya digunakan bercocok tanam oleh *al-âmil*, yakni orang yang merawat dan mengelola *al-asyjâr* itu. Hasilnya, baik buah atau hasil *al-asyjâr* dan hasil bercocok tanam, dibagi menurut prosentase yang telah disepakati di antara pemilik *al-asyjâr* dengan pengelola itu. Tentu saja, muamalah *al-musâqah* itu harus memenuhi ketentuan hukum syariah.

WalLâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

SYUBHAT MAKNA ASAL PERINTAH UNTUK WAJIB

شُبُهَةٌ الْأَصْلِ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Salah satu kaidah yang banyak terdengar terkait perintah adalah kaidah *al-ashlu fi al-amri li al-wajûb* (makna asal perintah adalah untuk wajib). Ada juga yang berpendapat bahwa makna asal perintah adalah untuk wajib secara hakikat dan untuk selain wajib secara majaz.

Tidak dapat dikatakan demikian. Sebabnya, hakikat itu adalah lafal yang digunakan pada makna asalnya. Adapun majaz adalah lafal yang digunakan pada selain makna asalnya karena adanya *qarînah* yang menghalangi makna asal itu.

Redaksi perintah secara bahasa tidak ditetapkan untuk wajib. Redaksi perintah secara bahasa ditetapkan untuk *ath-thalab* (tuntutan). *Qarînah*-lah yang menentukan jenis tuntutan itu apakah untuk wajib, sunnah, mubah, *al-ihânah*, dan makna lainnya yang diinginkan. Makna wajib tidak dipahami dari redaksi perintah semata, tetapi dari redaksi perintah disertai *qarînah* yang menunjukkan tuntutan itu adalah tuntutan bersifat tegas

(*jâzim*). Begitu pula makna sunnah, mubah, *al-ihânah*, *at-ta'jîz*, *al-imtinân*, dsb. Tidak dipahami dari redaksi perintah saja, melainkan dipahami dari redaksi perintah bersama dengan *qarînah* yang menunjukkan jenis tuntutan itu.

Juga tidak dapat dikatakan bahwa redaksi perintah secara *syar'i* adalah untuk wajib dan majaz untuk selain wajib. Hal itu karena syariah tidak menetapkan makna tertentu untuk redaksi perintah dengan berbagai bentuk redaksinya. *Asy-Syâri'* menggunakan redaksi perintah dalam semua nas syariah dengan makna bahasanya. *Asy-Syâri'* tidak mengalihkan makna redaksi perintah itu ke makna lainnya yang kemudian menjadi dominan. *Asy-Syâri'* tidak menetapkan makna *syar'i* untuk redaksi perintah, tetapi tetap membiarkannya pada maknanya secara bahasa yaitu *ath-thalab*.

Jadi, redaksi perintah di dalam nas-nas syariah maknanya adalah *ath-thalab*. Supaya dapat dipahami yang dimaksudkan dari tuntutan (*ath-thalab*) itu maka harus ada *qarînah* yang menjelaskan jenis tuntutan yang dimaksudkan. Hampir tidak ada perintah atau redaksi perintah di dalam nas-nas syariah yang tidak disertai *qarînah* yang menjelaskan jenis tuntutan yang diinginkan.

Adapun syubhat yang membuat sebagian mengatakan bahwa perintah itu untuk wajib adalah karena perintah dari sisi perintah itu sendiri tidak dibedakan dengan redaksi perintah. Syubhat kedua, karena tuntutan untuk terikat dengan syariah tidak dibedakan dengan redaksi perintah.

Ada setidaknya sepuluh dalil yang dikemukakan untuk mendukung ucapan bahwa asal perintah adalah untuk wajib. Di antaranya adalah dalil-dalil yang di dalamnya ada celaan (*dzamm*) atas menyalahi atau meninggalkan perintah. Di antaranya celaan kepada Iblis yang menyalahi perintah bersujud kepada Adam (QS al-A'raf [7]: 12); celaan terhadap mereka yang



menyalahi perintah untuk rukuk (QS al-Mursalat [77]: 48); peringatan bahwa orang yang menyalahi perintah Rasul saw. akan tertimpa fitnah dan azab (Qs an-Nur [24]: 63); orang yang menyalahi perintah disebut bermaksiat (QS Thaha [20]: 93; at-Tahrim [66]: 6; al-Kahfi [18]: 69).

Adanya celaan atau ancaman bagi menyalahi perintah itu menunjukkan bahwa perintah itu wajib. Sebabnya, jika tidak wajib, tentu tidak ada masalah menyalahi perintah itu.

Selain itu, Allah menyatakan bahwa tidak ada pilihan dalam perkara yang diperintahkan (QS al-Ahzab [33]: 36). Itu artinya, perintah itu adalah wajib. Juga ada ancaman terhadap orang yang menyalahi ketaatan (QS an-Nur [24]: 54). Ancaman terhadap yang menyalahi itu menjadi dalil atas wajibnya perintah.

Juga digunakan dalil hadis tentang siwak: “*Law lâ an asyuqqa ‘alâ ummatî’la amartuhum bi as-siwâk ‘inda kulli shalât[in]* (Andai tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali shalat).” (HR Muslim).

Syubhat terjadi dalam memahami dalil-dalil itu sehingga disimpulkan asal perintah adalah untuk wajib. Syubhat itu adalah perintah dari sisi sebagai perintah tidak dibedakan dengan redaksi perintah. Dalil-dalil yang digunakan itu sejatinya berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan terhadap perintah, bukan berkaitan dengan redaksi perintah. Perintah Allah adalah wajib ditaati dan haram bermaksiat terhadap perintah-Nya. Ketaatan terhadap perintah itu adalah dengan menerimanya dan tidak membangkang. Jika Allah memerintahkan suatu perkara maka haram membangkang terhadapnya dan wajib untuk menaatinya.

Hanya saja, bukan berarti perintah itu pasti wajib. Menaati perintah itu harus sesuai dengan yang diperintahkan. Jika Allah memerintahkan suatu perintah yang tegas

(*jâzim*) maka wajib ditaati sesuai yang diperintahkan itu dan perintah itu hukumnya wajib dilakukan. Jika perintah yang tegas itu tidak dilakukan maka maksiat. Ini adalah fardhu atau wajib.

Jika Allah memerintahkan suatu perintah yang tidak bersifat tegas (*jâzim*) maka wajib ditaati sebagaimana yang diperintahkan dalam bentuk perintah tidak tegas (*ghayru jâzim*). Jika dilakukan maka mendapat pahala. Jika tidak dilakukan maka tidak ada apa-apa. Tidak berdosa dan tidak bermaksiat. Perintah yang demikian adalah perintah *mandûb* atau sunnah. Tidak melakukan apa yang diperintahkan itu di sini bukanlah kemaksiatan kepada Allah dan tidak menyalahi perintah-Nya, sebab perintah-Nya tidak bersifat tegas. Jadi menaati perintah itu adalah wajib dan tidak membangkang, bukan harus melakukannya. Jika dilakukan mendapat pahala. Jika tidak dilakukan maka tidak apa-apa dan tidak berdosa. Tidak melakukan perintah yang tidak tegas itu bukan berarti menyalahi perintah Allah SWT itu dan bukan maksiat, sebaliknya tetap berupa ketaatan. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

Sungguh Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat baik (QS an-Nahl [16]: 90).

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik dengan satu perintah. Hanya saja, perintah berlaku adil adalah untuk wajib, sedangkan perintah berbuat baik (*ihsân*) adalah untuk *nadab* (sunnah). Menaati kedua perintah itu adalah wajib, yaitu patuh pada apa yang diperintahkan, menerima sepenuhnya dan tidak membangkang. Adapun melakukan keduanya adalah hal yang berbeda. Melaksanakan berlaku adil adalah wajib. Tidak berlaku adil adalah maksiat. Adapun berbuat *ihsân* adalah sunnah. Tidak berbuat *ihsân*



bukanlah maksiat. Tidak apa-apa. Tidak dianggap telah menyalahi perintah dan tidak meninggalkan perintah. Sebabnya, perintah berbuat *ihsân* bukan bersifat tegas (*jâzim*).

Demikian juga jika *Asy-Syâri'* memerintahkan suatu perintah yang bersifat pilihan antara melakukan atau tidak melakukan, maka seorang Muslim wajib menaatinya sebagaimana yang diperintahkan itu, yakni dalam bentuk pilihan antara melakukan dan tidak melakukannya, bukan pilihan antara menaati atau tidak menaati. Jika dia melakukan atau tidak melakukannya maka dalam dua kondisi itu dia taat pada perintah tersebut. Jadi menaati perintah itu di sini adalah dengan menerimanya dan tidak membangkang. Jika dia tidak melakukannya maka tidak dianggap menyalahi perintah. Sebabnya, memang perintahnya datang dalam bentuk pilihan antara melakukan atau tidak melakukannya.

Atas dasar semua itu, menaati perintah dan bermaksiat terhadapnya itu tidak menunjukkan pelaksanaan apa yang diperintahkan atau tidaknya. Menaati perintah itu tidak lain menunjukkan penerimaan sepenuhnya atas perintah itu, menaatinya sebagaimana yang diperintahkan dan tidak membangkang, baik perintah itu bersifat tegas (*jâzim*), anjuran atau pilihan. Ini merupakan pembahasan tentang ketaatan dan ketidaktaatan kepada perintah, yakni pembahasan tentang perintah itu sendiri sebagai sebuah perintah, bukan pembahasan tentang redaksi perintah. Itu tidak menunjukkan *dalâlah* (makna) tertentu untuk redaksi perintah, melainkan pembahasannya tentang taat dan maksiat. Adapun redaksi perintah maka pembahasannya merujuk pada *madlûl* (makna) bahasa Arabnya.

Adapun syubhat kedua, yaitu tuntutan untuk terikat dengan syariah tidak dibedakan dengan redaksi perintah. Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa' [4]: 65 tidak menjadi dalil dan tidak menunjukkan bahwa asal perintah

itu untuk wajib. Pemaknaan lafal *qadhayta* dalam ayat tersebut dengan *amarta* adalah keliru. Lafal *qadhayta* maknanya adalah *hakamta* (yang engkau putuskan), yakni yang engkau putuskan baik berupa wajib, *mandûb*, mubah, pengharaman, makruh, sah, batil, dan sebagainya.

Betul bahwa menaati perintah adalah wajib. Namun, itu tidak lantas menunjukkan bahwa perintah, yakni apa yang diperintahkan, adalah wajib dilakukan. Menaati perintah *Asy-Syâri'* itu adalah dengan menerima sepenuhnya, menunaikannya sebagaimana yang diperintahkan, tidak membangkang dan tidak menyalahinya. Jika perintahnya secara tegas maka wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan maka merupakan kemaksiatan dan menyalahi perintah. Jika perintahnya hanya anjuran, yakni sunnah atau mandub, maka jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan maka tidak apa-apa; bukan maksiat dan tidak menyalahi perintah. Jika perintahnya dalam bentuk *takhyîr* (pilihan) antara melakukan atau tidak, maka keduanya yakni melakukan atau tidak melakukan, adalah sama-sama menaati perintah.

Dengan demikian pendapat bahwa asal perintah adalah untuk wajib adalah keliru. Yang benar, makna asal perintah adalah tuntutan (*ath-thalab*). *Qarînah*-lah yang menentukan jenis tuntutan itu, yakni menentukan bahwa perintah itu wajib, *mandûb*, mubah dan sebagainya. Perintah itu wajib ditaati, yaitu dengan menerimanya sepenuhnya, dan tidak membangkang, serta menunaikannya sebagaimana yang diperintahkan dengan landasan itu merupakan perintah atau ketentuan hukum dari *Asy-Syâri'*. Dalam semua itu akan ada pahala ketaatan kepada Allah SWT.

WalLâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]



AMERIKA VS CINA, DIMANA POSISI DUNIA ISLAM?

(Bagian 2 - Habis)

Hasbi Aswar

Pengamat Politik Internasional

Beberapa tahun terakhir ini, yang dominan pada potret terkait hubungan AS dan Cina adalah isu persaingan di kawasan Asia Pasifik. Faktanya, hubungan ketergantungan ekonomi antara kedua negara masih terus terjadi sampai saat ini. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa Cina adalah target ekspor barang ketiga terbesar Amerika Serikat dengan nilai 124,5 miliar dolar, naik 16,9 persen dari tahun 2019. Bagi Cina, AS adalah supplier terbesar untuk kebutuhan barang-barang seperti mesin-mesin listrik, mesin mainan dan peralatan olahraga, furnitur dan tempat tidur, dan barang tekstil.¹

Perusahaan-perusahaan AS melihat Cina adalah pasar yang besar dan menjanjikan. Di sisi lain, Cina butuh investasi asing besar-besaran dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat.²

Di bidang pendidikan, pelajar Cina yang belajar di AS mencapai 370 ribu orang pada tahun 2019-2020, yaitu 34% dari seluruh jumlah pelajar asing di AS. Kerjasama penelitian antara kedua negara terus terjalin termasuk di era Covid-19.

Masa Depan Pertarungan AS – Cina

Dalam pertarungan antara AS dan Cina,

tampak bahwa Cina berupaya merespon sikap AS secara defensif. Setiap serangan propaganda AS atau aksi-aksi provokasi AS untuk meningkatkan ketegangan, seperti pelatihan militer bersama, serangan terhadap isu HAM, perdagangan, dan yang lainnya tidak direspon secara konfrontatif oleh Cina. Cina selalu membela diri dan menyampaikan sikap terbuka dan kooperatifnya serta bersiap membawa segala masalah ke meja perundingan. Di sisi lain peningkatan kerjasama militer AS juga direspon oleh Cina sebagai bentuk provokasi yang mengganggu stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Dalam politik internasional, perubahan struktur politik adalah sesuatu hal yang wajar. Ada saatnya negara *superpower* yang dominan digantikan oleh negara *superpower* yang baru muncul. Jika melihat kondisi Cina saat ini dan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Cina masih berada di langkah awal untuk menuju negara *superpower* global. Ini yang telah terbaca sehingga AS berupaya untuk mengaborsi langkah Cina ini agar tidak sampai pada kondisi yang tidak bisa terbendung lagi.

Melihat sikap Amerika Serikat terhadap Cina dan kebijakan strategisnya di Indo-Pasifik untuk membendung Cina, ke depan AS akan

terus mengobarkan persaingan. Targetnya sampai betul-betul Cina sudah sampai tahap yang tidak membahayakan kepentingan AS baik di kawasan maupun global. AS akan terus menggunakan isu HAM, laut Cina Selatan sebagai bagian dari narasi politik untuk menghantam Cina. AS juga akan terus memperkuat kerjasama militer bersama Jepang, Korea Selatan, Australia dan India dan kerjasama AUKUS untuk menekan Cina.

Meskipun demikian, saling ketergantungan antara kedua negara juga akan membuat persaingan antara kedua negara juga sulit mencapai tahap yang lebih keras seperti di era Perang Dunia atau Perang Dingin. Karena itu kedua belah pihak akan selalu mencari jalan untuk bernegosiasi satu sama lain.³

Posisi Umat Islam

Konteks persaingan antara Cina dan AS dalam lingkup yang besar adalah persaingan dalam peradaban sekuler kapitalisme. Artinya,

Dalam laporan Edelman Trust Barometer (2020) terkait respon masyarakat dunia terhadap kapitalisme dengan jumlah 34.000 orang dari 28 negara disimpulkan bahwa 56% masyarakat setuju bahwa kapitalisme lebih banyak merusak daripada menciptakan kebaikan di bumi.

persaingan yang terjadi antara kedua negara ini tidak memiliki kontribusi besar terhadap umat manusia bahkan berpotensi mengorbankan banyak nyawa. Sama halnya dengan konflik-konflik yang terjadi selama ini dalam sistem kapitalisme sejak abad-abad yang lalu sampai sekarang.

Cina dan AS sekarang juga punya masalah internal yang banyak dan berpotensi besar menghancurkan negara ini dari dalam; kesenjangan sosial yang tinggi di masyarakat, tingkat kelahiran bayi yang rendah, kerusakan moral, kriminalitas, pengangguran, polusi udara, dsb.

Dalam laporan Edelman Trust Barometer (2020) terkait respon masyarakat dunia terhadap kapitalisme dengan jumlah 34.000 orang dari 28 negara disimpulkan bahwa 56% masyarakat setuju bahwa kapitalisme lebih banyak merusak daripada menciptakan kebaikan di bumi.⁴

Pandangan terhadap demokrasi juga sama, Pew Research Center (2019) melaporkan hasil penelitian dari 27 negara dengan lebih 30 ribu responden menunjukkan bahwa 51 persen tidak puas terhadap demokrasi, 60% Pemilu tidak menghasilkan perubahan, 54% para politisi yang cenderung korup. Sikap masyarakat ini dianggap menjadi bagian dari penyebab menurunnya kualitas demokrasi negara-negara secara global.⁵

Di sisi lain di Dunia Islam, aspirasi terhadap pentingnya penerapan syariah Islam semakin meningkat. Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya peran gerakan-gerakan Islam dalam politik di berbagai negara Muslim. Survei-survei juga menunjukkan di berbagai negeri Islam telah terjadi peningkatan kesadaran bersyariah di antara kaum Muslim. Fakta paling mutakhir adalah runtuhnya rezim sekuler Afganistan yang ditopang oleh AS dan kembalinya Taliban sebagai penguasa. Salah satu faktor penyebabnya adalah Muslim

Afganistan lebih rela diatur dengan Islam daripada dengan aturan-aturan yang tidak berasal dari hukum-hukum Allah SWT.

Dalam menghadapi persaingan antara Cina dan Amerika Serikat, umat Islam tidak boleh terjebak pada pilihan salah satu yang terbaik, kemudian memihak salah satu di antara mereka. Sebabnya, dua-duanya adalah bagian dari masalah peradaban sekuler yang ada hari ini. Saatnya kaum Muslim memiliki agenda sendiri yang berakar dari ajaran - ajaran Islam yang luhur dan telah menjadi faktor penentu kecemerlangan peradaban Islam selama 14 abad lamanya. □

Daftar Pustaka:

- Al Jazeera. 'A "New Cold War"?: How the US-China Trade Dispute Is Deepening'. Accessed 22 January 2022. <https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/29/a-new-cold-war-how-the-us-china-trade-dispute-is-deepening>.
- Blinken Slams "Aggressive" China; Vows Stronger Indo-Pacific Ties'. Accessed 22 January 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/14/blinken-vows-stronger-defence-economic-alliances-in-indo-pacific>.
- Department of Defence Ministers. 'Australia Joins Exercise MALABAR 2020'. Australian Government Department of Defence, 2020. <https://www.minister.defence.gov.au/minister/reynolds/media-releases/australia-joins-exercise-malabar-2020#:~:text=Australia has joined key regional of regional peace and security>.
- Harb, Ali. 'US Military Spending Grows as Policy Shifts to "Prioritise China"'. Accessed 22 January 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/16/us-military-spending-grows-as-policy-shifts-to-prioritise-china>.
- Hass, Ryan. 'The "New Normal" in US-China Relations: Hardening Competition and Deep Interdependence.' Brookings (blog), 12 August 2021. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/12/the-new-normal-in-us-china-relations-hardening-competition-and-deep-interdependence/>.
- He, Kai, and Li Mingjiang. 'Four Reasons Why the Indo-Pacific Matters in 2020 | OUPblog', 2020. <https://blog.oup.com/2020/02/four-reasons-why-the-indo-pacific-matters-in-2020/>.
- Jennings, Ralph. 'China's Economy Could Overtake US Economy by 2030'. VOA, 4 January 2022. <https://www.voanews.com/a/chinas-economy-could-overtake-us-economy-by-2030/6380892.html>.
- John, Mark. 'Capitalism Seen Doing "more Harm than Good" in Global Survey.' Reuters, 20 January 2020, sec. Business News. <https://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-trust-idUSKBN1ZJOCW>.
- Lin, Bonny, Michael Chase, Jonah Blank, Cortez Cooper, Derek Grossman, Scott Harold, Jennifer Moroney, et al. Regional Responses to U.S.-China Competition in the

- Indo-Pacific: Study Overview and Conclusions. Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Study Overview and Conclusions, 2020. <https://doi.org/10.7249/rr4412>.
- O'Rourke, Ronald. 'U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress (Updated)'. In *Current Developments in the U.S.-China Relationship*, 121–288, 2021.
- Ott, Marvin. 'The South China Sea in Strategic Terms,' 2019. <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/the-south-china-sea-strategic-terms>.
- Paskal, Cleo. 'Indo-Pacific Strategies, Perceptions and The View from Seven Countries.' *Energy, Environment, and Resources Programme and Asia-Pacific Programme*, no. March (2021): 53.
- Council on Foreign Relations. 'Timeline: U.S. Relations With China 1949–2021'. Accessed 22 January 2022. <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china>.
- United States Trade Representative. 'The People's Republic of China: U.S.-China Trade Facts.' United States Trade Representative. Accessed 22 January 2022. <http://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan-peoples-republic-china>.
- USAID. 'USAID Showcases More Than \$286 Million in Planned Programs and Initiatives to Boost Economic Growth in the Indo-Pacific', 2021. <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-28-2021-usaid-showcases-more-286-million-planned-programs-and-initiatives>.
- . 'USAID's Role in Advancing the U.S. Vision for a Free and Open Indo-Pacific | U.S. Agency for International Development, 2019. <https://www.usaid.gov/indo-pacific-vision/econ/shared-prosperity-2019>.

Catatan Kaki:

- United States Trade Representative. 'The People's Republic of China: U.S.-China Trade Facts', United States Trade Representative, accessed 22 January 2022, <http://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan-peoples-republic-china>.
- 'A "New Cold War"?: How the US-China Trade Dispute Is Deepening', accessed 22 January 2022, <https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/29/a-new-cold-war-how-the-us-china-trade-dispute-is-deepening>.
- Ryan Hass, 'The "New Normal" in US-China Relations: Hardening Competition and Deep Interdependence', *Brookings* (blog), 12 August 2021, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/12/the-new-normal-in-us-china-relations-hardening-competition-and-deep-interdependence/>.
- Mark John, 'Capitalism Seen Doing "more Harm than Good" in Global Survey', *Reuters*, 20 January 2020, sec. Business News, <https://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-trust-idUSKBN1ZJOCW>.
- Wike Richard, Silver Laura, and Castillo Alexander, "Many People Around the World Are Unhappy With How Democracy Is Working | Pew Research Center," April 29, 2019, <https://www.pewresearch.org/global/2019/04/29/many-across-the-globe-are-dissatisfied-with-how-democracy-is-working/>.



SPIRIT ISLAM

Dalam Perlawanan Umat Tatar Sunda Terhadap Penjajah (Lanjutan)

Abdurrahman Al-Khaddami dan Wirahadi Geusan Ulin

(Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah di Tatar Sunda)

Tijan ad-Durari:

(الخلافة) النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم مصالح المؤمنين... قال صلى الله عليه و سلم الخلافة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا عضوا اي ذا عض و تضيق لان الملوك يضربون بالرعية حتى كأنهم يعضون اعضا فالمراد انه ذو تضيق ومشقة على الرعية... تولاهما معاوية بن ابي سفيان تسع عشرة سنة وقال معاوية انا اول الملوك وخلافته صحيحة بعد موت علي رضي الله عنه و بعد خلع الحسن بن علي نفسه عن الخلافة وتسليمها الى معاوية وخلافته المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ...

(Khilafah) Pengganti dari Nabi saw. dalam keumuman berbagai kemashlahatan kaum Mukminin... Rasulullah saw. bersabda, "Khilafah setelahku adalah 30 (tiga puluh)

tahun kemudian menjadi Mulk[an] 'Adhudh[an]." Artinya, menggigit dan menyulitkan karena para penguasa itu memukul rakyat hingga seakan mereka benar-benar menggigit, maksudnya ialah mempersempit dan memberikan kesulitan pada rakyat... Muawiyah ibn Abu Sufyan menjabat Khilafah selama 19 tahun. Muawiyah berkata, "Saya adalah penguasa pertama." Khilafahnya itu shahih setelah wafatnya Ali ra. dan pengunduran diri al-Hasan ibn Ali dari Khilafah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Khilafahnya disebutkan dalam sabda Nabi saw...¹

Syarh Ta'liim al-Muta'allim:

(وبعد) فلما رأيت الكتاب المسمى بتعليم المتعلم مرغوبا ومقبولا بين أولى التعليم والتعلم خصوصا بين الطالبين الساكنين في حرم أشرف الملوك والسلاطين...

أعني به السلطان الأعظم والحقان المعظم صفوة
سلاطين الأمم ظل الله على مفارق الدنيا العلم
مولى ملوك العرب والعجم السلطان بن السلطان
السلطان مراد خان بن سليم خان خلد الله
خلافته وأيد سلطنته ما دار الفلك الدوار
واختلف الليل والنهار ...

*Wa Ba'du. Setelah saya melihat kitab yang
bernama Ta'liim al-Muta'allim diminati dan
diterima di antara para guru dan pelajar,
terkhusus di kalangan pelajar yang tinggal
di Harm Asyraf al-Muluk wa as-Salathin
(lembaga khusus pendidikan Sultan
Utsmaniyah dan keluarganya) ...*

*Saya persembahkan kepada Sultan yang
Agung, Khaqan yang dimuliakan, Shafwah
bagi para Sultan berbagai umat, DzillulLaah
bagi semesta dunia, Maula para penguasa
Arab dan non-Arab, Sultan putra Sultan,
Sultan Murad (III) Khan ibn Salim (II) Khan,
semoga Allah melanggengkan Khilafah-nya
dan menguatkan Sulthanah-nya, selama
bintang beredar dan siang – malam
bergantian...²*

(فإن لم يكن) أي لم يوجد (في البلدة من يقوم به
اشتركوا جميعا في المأثم) مصدر ميمي بمعنى الإثم
(فيجب على الإمام) أي الخليفة (أن يأمرهم
بذلك) أي بالقيام به (ويجير أهل البلدة على
ذلك) القيام ...

*(Jika tidak ada) yakni tidak ditemukan (di
suatu negeri orang yang melaksanakan hal
itu "fardhu kifayah", maka mereka turut serta
semuanya dalam al-Ma`tsam "dosa")
mashdar mim dari al-Itsm "dosa", (wajib
bagi Imam), yakni Khalifah (memberikan
perintah kepada mereka dengan hal itu),
yakni melaksanakan hal itu "fardhu kifayah",*

*(dan memaksa penduduk negeri tersebut
atas hal itu), yakni pelaksanaannya.³*

Kaasyifah as-Saja Syarh Safiinah an-Najaa:
(غير المحترم) وهو ما لا يحرم قتله (سته) من
الأشياء أحدها (تارك الصلاة) أي بعد أمر الإمام
والإستنابة ندبا وقيل وجوبا ...

ورابعها (الكافر الحربي) وهو الذي لا صلح له مع
المسلمين قاله الفيومي وخرج بالحربي ثلاثة اقسام
الذمي وهو من عقد الجزية مع الامام او نائبه
ودخل تحت احكام الإسلام... والمعاهد وهو من
عقد المصالحة مع الامام او نائبه من اهل الحرب
على ترك القتال... والمؤمن وهو من عقد الأمان
مع بعض المسلمين ...

*(Yang bukan muhtaram/"dimuliakan") yaitu
sesuatu yang tidak haram untuk dibunuh
(ada 6) perkara, yang pertama (orang yang
meninggalkan shalat), yakni setelah
disampaikan perintah dari Imam dan
permintaan agar taubat yang sunnah
hukumnya dan dikatakan wajib...*

*Yang keempat (kafir harbi) yaitu kafir yang
tidak ada perjanjian antara dia dengan kaum
Muslim. Pendapat al-Fayumi. Keluar dari
(status) Harbi ialah 3 (tiga) jenis (kafir);
dzimmi, yakni kafir yang berakad jizyah
bersama Imam atau wakilnya dan masuk di
bawah Hukum Islam...; mu'ahid, yakni kafir
yang berakad perjanjian bersama Imam atau
wakilnya, dari kalangan Ahli Harb untuk
menghentikan perang...; mu'amman, yakni
kafir yang berakad (jaminan) keamanan
bersama sebagian kaum Muslim.⁴*

Matan Abi Sujâ' (at-Taqrîb):

Tarikh

ويتضمن عقد الجزية اربعة اشياء ان يؤدوا الجزية
وان تجري عليهم احكام الإسلام وان لا يذكروا
دين الإسلام الا بخير وان لا يفعلوا ما فيه ضرر
على المسلمين

*Akad jizyah mengandung empat perkara, yakni hendaknya mereka membayar jizyah, diterapkan pada mereka Hukum Islam, mereka tidak boleh menyebutkan Din Islam kecuali kebaikan, dan mereka tidak melakukan sesuatu yang bahaya bagi kaum Muslim.*⁵

Murqah Shu'ud at-Tashdiiq Syarh Sullam at-Tawfiiq:

(ولا يقبل منه) أي المرتد (إلا الإسلام أو القتل)
بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يتب والقاتل هو
الإمام فإن لم يقتله وجب على الآحاد قتله على
استظهره الشرقاوي عند القدرة وأمن العاقبة لأنه
من قبيل النهي عن المنكر ...

*(Tidak diterima darinya) yakni orang murtad (kecuali Islam atau hukuman mati) dengan dipenggal lehernya menggunakan pedang jika dia tidak bertaubat. Yang melaksanakan hukuman mati adalah Imam, maka jika Imam tidak melaksanakan hukuman mati maka wajib bagi perorang untuk melaksanakan hukuman mati atas penjelasan asy-Syarqawi ketika mampu dan aman dari akibatnya karena hal itu bagian dari melarang terhadap kemungkaran ...*⁶

Secara khusus, di antara Ulama Tatar Sunda yang menyerukan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan ialah Syaikhuna Tubagus Ahmad Bakri ibn Saida as-Samfuri al-Bantani; dengan perspektif Mazhab Imamuna asy-Syafi'i. Berikut ini di antara *maqalah* beliau

(Jika tidak ada) yakni tidak ditemukan (di suatu negeri orang yang melaksanakan hal itu "fardhu kifayah", maka mereka turut serta semuanya dalam al-Ma'tsam "dosa") mashdar mim dari al-Itsm "dosa", (wajib bagi Imam), yakni Khalifah (memberikan perintah kepada mereka dengan hal itu), yakni melaksanakan hal itu "fardhu kifayah", (dan memaksa penduduk negeri tersebut atas hal itu), yakni pelaksanaannya.

rahimahulLaah:

فاكي بائي كتاب سلم التوفيق جغ بداية فستي
نكارا دنيايه كجيدا لوكونا سناغ فمارينته جغ سنغ
رعية اوسها كموه دووت بايك والله اعلم...

Pake bae kitab Sullam at-Tawfiiq jeung Bidayah, pasti Nagara Dunya teh kacida lugina, senang pamarentah jeung senang rakyat, usaha gemuh duit banyak, wallahu a'lam.⁷ (Pakai saja kitab Sullaam at-Tawfiiq dan Bidaayah, pasti negara dunia sangat lugina, senang pemerintah dan rakyatnya, usaha kaya banyak uang).

Wallaahu a'lam. □

Catatan kaki:

- ¹ Nawawi al-Jawi, *Tijân ad-Durârî*, hlm. 15
- ² Ibrahim, *Syarh Ta'lim al-Muta'allim*, hlm. 2
- ³ Ibrahim, *Syarh Ta'lim al-Muta'allim*, hlm. 2
- ⁴ Nawawi al-Jawi, *Syarah Safinah an-Najâ*, hlm. 34
- ⁵ Abu Syuja', *Matan Abi Sujâ' (at-Taqrîb)*, hlm. 61
- ⁶ Nawawi al-Jawi, *Murqah Shu'ud at-Tashdiq*, hlm. 14
- ⁷ Ahmad as-Samfuri, *Mashlahah al-Islâmiyyah*, hlm. 27

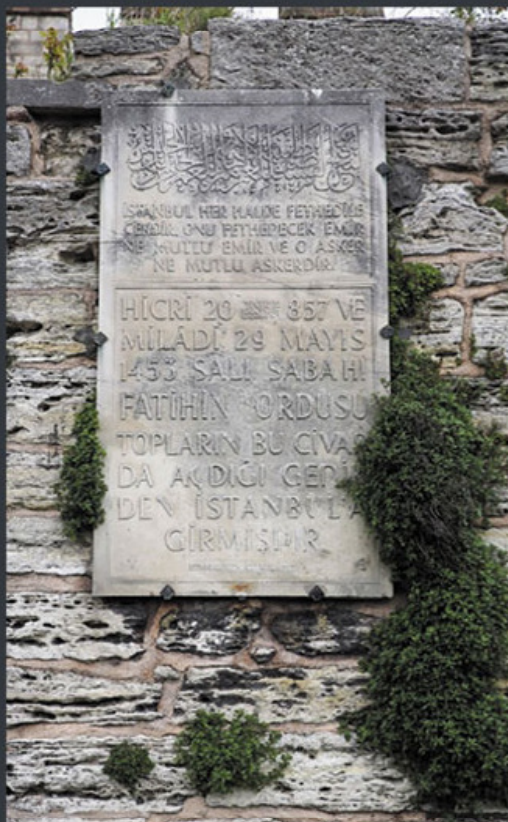
Dengan penaklukan Istanbul oleh Fatih Sultan Mehmet dan pasukannya, Kekaisaran Romawi Timur berakhir. Mulai sekarang, Istanbul akan menjadi wilayah Ottoman, dan pintu masuk dan keluar ke kota akan disediakan melalui gerbang di dinding. Banyak dari 60 gerbang dari mana pintu masuk dan keluar dibuat ke Istanbul, yang pernah disebut "Eis-tin polia / kota terdalam, kota terdalam" karena dikelilingi oleh tembok kota dari darat dan laut, bertahan hingga hari ini. Beberapa gerbang bersejarah yang telah melayani kota selama bertahun-tahun, meskipun tidak bertahan hingga saat ini, tetap hidup dengan nama yang diberikan untuk wilayah tempat mereka berada. Berikut adalah gerbang yang menyediakan pintu masuk dan keluar ke kota selama berabad-abad di sepanjang tembok bersejarah Istanbul...

Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/istanbulun-tarihe-tanikliik-eden-sur-kapilari/2>



Gerbang benteng ini terletak di distrik Mevlanakapi, Fatih. Namanya merepresentasi ke wilayah di mana ia berada.



Gerbang Topkapi. Selama penaklukan kota Konstantinopel, meriam besar Al Fatih ditempatkan di depan gerbang ini, namanya adalah "Gerbang Meriam" dan kemudian telah sampai pada zaman kita sebagai Topkapi.



Gerbang Narlikapi adalah gerbang terdekat ke tembok tanah di dalam tembok Marmara. Sedikit di depan gerbang ini, yang berada di belakang stasiun kereta Yedikule, adalah Gereja Surp Hovannes, yang dibangun oleh Prancis yang datang untuk meletakkan rel kereta api dan kemudian diberikan kepada komunitas Armenia.



Gerbang Topkapi. Gerbang ini disebut "Porta Ayo Romanos" oleh Bizantium.

Gerbang-Gerbang Benteng Istanbul yang Menjadi Saksi Sejarah (Seri 2)

al-wa'ie



Sisi lain gerbang Topkapi.



Gerbang ini merupakan pintu masuk dan keluar dari Benteng Yedikule (Dungeon) yang diperuntukkan untuk umum.



Sisi lain pintu Yedikule.



Pintu SILIVRIKAPI. Terletak di distrik Fatih, Silivrikapi memberi nama distrik tempat ia berada.



Pintu Silivrikapi.